

**IMPLEMENTASI KERJA SAMA *ASEAN MINISTERIAL MEETING ON
SPORTS* DALAM PENINGKATAN DAYA SAING ATLET ASIA
TENGGERA TAHUN 2016–2025**

Skripsi

Oleh

**TITO PRASETIO WICAKSONO
NPM 2216071153**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KERJA SAMA *ASEAN MINISTERIAL MEETING ON SPORTS* DALAM PENINGKATAN DAYA SAING ATLET ASIA TENGGARA TAHUN 2016–2025

Oleh
TITO PRASETIO WICAKSONO

Daya saing atlet negara-negara Asia Tenggara di tingkat internasional masih menunjukkan adanya keterbatasan, Kondisi tersebut terjadi meskipun ASEAN telah mengembangkan berbagai mekanisme kerja sama olahraga melalui AMMS, SOMS, dan *ASEAN Work Plan on Sports* sebagai bagian dari kerangka ASCC. Ketidaksesuaian antara penguatan kerja sama olahraga kawasan dan capaian daya saing atlet mendorong perlunya kajian mengenai implementasi kerja sama AMMS dalam peningkatan daya saing atlet Asia Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kerja sama AMMS dalam peningkatan daya saing atlet Asia Tenggara pada periode 2016–2025.

Penelitian ini menggunakan kerangka analisis diplomasi olahraga melalui pendekatan *diplomacy through sports*, pendekatan *sport as diplomacy* dan *elite sports development framework*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kerja sama AMMS dalam peningkatan daya saing atlet Asia Tenggara pada periode 2016–2025. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap dokumen resmi ASEAN, dan AMMS, *ASCC Blueprint 2025*, *ASEAN Work Plan on Sports 2016-2025*, *Kazan action plan*, *Joint statement AMMS 1-8*, publikasi jurnal ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama olahraga ASEAN melalui pengembangan program kawasan, peningkatan koordinasi kelembagaan, dan penguatan kapasitas olahraga regional. Berdasarkan pendekatan *diplomacy through sports*, AMMS berfungsi sebagai instrumen kerja sama yang mendorong pertukaran pengetahuan, pengembangan kapasitas, dan kebijakan olahraga ASEAN. Sementara itu, melalui pendekatan *sport as diplomacy*, berbagai ajang olahraga dimanfaatkan sebagai sarana representasi identitas dan visibilitas ASEAN di tingkat internasional. Berdasarkan *elite sports development framework*, dijabarkan implementasi kerja sama olahraga ASEAN pada dimensi *elite sport system*, *mass participation*, *capacity building*, dan *integrity and regulation*.

Kata Kunci: AMMS, Diplomasi Olahraga, Daya Saing Atlet, ASEAN, *Elite Sports Development Framework*

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF COOPERATION THE ASEAN MINISTERIAL MEETING ON SPORTS IN ENHANCING THE COMPETITIVENESS OF SOUTHEAST ASIAN ATHLETES FOR THE PERIOD 2016–2025

By

TITO PRASETIO WICAKSONO

The competitiveness of Southeast Asian athletes at the international level remains limited despite ASEAN's efforts to develop various sports cooperation mechanisms through the AMMS, SOMS, and the ASEAN Work Plan on Sports as part of the ASCC framework. The discrepancy between the strengthening of regional sports cooperation and the level of athletes' competitiveness has highlighted the need to examine the implementation of cooperation AMMS in enhancing the competitiveness of Southeast Asian athletes. This study aims to analyze the implementation of cooperation AMMS in improving the competitiveness of Southeast Asian athletes during the period 2016–2025. This study employs the sport diplomacy framework through the diplomacy through sports and sport as diplomacy approaches, as well as the elite sports development framework. A qualitative method with a case study approach was applied. Data were collected through document analysis of official ASEAN and AMMS documents, the ASCC Blueprint 2025, the ASEAN Work Plan on Sports 2016–2025, the Kazan action plan, Joint Statements of the 1st–8th AMMS, and relevant academic publications. The findings indicate that the ASEAN sports cooperation through the expansion of regional programs, enhanced institutional coordination, and capacity-building initiatives in the regional sports sector. From the perspective of diplomacy through sports, AMMS serves as a cooperative instrument that facilitates knowledge exchange, capacity development, and sports policy coordination among ASEAN. Meanwhile, from the sport as diplomacy perspective, regional sporting events have been utilized as platforms for representing ASEAN identity and enhancing the region's international visibility. Furthermore, the elite sports development framework reveals that ASEAN sports cooperation has been implemented through four dimensions: elite sport system, mass participation, capacity building, and integrity and regulation.

Keywords: AMMS, Sport Diplomacy, Competitiveness, ASEAN, Elite Sports Development Framework

**IMPLEMENTASI KERJA SAMA *ASEAN MINISTERIAL MEETING ON
SPORTS* DALAM PENINGKATAN DAYA SAING ATLET ASIA
TENGGERA TAHUN 2016–2025**

**Oleh
TITO PRASETIO WICAKSONO
NPM 2216071153**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
“SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL”**

**Pada
Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: Implementasi Kerja Sama ASEAN
Ministerial Meeting on Sports Dalam
Peningkatan Daya Saing Atlet Asia
Tenggara Tahun 2016–2025

Nama Mahasiswa

: **Tito Prasetyo Wicaksono**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2216071153

Program Studi

: Hubungan Internasional

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing Pembimbing

Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si.

NIP. 19900606 2019031019

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

Dr. Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.PA.

NIP. 198106282005011003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si.

Penguji Utama : Dr. Arie Fitria, S.IP., MT., DEA.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 18 Juni 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lainnya, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 18 Juni 2026



Tito Prasetyo Wicaksono

NPM. 2216071153

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Tito Prasetio Wicaksono, dilahirkan di Toto Harjo pada 20 Januari 2002, anak kedua dari pasangan Ayahanda Suradi dan Ibunda Sutarti yang senantiasa memberikan dukungan dalam perjalanan pendidikan penulis. Penulis telah menempuh Pendidikan Taman Kanak-Kanan (TK) TK PGRI Toto Harjo Lampung Timur pada 2006, Sekolah Dasar (SD) ditempuh pada SDN 1 Toto Harjo Lampung Timur pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Islam Purbolinggo Lampung Timur pada tahun 2017, dan Sekolah Menengah Pertama Atas (SMA) di SMAN 1 Purbolinggo Lampung Timur pada tahun 2020. Penulis merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Lampung yang diterima melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis mengikuti aktivitas akademik dan non-akademik. Pada tahun 2024, penulis dipercaya sebagai Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Forum Studi Pengembangan Islam (FSPI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis memperoleh pengalaman dalam bidang komunikasi organisasi, pengelolaan informasi, serta membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak baik di lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Selanjutnya pada tahun 2025, penulis memperoleh amanah sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dalam menjalankan amanah tersebut, penulis bertanggung jawab untuk mengoordinasikan berbagai program kerja organisasi, menjembatani aspirasi mahasiswa, serta membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Pengalaman ini memberikan banyak pembelajaran mengenai kepemimpinan, manajemen organisasi, pengambilan keputusan, dan kerja sama tim yang menjadi bekal berharga bagi penulis dalam pengembangan diri maupun karier

profesional di masa mendatang. Selain itu penulis juga menjadi bagian dari tim *Liaison Officer* (LO) pada acara Sela Vennas AIHII XV pada tahun 2024, dimana penulis bertanggung jawab dalam mendampingi serta membantu kebutuhan para dosen dan delegasi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia selama rangkaian kegiatan berlangsung. Melalui pengalaman tersebut, penulis memperoleh pembelajaran mengenai komunikasi profesional, koordinasi kegiatan, serta penerapan *hospitality* serta keprotokolan.

Kepada Ayahanda dan Ibunda Tersayang

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri”

-QS. Ar-Ra'd {13}: 11-

“Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya”

-Penulis-

“Pada akhirnya, semuanya hanyalah permulaan”

-Nadin Amizah-

*“Lived it. Loved it.
Farewell, beautiful game”*

-Xabi Alonso-

“Setiap langkah itu punya tujuan, setiap nafas ada kehidupan dan setiap doa punya jawaban. Setiap manusia memiliki perjuangan hidupnya”

SANWACANA

Tidak ada lembar yang paling berarti dan paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan petunjuk-Nya, sungguh sebuah perjuangan yang cukup panjang yang telah saya lalui Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Implementasi Kerja Sama *ASEAN Ministerial Meeting on Sports* Dalam Peningkatan Daya Saing Atlet Asia Tenggara Tahun 2016–2025” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. menyelesaikan skripsi ini demi mendapatkan gelar yang sudah saya impikan dari lama. Rasa syukur dan bahagia yang saya rasakan ini akan saya persembahkan juga kepada orang-orang yang sangat berarti dalam proses perjalanan saya, karena berkat doa dan dukungan dari mereka saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah S.W.T., Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad S.A.W., yang telah memberikan syafaat kepada umatnya di hari akhir.
2. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.P.A. selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang telah banyak membantu dan

membimbing saya, sewaktu saya menjadi Ketua Umum HMJ Hubungan Internasional.

6. Bapak Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis. Beliau senantiasa memberikan arahan, masukan, kritik, serta saran yang membangun selama proses penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
7. Ibu Astiwi Inayah, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan, dukungan, motivasi, serta berbagai masukan yang sangat berarti bagi penulis. Kesediaan beliau sewaktu mengandung untuk berdiskusi dan memberikan arahan selama proses penelitian menjadi kontribusi penting dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Dr. Arie Fitria, S.IP., M.T., DEA. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan guna menyempurnakan skripsi ini. Berbagai arahan yang diberikan selama proses ujian dan penyempurnaan penelitian menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi penulis dalam mengembangkan kemampuan akademik dan penelitian.
9. Ibu Tety Rachmawati, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan, perhatian, dan motivasi kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Lampung. Terima kasih atas bimbingan dan dukungan yang diberikan sehingga penulis dapat menjalani proses akademik dengan baik hingga menyelesaikan studi ini.
10. Kepada Ibu Nibras Fadhlillah, S.IP., M.Si., Bapak Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A., dan Bapak Moh. Nizar, S.IP., M.A. selaku Pembina PHMJ-HI. Terima kasih atas segala bimbingan, arahan, kepercayaan, serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama mengemban amanah sebagai Ketua Umum HMJ Hubungan Internasional. Berbagai nasihat, pengalaman, dan pembelajaran yang diberikan tidak hanya membantu penulis dalam menjalankan organisasi, tetapi juga membentuk karakter, kemampuan

kepemimpinan, serta cara berpikir yang lebih dewasa dalam menghadapi berbagai tantangan.

11. Seluruh dosen dan staf Program Studi Hubungan Internasional Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, bantuan, serta pelayanan akademik yang sangat berarti bagi penulis selama menempuh pendidikan. Terima kasih atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan dalam mendukung proses pembelajaran dan pengembangan, serta tidak lupa selalu mengajarkan semboyan HI yaitu, 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan Santun) + 1J (Jujur). Semoga kelak ilmu yang diperoleh penulis dapat menjadi bekal berharga kedepannya.
12. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Suradi dan Ibunda Sutarti, terima kasih atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, serta kerja keras yang tidak pernah berhenti diberikan kepada penulis. Terima kasih karena telah mendidik penulis dengan penuh kesabaran, mengajarkan nilai-nilai kehidupan, kemandirian, kerja keras, serta pentingnya menjadi pribadi yang rendah hati dan bermanfaat bagi orang lain. Penulis berharap gelar ini akan cukup untuk dipersembahkan terhadap kedua orang tua penulis. Semoga kedepannya anak kalian dapat menjadi orang yang selalu rendah hati, bermanfaat untuk semua orang, dan sukses dunia maupun akhirat.
13. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat sekaligus keluarga yang tergabung dalam grup Nusantara Internasional, yaitu Fadhil, Radit, Bagas, Tegar, Zaky, Candra, Mahatir, Septa, Timotius, dan Wildan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, motivasi, serta bantuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian tidak hanya menjadi tempat berbagi ilmu, berdiskusi, dan bertukar pengalaman, tetapi juga menjadi sumber semangat bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama menjalani kehidupan akademik. Berbagai cerita, canda, tawa, serta kenangan yang telah terukir bersama akan selalu menjadi bagian berharga dalam perjalanan penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung.

14. Teman, sahabat sekaligus saudara, Risma, Wanda, Aldo, Andin, Syafiq, Assabila, Anastasya, Ade, Hanif, dan Imam. orang-orang yang tanpa sengaja penulis temui saat berada di perguruan tinggi dan menjadi sahabat dekat seperti saudara hingga saat ini. Terima kasih atas segala pertolongan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih karena telah terus menjadi orang baik selama ini. Dari banyak manusia yang hidup di dunia ini, penulis merasa beruntung bisa bertemu dengan mereka. Semoga mereka selalu sehat dan bahagia selamanya.
15. Kepada Aryo, Tasya, Dzakwan, Lulu, dan Dwiki, terima kasih telah menjadi teman-teman penulis sejak awal perkuliahan. Pertemanan yang berawal dari sebuah tugas di semester pertama telah berkembang menjadi hubungan yang penuh cerita, dukungan, dan pengalaman berharga selama menjalani masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, bantuan, serta berbagai momen yang telah dilalui bersama.
16. Kepada keluarga Kabinet Abhinava, yaitu, Yusa, Algifari, Dika, Akbar, Aldi, Zakpal, Kahfi, Jibon, Kia, dan PHMJ HI yang tak bisa penulis tuliskan semua, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta pengalaman berharga yang telah diberikan selama perjalanan di Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional. Terima kasih telah menjadi rekan yang selalu hadir untuk saling membantu, berbagi cerita, memberikan masukan, serta mendukung satu sama lain dalam berbagai situasi. Kehadiran kalian telah memberikan banyak pelajaran, kenangan, dan pengalaman yang sangat berarti bagi penulis. Pertemuan dengan orang-orang baik seperti kalian merupakan salah satu anugerah dan pengalaman terbaik yang akan selalu dikenang oleh penulis sepanjang hidup.
17. Teman-teman seperbimbingan, yaitu Fikri, Ilham, Fatim, dan Dita, yang senantiasa berbagi informasi, pengalaman, serta memberikan dukungan selama proses penyusunan skripsi. Terima kasih atas, motivasi dan semangat yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan kesuksesan dalam menggapai cita-cita di masa yang akan datang.

18. Kepada seseorang yang memiliki NPM 2216071118, terima kasih seseorang yang pernah berjalan cukup jauh bersama penulis, yang sekarang namanya tidak dapat penulis sebutkan lagi. Terima kasih telah menjadi bagian dari proses bertumbuh, dari hari-hari belajar, berjuang, dan bertahan. Penulis juga mengucapkan terima kasih karena telah memberikan ide topik penelitian yang pada akhirnya menjadi awal dari penyusunan skripsi ini. Ada masa di mana kehadiranmu memberi semangat, dan itu akan selalu diakui sebagai bagian dari perjalanan hidup penulis. Kepergianmu mengajarkan penulis arti kedewasaan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menjalani hidup. Persembahkan ini bukan untuk mengulang masa lalu, melainkan untuk menutupnya dengan tenang. Agar yang baik tetap dikenang, dan yang menyakitkan tidak dibawa ke langkah berikutnya. “Kamu adalah sebentar yang selamanya penulis ingat”.
19. Terakhir, untuk seseorang yang belajar berdiri sendiri dan menapaki jalan terjal yang tak selalu mulus, dan meletakkan sisa keberaniannya untuk bertahan; Diriku sendiri. Terimakasih sudah bangkit dan terimakasih untuk tidak menyerah. Mari bertempur kembali.

Bandar Lampung, 18 Juni 2026

Tito Prasetyo Wicaksono

NPM. 2216071153

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Kerangka Analisis	17
2.2.1 Teori Diplomasi Olahraga	17
2.2.1.1 Pendekatan <i>Diplomacy through sports</i>	18
2.2.1.2 Pendekatan <i>Sport as diplomacy</i>	20
2.2.2 <i>Elite Sports Development Framework</i>	22
2.3 Kerangka Pemikiran	23
III. METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Jenis Penelitian	26
3.2 Fokus Penelitian	27
3.3 Sumber Data	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data	29
3.5 Teknik Analisis Data	30
3.5.1 Kondensasi Data.....	31
3.5.2 Penyajian Data.....	31
3.5.3 Penarikan Kesimpulan.....	32

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Hasil	33
4.1.1 Daya Saing Atlet Asia Tenggara di Tingkat Global	33
4.1.1.1 Kondisi daya Saing Atlet Asia Tenggara	34
4.1.1.2 Distribusi Daya Saing Antar Negara Asia Tenggara	41
4.1.2 AMMS sebagai Instrumen Kerja Sama Olahraga ASEAN	42
4.1.3 Implementasi Kerja Sama Olahraga ASEAN melalui AMMS.....	46
4.1.3.1 Implementasi <i>ASEAN Work Plan on Sports</i> 2016–2020	49
4.1.3.2 Implementasi <i>ASEAN Work Plan on Sports</i> 2021–2025	55
4.2 Pembahasan	65
4.2.1 Analisis Implementasi Kerja Sama Olahraga ASEAN dalam Diplomasi Olahraga	65
4.2.1.1 Pendekatan <i>Diplomacy Through Sports</i>	66
4.2.1.2 Pendekatan <i>Sport as Diplomacy</i>	71
4.2.2 Analisis Implementasi Kerja Sama Olahraga ASEAN dalam <i>Elite</i> <i>Sports Development Framework</i>	77
4.2.2.1 Dimensi <i>Elite sport system</i>	78
4.2.2.2 Dimensi <i>Mass Participation</i>	81
4.2.2.3 Dimensi <i>Capacity Building</i>	83
4.2.2.4 <i>Dimensi Integrity dan Regulation</i>	86
4.2.3 Analisis Implementasi Kerja Sama Olahraga ASEAN melalui AMMS dalam Perspektif <i>Diplomacy Through Sports</i> dan <i>Elite</i> <i>Sports Development Framework</i>	89
V. KESIMPULAN DAN SARAN	94
5.1 Kesimpulan.....	94
5.2 Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Peringkat Dan Perolehan Medali <i>Asian Games</i> Asia Timur Dan Asia Tenggara Tahun 2018	4
Tabel 1. 2 Peringkat Dan Perolehan Medali <i>Asian Games</i> Asia Timur Dan Asia Tenggara Tahun 2023	4
Tabel 2. 1 Komparasi Penelitian Terdahulu	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	25
Gambar 4.1 Peringkat <i>Asian Games</i> 2018	34
Gambar 4.2 Peringkat <i>Asian Games</i> 2023	35
Gambar 4.3 Peringkat Olimpiade Paris 2024	38
Gambar 4.4 Tingkat Kompetisi Cabang Olahraga Internasional	40
Gambar 4.5 Alur Kelembagaan AMMS	44
Gambar 4.6 Distribusi Aktivitas <i>ASEAN Work Plan on Sports</i> 2016- 2020	50
Gambar 4.7 Distribusi Aktivitas <i>ASEAN Work Plan on Sports</i> 2021- 2025	56

DAFTAR SINGKATAN

AMMS	: <i>ASEAN Ministerial Meeting on Sports</i>
APFI	: <i>ASEAN Physical Fitness Indicators</i>
ASCC	: <i>ASEAN Socio-Cultural Community</i>
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
FIFA	: <i>Fédération Internationale de Football Association</i>
IOC	: <i>International Olympic Committee</i>
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SEARADO	: <i>Southeast Asia Regional Anti-Doping Organization</i>
SOMS	: <i>Senior Officials Meeting on Sports</i>
TSG	: <i>Traditional Sports and Games</i>
UNESCO	: <i>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i>
UNICEF	: <i>United Nations Children's Fund</i>
WADA	: <i>World Anti-Doping Agency</i>

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asia Tenggara merupakan kawasan dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, baik dari segi sistem politik, tingkat pembangunan ekonomi, kapasitas kelembagaan, maupun prioritas kebijakan nasional, yang secara langsung memengaruhi pola dan efektivitas kerja sama olahraga di antara negara-negara anggotanya (Acharya, 2009). Perbedaan tersebut tercermin dalam cara masing-masing negara memaknai dan mengembangkan olahraga, mulai dari orientasi prestasi dan diplomasi budaya, kepentingan ekonomi dan pariwisata, hingga fungsi sosial dan pembangunan manusia. Keragaman ini menjadikan kerja sama olahraga ASEAN berjalan di tengah kepentingan dan kapasitas yang tidak sama, sehingga memerlukan mekanisme koordinasi yang mampu menjembatani perbedaan tersebut (Narine, 2002).

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) secara institusional telah menempatkan olahraga dalam bentuk upaya mengoptimalkan peran olahraga sebagai instrumen pembangunan manusia, penguatan kohesi sosial, serta peningkatan kualitas generasi muda di Asia Tenggara melalui kerangka *ASEAN Socio-Cultural Community* (ASCC) (ASEAN Socio-Cultural Community, 2025). Melalui berbagai program dan forum kerja sama olahraga, ASEAN berupaya menciptakan ruang kolaboratif yang mendorong Agenda strategis tersebut mencakup kebijakan olahraga, *sport science*, pertukaran atlet, peningkatan pelatihan, *women in sport*, olahraga disabilitas, serta *capacity building* dan *anti-doping* sebagai bagian dari penguatan standar tata kelola dan profesionalisme olahraga di tingkat regional. ASEAN telah memiliki kerangka kerja dan forum kerja sama yang secara khusus mengatur pengembangan olahraga di kawasan. Kerangka

tersebut menjadi bagian utama dari kerja sama sosial-budaya ASEAN yang bertujuan memperkuat identitas kawasan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong gaya hidup sehat bagi masyarakat ASEAN (ASEAN Main Portal, 2026a).

Implementasi agenda kerja sama olahraga yang berada dalam kerangka ASCC mengembangkan berbagai mekanisme kelembagaan yang berfungsi untuk mengoordinasikan kebijakan dan program olahraga di tingkat kawasan. Dalam konteks ini, ASEAN membentuk forum khusus di tingkat menteri yang berfokus pada pengembangan olahraga kawasan, yaitu *ASEAN Ministerial Meeting on Sports* (AMMS), sebagai mekanisme koordinasi utama dalam merumuskan kebijakan dan program kerja sama olahraga di tingkat regional (ASEAN Main Portal, 2026a).

AMMS merupakan forum kerja sama kawasan yang dibentuk melalui persetujuan KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) ASEAN ke-18 yang diselenggarakan pada 7-8 Mei 2011 di Jakarta (ASEAN Main Portal, 2026a). Dalam pelaksanaannya, AMMS menjadi forum tingkat menteri yang bertanggung jawab dalam merumuskan arah kebijakan kerja sama olahraga di kawasan. Forum ini juga menjadi platform bagi negara anggota untuk memperkuat kolaborasi dalam penyelenggaraan ajang olahraga regional, pertukaran atlet dan pelatih, serta program peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang olahraga (ASEAN Main Portal, 2026a).

AMMS didukung oleh *ASEAN Senior Officials Meeting on Sports* (SOMS) yang bertugas merumuskan program strategis, memantau pelaksanaan kebijakan olahraga kawasan, serta memperkuat koordinasi antar lembaga olahraga di negara anggota (ASEAN Main Portal, 2026a). Sebagai panduan implementasi kerja sama tersebut, ASEAN menyusun *ASEAN Work Plan on Sports*, seperti *ASEAN Work Plan on Sports 2016–2020* dan dilanjutkan dengan *ASEAN Work Plan on Sports 2021–2025*. Rencana kerja ini juga mendorong pengembangan jaringan kerja sama antara federasi olahraga, universitas, serta lembaga olahraga regional guna meningkatkan daya saing olahraga ASEAN di tingkat global (*ASEAN Work Plan on Sports 2021-2025*, 2026).

Untuk melihat implementasi kebijakan dalam penelitian ini, daya saing atlet ASEAN didefinisikan sebagai kemampuan negara-negara Asia Tenggara

dalam mencapai prestasi olahraga di tingkat internasional secara kompetitif dan berkelanjutan. Dalam kajian *Sport and Policy*, Houlihan dan Green (2008) menjelaskan bahwa *elite sports development framework* bersifat *performance-oriented*, keberhasilan *elite sports development framework* erat kaitannya dengan capaian dalam kompetisi internasional, yang menjadi tujuan utama pengembangan sistem olahraga (Houlihan & Green, 2008: 2-4).

pencapaian tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari peran diplomasi olahraga, yang merupakan bagian dari praktik diplomasi publik dan mencerminkan konsep *soft power*, serta berfungsi sebagai instrumen internasional di mana organisasi internasional, *national branding*, media dan teknologi, serta dapat dimanfaatkan sebagai alat dalam pelaksanaan diplomasi olahraga. Olahraga juga dipandang sebagai sarana bagi negara untuk menunjukkan keunggulan dan kapasitasnya di tingkat global (Özsari, 2018: 3).

“Elite sport systems are concerned with the systematic and strategic development of elite athlete performance. Made up of a number of different components elite sport systems are considered to lead to international sporting excellence by applying an organised and consistent set of practices to the ‘production’ of elite athletes.” (Houlihan & Green, 2008).

Berdasarkan argumen tersebut dapat ditarik bahwa, daya saing bisa diukur melalui capaian performa dalam kompetisi internasional, yang dioperasionalisasikan melalui:

1. perolehan medali dalam ajang olahraga internasional
2. posisi peringkat negara dalam kompetisi regional dan internasional
3. konsistensi performa atlet dalam periode waktu tertentu.

Penggunaan indikator perolehan medali dalam *Asian Games* dipilih karena ajang ini merepresentasikan kompetisi antarnegara di tingkat Asia dengan standar kompetisi yang relatif tinggi dan komparatif (The Olympic Studies Centre, 2026), Data peringkat negara berdasarkan perolehan medali menunjukkan variasi kapasitas olahraga antarnegara di kawasan Asia untuk menggambarkan posisi negara-negara di kawasan secara lebih sistematis, melalui Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 Peringkat *Asian Games* dijadikan sebagai dasar analisis mengenai daya saing atlet di tingkat regional.

Tabel 1. 1 Peringkat Dan Perolehan Medali *Asian Games* Asia Timur Dan Asia Tenggara Tahun 2018

Asia Timur					Asia Tenggara				
Negara	Emas	Perak	Perunggu	Total	Negara	Emas	Perak	Perunggu	Total
Tiongkok	132	92	65	289	Indonesia	31	24	43	98
Jepang	75	56	74	205	Tailan	11	16	46	73
Korea Selatan	49	58	70	177	Malaysia	7	13	16	36
Korea Utara	12	12	13	37	Vietnam	4	16	18	38
Mongolia	5	9	11	25	Singapura	4	4	14	22
Cina taipei	17	19	31	67	Filipina	4	2	15	21
Hong Kong	8	18	20	46	Kamboja	2	0	1	3
Makau	1	2	2	5	Laos	0	2	3	5
					Myanmar	0	0	2	2
TOTAL ASIA TIMUR	299	266	286	851	TOTAL ASEAN	63	77	158	298

Sumber: The Olympic Studies Centre, 2026

Tabel 1. 2 Peringkat Dan Perolehan Medali *Asian Games* Asia Timur Dan Asia Tenggara Tahun 2023

Asia Timur					Asia Tenggara				
Negara	Emas	Perak	Perunggu	Total	Negara	Emas	Perak	Perunggu	Total
Tiongkok	201	111	71	383	Tailan	12	14	32	58
Jepang	52	67	69	188	Indonesia	7	11	18	36
Korea Selatan	42	59	89	190	Malaysia	6	8	18	32
Korea Utara	11	18	10	39	Filipina	4	2	12	18
Mongolia	3	5	13	21	Singapura	3	6	7	16
Cina taipei	19	20	28	67	Vietnam	3	5	19	27
Hong Kong	8	16	29	53	Myanmar	1	0	2	3
Makau	1	3	2	6	Laos	0	0	3	3
					Kamboja	0	0	1	1
					Brunei	0	1	1	2
TOTAL ASIA TIMUR	337	299	311	947	TOTAL ASEAN	36	47	113	196

Sumber: The Olympic Studies Centre, 2026

Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN secara kolektif masih berada di posisi yang relatif rendah dalam perolehan medali *Asian Games* 2018 dan 2023 dibandingkan kawasan lain seperti Asia Timur (Tiongkok,

Jepang, Korea Selatan) maupun Asia Selatan dan Oseania. Data dari IOC (*International Olympic Committee*) dan *Olympic Studies Centre* menunjukkan bahwa kontribusi atlet-atlet ASEAN dalam perolehan medali negara ASEAN pada ajang Olimpiade masih sangat terbatas dan didominasi oleh beberapa negara tertentu, seperti Tailand, Indonesia, dan Filipina sementara negara-negara Asia Timur secara konsisten menempati peringkat atas dunia (The Olympic Studies Centre, 2026).

Pada *Asian Games* 2018, negara-negara Asia Timur memperoleh total 851 medali yang terdiri dari 299 emas, 266 perak, dan 286 perunggu, sedangkan negara-negara ASEAN secara kolektif hanya memperoleh 298 medali dengan 63 emas, 77 perak, dan 158 perunggu. Perbedaan tersebut menunjukkan kesenjangan kapasitas pembinaan olahraga antara kedua kawasan pada periode tersebut. Pola yang sama kembali terlihat pada *Asian Games* 2023 ketika negara-negara Asia Timur meningkatkan perolehan medali menjadi 947 secara keseluruhan, sementara negara-negara ASEAN hanya memperoleh total 196 medali (The Olympic Studies Centre, 2026).

Penurunan jumlah medali kolektif negara-negara ASEAN dari 298 pada tahun 2018 menjadi 196 pada tahun 2023 menunjukkan adanya keterbatasan dalam mempertahankan konsistensi performa atlet di tingkat Asia. Sebaliknya, negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan tetap menunjukkan stabilitas dalam mendominasi perolehan medali pada kedua periode kompetisi tersebut. Dominasi tersebut mengindikasikan bahwa negara-negara Asia Timur memiliki sistem pembinaan olahraga yang lebih terintegrasi, dukungan kebijakan yang konsisten, serta investasi sumber daya yang lebih besar dalam peningkatan atlet.

Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 menunjukkan capaian daya saing atlet ASEAN dalam ajang internasional tersebut menunjukkan bahwa performa olahraga tidak dapat dilepaskan dari bagaimana sistem dan kebijakan olahraga dikembangkan di masing-masing negara maupun di tingkat kawasan. Perbedaan capaian antarnegara serta kecenderungan stagnasi performa secara kolektif mengindikasikan bahwa olahraga bukan sekadar arena kompetisi, tetapi juga mencerminkan kapasitas pembangunan dan kualitas sumber daya yang dimiliki. Dalam konteks ini, olahraga perlu dipahami tidak hanya sebagai indikator hasil, tetapi juga sebagai faktor yang

berkontribusi dalam membentuk daya saing itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk melihat olahraga sebagai salah satu instrumen strategis yang berperan dalam mendorong peningkatan daya saing, baik di tingkat nasional maupun kawasan.

Daya saing pada dasarnya merupakan hasil dari kemampuan suatu negara dalam melakukan inovasi dan penyesuaian untuk mencapai serta mempertahankan posisi yang lebih unggul dibandingkan negara lain. Olahraga memang tidak secara langsung dimasukkan sebagai komponen utama dalam pengukuran daya saing global, seperti dalam *Global Competitiveness Index* oleh *World Economic Forum* maupun *World Competitiveness* oleh *Institute for Management Development*. Namun, olahraga memiliki peran penting sebagai faktor penggerak (*driving forces*) dalam meningkatkan berbagai aspek yang membentuk daya saing tersebut (KEMENPORA, 2023).

Olahraga berkontribusi dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu elemen utama daya saing. Aktivitas olahraga mendukung peningkatan kebugaran dan kesehatan fisik yang berpengaruh terhadap produktivitas masyarakat. Olahraga juga berperan dalam memperkuat ketahanan individu dan kelompok dalam menghadapi perubahan sosial. Selain itu, olahraga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat interaksi dan kerja sama yang terbentuk dalam kegiatan olahraga. Prestasi olahraga juga dapat dimanfaatkan untuk membangun identitas nasional dan meningkatkan citra suatu negara di tingkat internasional. Meskipun demikian, potensi olahraga dalam mendukung peningkatan daya saing tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal oleh banyak negara.

Kondisi tersebut tercermin dalam perbandingan capaian prestasi antara negara-negara ASEAN dan Asia Timur yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam tingkat daya saing olahraga di tingkat internasional. Menurut Houlihan dalam kajiannya *Mechanisms of international influence on domestic elite sport policy*, menjelaskan bahwa capaian prestasi atau keberhasilan olahraga internasional tidak hanya ditentukan oleh partisipasi dalam kompetisi, tetapi sangat dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan, dukungan institusional, serta integrasi olahraga dalam strategi pembangunan nasional dan kawasan (Houlihan, 2009).

Kondisi ini mengindikasikan bahwa olahraga di Asia Tenggara belum berkembang sebagai kekuatan kolektif yang kompetitif di tingkat global.

Rendahnya capaian tersebut juga berdampak pada terbatasnya pemanfaatan olahraga sebagai instrumen diplomasi internasional. Dalam perspektif diplomasi olahraga menurut Murray, pengelolaan olahraga secara strategis dapat memperluas pengaruh dan interaksi antarnegara melalui jalur non-politik, sedangkan lemahnya pendekatan diplomasi olahraga justru membatasi potensi tersebut (Murray, 2018). Oleh karena itu, penguatan diplomasi olahraga menjadi penting sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan antara potensi dan capaian olahraga kawasan melalui kerja sama yang lebih terkoordinasi dan berkelanjutan.

Meskipun ASEAN telah memiliki kerangka kerja sama olahraga yang relatif lengkap melalui ASCC, AMMS, dan *ASEAN Work Plan on Sports*, keberadaan instrumen-instrumen tersebut secara tidak langsung dirancang untuk mendorong peningkatan kapasitas, koordinasi kebijakan, dan daya saing olahraga kawasan secara kolektif. Kerangka ini secara normatif mencerminkan komitmen negara-negara anggota untuk mengembangkan kerja sama olahraga yang terintegrasi dan berkelanjutan di tingkat regional. Melalui berbagai program dan mekanisme koordinasi yang dibentuk, ASEAN diharapkan mampu menciptakan sinergi kebijakan dan meningkatkan kualitas pembinaan atlet secara kolektif.

Harapan tersebut menempatkan kerja sama olahraga sebagai salah satu sarana strategis dalam meningkatkan posisi kompetitif kawasan di tingkat internasional. Namun, capaian empiris menunjukkan bahwa prestasi atlet negara-negara ASEAN masih tertinggal dibandingkan kawasan lain, khususnya Asia Timur. Di satu sisi, keberadaan institusi dan forum kerja sama tersebut seharusnya mampu mendorong peningkatan daya saing olahraga kawasan secara kolektif (Houlihan, 2009).

Data perolehan medali dalam ajang internasional menunjukkan adanya kecenderungan stagnasi bahkan penurunan performa atlet ASEAN dalam beberapa periode kompetisi. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kapasitas kelembagaan yang telah dibangun dengan hasil konkret yang dihasilkan dalam peningkatan daya saing olahraga kawasan. Dengan demikian, permasalahan utama tidak hanya terletak pada keterbatasan sumber daya, tetapi juga pada

bagaimana mekanisme kerja sama tersebut diimplementasikan dan dioptimalkan di tingkat kawasan.

Keberadaan mekanisme seperti AMMS, SOMS, dan *ASEAN Work Plan on Sports* mencerminkan upaya pembentukan rezim kerja sama regional yang bertujuan meningkatkan koordinasi kebijakan dan efektivitas kolaborasi antarnegara. Namun, capaian daya saing atlet yang masih terbatas menunjukkan bahwa efektivitas rezim tersebut dalam menghasilkan output yang konkret belum optimal. Dalam perspektif diplomasi olahraga, kondisi ini juga menunjukkan bahwa pemanfaatan olahraga sebagai instrumen interaksi dan penguatan hubungan antarnegara di kawasan masih belum berjalan secara maksimal.

Keterbatasan capaian prestasi olahraga kawasan turut memengaruhi kemampuan ASEAN dalam membangun citra dan pengaruh kolektif di tingkat internasional. Hal ini berkaitan dengan konsep *soft power* yang dikemukakan oleh Joseph Nye, yaitu kemampuan suatu negara atau kawasan untuk meningkatkan daya tarik dan memengaruhi pihak lain melalui instrumen non-koersif seperti budaya, nilai, dan diplomasi. Dalam konteks ini, olahraga dapat berfungsi sebagai bagian dari strategi *public diplomacy* dan *nation branding*.

Oleh karena itu, olahraga dapat dipahami sebagai salah satu instrumen dalam membangun *collective soft power* kawasan melalui peningkatan daya tarik dan legitimasi di mata internasional. Ketidaksesuaian antara kapasitas dan hasil tersebut menunjukkan bahwa kerja sama yang terbangun belum sepenuhnya mampu menghasilkan dampak strategis bagi kawasan. Analisis terhadap implementasi kerja sama olahraga ASEAN menjadi penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, belum ada penelitian sebelumnya yang berfokus pada analisis implementasi AMMS dalam meningkatkan daya saing olahraga kawasan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran AMMS dalam memperkuat kohesi regional, meningkatkan visibilitas kawasan, serta mengurangi potensi fragmentasi kepentingan nasional di tengah meningkatnya kompetisi olahraga global. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menjelaskan bagaimana olahraga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen diplomasi yang bersifat kolektif dan kooperatif dalam kerangka kerja sama ASEAN.

Melalui pendekatan *diplomacy through sports* (diplomasi melalui olahraga), olahraga tidak hanya dipahami sebagai aktivitas kompetitif, tetapi juga sebagai instrumen interaksi antarnegara yang berfungsi untuk membangun kepercayaan, memperkuat hubungan sosial-budaya, serta mendorong pengembangan kerja sama olahraga di ASEAN (Murray, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun diplomasi olahraga telah mulai diadopsi dalam kerangka kerja sama ASEAN melalui berbagai mekanisme seperti ASCC dan AMMS, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan daya saing olahraga internasional.

1.2 Rumusan Masalah

Meskipun olahraga telah diintegrasikan ke dalam kerangka kerja sama sosial-budaya kawasan melalui ASCC serta diformalkan melalui pembentukan AMMS, capaian prestasi olahraga negara-negara ASEAN di tingkat Asia masih menunjukkan kesenjangan dibandingkan kawasan lain seperti Asia Timur. Data perolehan medali pada *Asian Games* 2018 dan 2023 menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN secara kolektif masih berada pada posisi yang relatif rendah dalam hal daya saing atlet.

AMMS dibentuk sebagai forum tingkat menteri yang berfungsi untuk merumuskan kebijakan, memperkuat koordinasi antarnegara anggota, serta mengimplementasikan berbagai program pengembangan olahraga. Melalui berbagai program kerja sama AMMS diharapkan dapat memperkuat ekosistem olahraga regional sekaligus meningkatkan daya saing atlet Asia Tenggara di tingkat internasional. Namun demikian, capaian empiris dalam kompetisi olahraga internasional menunjukkan bahwa peningkatan daya saing atlet ASEAN belum sepenuhnya sejalan dengan intensitas kerja sama olahraga yang dibangun di tingkat kawasan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut: **Bagaimana implementasi kerja sama ASEAN Ministerial Meeting on Sports (AMMS) dalam peningkatan daya saing atlet Asia Tenggara pada periode 2016–2025?**

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan, yakni:

1. Mendeskripsikan kondisi daya saing atlet negara-negara ASEAN di Tingkat global.
2. Mendeskripsikan implementasi kerja sama olahraga melalui *ASEAN Ministerial Meeting on Sports* (AMMS) dalam peningkatan daya saing atlet Asia Tenggara pada periode 2016–2025.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis dan praktis, yakni sebagai berikut:

1. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis dalam memperdalam pemahaman mengenai dinamika kerja sama regional di bidang olahraga di Asia Tenggara, khususnya melalui mekanisme AMMS dalam kerangka kerja sama ASCC. Secara lebih spesifik, penelitian ini diproyeksikan dapat menambah serta memperkaya literatur akademik mengenai pemanfaatan olahraga sebagai instrumen diplomasi non-tradisional dalam hubungan internasional. Dengan menggunakan pendekatan diplomasi olahraga, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana kerja sama olahraga regional diimplementasikan melalui kebijakan, program, dan agenda kerja sama kawasan untuk mendorong pengembangan kapasitas atlet serta meningkatkan daya saing olahraga negara-negara ASEAN di tingkat internasional.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pembuat kebijakan, lembaga olahraga, serta pemangku kepentingan terkait dalam memahami implementasi kerja sama olahraga kawasan melalui AMMS dalam mendukung peningkatan daya saing atlet di Asia Tenggara. Informasi yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai berbagai program

kerja sama olahraga kawasan, seperti pengembangan kapasitas atlet dan pelatihan, pertukaran pengetahuan olahraga, serta penguatan tata kelola olahraga regional yang tercantum dalam agenda kerja sama olahraga ASEAN. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan praktis mengenai potensi pemanfaatan kerja sama olahraga regional sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pembinaan olahraga serta memperkuat posisi daya saing atlet negara-negara ASEAN dalam kompetisi olahraga internasional.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama oleh Shinzo Hayase tahun 2020 melalui artikel “*Sports and Nationalism in Southeast Asia: SEAP Games/SEA Games, 1959–2019*” membahas peran *SEAP Games* dan *SEA Games* dalam membangun nasionalisme dan hubungan antarnegara Asia Tenggara (Hayase, 2020). Penelitian ini fokus pada olahraga sebagai sarana interaksi informal dan kerja sama Kawasan. Penulis menggunakan konsep *ASEAN Way*, yang menekankan hubungan kekeluargaan, konsensus, dan non-intervensi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif historis dengan analisis dokumen dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *SEA Games* berperan penting dalam mempererat hubungan negara-negara Asia Tenggara dan menyalurkan nasionalisme secara damai, meskipun dampaknya terhadap peningkatan prestasi olahraga global masih terbatas.

Penelitian kedua oleh Jonathan Grix dan Paul Michael Brannagan, *Sports Mega-Events as Foreign Policy: Sport Diplomacy, Soft Power, and Sportswashing* (Grix & Brannagan, 2024). Berangkat dari kerangka konseptual diplomasi olahraga, penelitian ini berfokus pada penggunaan *mega-event* olahraga sebagai instrumen kebijakan luar negeri negara. Grix dan Brannagan menggunakan teori *soft power* dan konsep *sportswashing* untuk menjelaskan motivasi serta strategi negara dalam memanfaatkan ajang olahraga besar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-komparatif melalui studi kasus beberapa negara dengan latar politik dan sistem pemerintahan berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *mega-event* olahraga dapat menjadi sarana peningkatan citra dan legitimasi internasional, namun juga mengandung risiko reputasional ketika praktik domestik negara bertentangan dengan nilai-nilai global.

Penelitian ketiga: Simon Creak dan Friederike Trotier, *Sport Diplomacy and Regionalism in Southeast Asia: The Southeast Asian SEA Games and ASEAN* (Creak & Trotier, 2024). Melanjutkan pembahasan diplomasi olahraga pada level negara, penelitian ini menggeser fokus ke tingkat kawasan, khususnya Asia Tenggara. Fokus penelitian diarahkan pada peran SEA Games sebagai arena diplomasi kawasan dan pembentukan identitas kawasan dalam kaitannya dengan ASEAN. Kerangka teori yang digunakan mencakup *sport diplomacy*, *regionalism*, serta relasi antara aktor negara dan non-negara dalam olahraga. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-historis, dengan analisis dokumen institusional, arsip sejarah, dan studi kasus penyelenggaraan SEA Games. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEA Games berfungsi sebagai ruang representasi dan komunikasi regional yang efektif, bahkan dalam beberapa aspek mendahului integrasi politik ASEAN. Namun, nasionalisme dan kepentingan negara tetap menjadi batasan dalam diplomasi olahraga regional.

Penelitian keempat: Friederike Trotier, *Indonesia's Position in Asia: Increasing Soft Power and Connectivity through the 2018 Asian Games* (Trotier, 2021a). Dalam konteks yang lebih spesifik, penelitian ini memfokuskan perhatian pada Indonesia sebagai aktor negara yang memanfaatkan *mega-event* olahraga untuk memperkuat posisinya di Asia. Fokus penelitian adalah bagaimana Asian Games 2018 digunakan untuk membangun *soft power* dan meningkatkan konektivitas intra-Asia. Kerangka teori yang digunakan mengacu pada *soft power* dan diplomasi representasional melalui olahraga. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif, dengan analisis kebijakan, narasi politik, simbolisme acara, dan pemberitaan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Asian Games berhasil meningkatkan citra domestik Indonesia, tetapi efektivitasnya sebagai alat diplomasi eksternal terbatas karena dominasi agenda politik domestik dan kurangnya orientasi kebijakan luar negeri yang konsisten (Trotier, 2021a).

Penelitian kelima oleh Ronnasorn Kheokao berjudul *Sport diplomacy: Case Study "Role of Sports in ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)"* yang membahas peran olahraga sebagai alat diplomasi dalam mendukung pembentukan ASCC (Kheokao, 2017a). Penelitian ini menggunakan konsep *sport diplomacy* dan *soft power*, yang memandang olahraga sebagai sarana interaksi non-formal untuk

membangun kepercayaan, solidaritas, dan identitas bersama di Asia Tenggara. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui studi dokumenter, dengan menganalisis dokumen ASEAN, literatur akademik, dan studi kasus kegiatan olahraga di ASEAN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa olahraga memiliki potensi besar untuk memperkuat hubungan sosial dan budaya antar masyarakat ASEAN, namun pemanfaatannya masih belum optimal karena kurangnya koordinasi kebijakan dan fokus ASEAN yang masih lebih dominan pada sektor ekonomi dibandingkan sosial-budaya.

Tabel 2. 1 Komparasi Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis, Judul, Tahun Terbit	Fokus Penelitian	Teori / Konsep	Metode	Hasil
1	Shinzo Hayase, <i>Sports and Nationalism in Southeast Asia: SEAP Games/SEA Games, 1959–2019</i> (2020)	Peran SEAP Games dan SEA Games dalam membangun nasionalisme dan hubungan antarnegara Asia Tenggara	<i>ASEAN Way</i> (kekeluargaan, konsensus, non-intervensi)	Kualitatif	SEA Games mempererat hubungan antarnegara dan menyalurkan nasionalisme, namun kontribusinya terhadap prestasi olahraga global masih terbatas
2	Jonathan Grix & Paul Michael Brannagan, <i>Sports Mega-Events as Foreign Policy: Sport Diplomacy, Soft Power, and Sportswashing</i> (2024)	Pemanfaatan mega-event olahraga sebagai instrumen kebijakan luar negeri negara	<i>Sport diplomacy, soft power, sportswashing</i>	Kualitatif	Mega-event olahraga dapat meningkatkan citra dan legitimasi internasional, tetapi berisiko jika kondisi domestik bertentangan dengan nilai global
3	Simon Creak & Friederike Trotter, <i>Sport Diplomacy and Regionalism in</i>	Peran SEA Games sebagai arena diplomasi regional dan	<i>Sport diplomacy, regionalism, peran aktor</i>	Kualitatif	SEA Games menjadi ruang diplomasi regional yang efektif dan

	<i>Southeast Asia: The Southeast Asian SEA Games and ASEAN (2024)</i>	pembentukan identitas ASEAN	negara dan non-negara		mendukung integrasi kawasan, meskipun kepentingan nasional tetap membatasi
4	Friederike Trotier, <i>Indonesia's Position in Asia: Increasing Soft Power and Connectivity through the 2018 Asian Games (2021)</i>	Pemanfaatan <i>Asian Games</i> 2018 oleh Indonesia untuk meningkatkan soft power dan konektivitas Asia	<i>Soft power</i> , diplomasi representasional melalui olahraga	Kualitatif	<i>Asian Games</i> 2018 meningkatkan citra domestik Indonesia, namun dampak diplomasi eksternalnya terbatas karena dominasi agenda politik domestik
5	Ronnasorn Kheokao, <i>Sport diplomacy: Case Study "Role of Sports in ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)" (2017)</i>	Peran olahraga dalam mendukung pembentukan <i>ASEAN Socio-Cultural Community</i>	<i>Sport diplomacy, soft power</i>	Kualitatif	Olahraga berpotensi memperkuat solidaritas sosial dan identitas ASEAN, tetapi belum optimal akibat lemahnya koordinasi kebijakan dan fokus ekonomi ASEAN

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

Kelima penelitian tersebut secara umum menyoroti peran olahraga sebagai instrumen interaksi, diplomasi, dan kerja sama regional, khususnya dalam konteks Asia Tenggara dan ASEAN. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya menyoroti diplomasi olahraga dari perspektif simbolik, nasionalisme, atau pemanfaatan *mega-event* olahraga, penelitian ini memfokuskan perhatian pada implementasi kerja sama olahraga melalui AMMS dalam peningkatan daya saing atlet Asia Tenggara pada periode 2016–2025. Penelitian-penelitian terdahulu seperti Hayase (2020) dan Creak & Trotier (2024) lebih

menekankan *SEA Games* sebagai arena interaksi sosial dan pembentukan identitas kawasan, sementara Grix & Brannagan (2024) serta Trotier (2021) melihat diplomasi olahraga dalam konteks strategi *soft power* berbasis ajang olahraga.

Literatur tersebut masih menunjukkan keterbatasan dalam menjelaskan bagaimana kerja sama olahraga ASEAN diimplementasikan melalui mekanisme kelembagaan formal serta bagaimana dampaknya terhadap peningkatan daya saing atlet di tingkat kawasan. baik melalui ajang internasional maupun interaksi sosial antarnegara. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada dimensi simbolik dan berbasis peristiwa dalam diplomasi olahraga. Pendekatan tersebut cenderung menempatkan olahraga sebagai alat representasi dan komunikasi, tanpa melihat secara mendalam bagaimana kebijakan dan mekanisme kelembagaan bekerja dalam mendukung tujuan tersebut. Akibatnya, hubungan antara kerja sama formal dan capaian konkret dalam peningkatan daya saing olahraga kawasan belum banyak dikaji. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih menekankan pada aspek kelembagaan dalam memahami peran olahraga dalam kerja sama regional.

Meskipun kerangka kerja sama olahraga ASEAN telah berkembang melalui berbagai mekanisme formal seperti AMMS dan *ASEAN Work Plan on Sports*, belum banyak penelitian yang secara spesifik membedah implementasi kebijakan tersebut dalam kaitannya dengan peningkatan daya saing atlet kawasan. Penelitian sebelumnya lebih banyak menempatkan diplomasi olahraga dalam konteks berbasis ajang olahraga seperti *SEA Games* dan *Asian Games*, sehingga belum mengkaji secara mendalam peran forum kelembagaan dalam membentuk hasil yang lebih berkelanjutan. Dalam konteks ini, penelitian ini menggeser fokus analisis dari *event-based diplomacy* menuju *institution-based diplomacy*, dengan menempatkan AMMS sebagai mekanisme utama kerja sama olahraga di tingkat regional.

Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih sistematis terhadap bagaimana kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, dan diterjemahkan ke dalam praktik kerja sama antarnegara. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menghubungkan antara proses kelembagaan dengan hasil yang dihasilkan, khususnya dalam peningkatan daya saing atlet Asia Tenggara. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat olahraga sebagai instrumen simbolik, tetapi juga sebagai bagian dari tata kelola kebijakan regional yang memiliki implikasi konkret.

Fokus pada AMMS dan Work Plan on Sports memberikan kontribusi baru dalam memahami efektivitas kerja sama olahraga ASEAN dari perspektif kelembagaan. Hal ini sekaligus memperkuat posisi penelitian dalam kajian Hubungan Internasional yang menekankan pentingnya peran institusi dalam membentuk perilaku dan hasil kerja sama antarnegara.

2.2 Kerangka Analisis

Penelitian ini menggunakan dua kerangka teoritis yang memiliki fungsi analisis yang berbeda namun saling melengkapi. teori diplomasi olahraga untuk menganalisis implementasi kerja sama olahraga melalui AMMS dalam peningkatan daya saing atlet Asia Tenggara. Diplomasi olahraga dipilih karena mampu menjelaskan bagaimana olahraga dimanfaatkan sebagai instrumen diplomasi non-tradisional dalam hubungan internasional, khususnya dalam konteks kerja sama multilateral kawasan. Sementara itu, kerangka *elite sports development framework* digunakan untuk menganalisis kebijakan dan pengembangan olahraga yang mendasari capaian daya saing atlet. Kerangka ini menekankan pada proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan olahraga, serta peran institusi dalam mendukung pembinaan atlet secara sistematis.

2.2.1 Teori Diplomasi Olahraga

Teori diplomasi olahraga (*Sport diplomacy*) menurut Murray berangkat dari kritik terhadap keterbatasan diplomasi tradisional yang cenderung elitis, formal, dan berfokus pada interaksi antarnegara melalui saluran resmi. Dalam konteks global yang semakin terdiferensiasi, diplomasi mengalami perluasan aktor, isu, dan instrumen, termasuk olahraga sebagai bagian dari praktik *public diplomacy*. Murray mendefinisikan diplomasi olahraga sebagai penggunaan aktivitas, simbol, dan institusi olahraga oleh negara untuk mendukung tujuan kebijakan luar negeri melalui interaksi damai dan representatif (Murray, 2012). Diplomasi olahraga sendiri dipahami sebagai bentuk diplomasi yang memanfaatkan olahraga dan

berbagai cabangnya sebagai alat untuk membangun dan memperkuat hubungan penting antara negara-negara, baik secara internasional maupun global, di mana batas-batas negara tidak lagi menjadi penghalang (Özsari, 2018).

Murray menempatkan diplomasi olahraga sebagai bentuk diplomasi hybrid yang berkembang seiring dengan transformasi diplomasi modern menuju pola yang lebih plural, terbuka, dan melibatkan berbagai aktor (Murray, 2012). Dalam kerangka ini, olahraga menjadi instrumen yang mampu menjangkau publik lintas negara secara luas dan menciptakan ruang dialog yang relatif bebas dari ketegangan politik formal. Berdasarkan perkembangan literatur diplomasi olahraga dan pemikiran Murray mengenai olahraga sebagai instrumen diplomasi, olahraga dapat dipahami melalui dua perspektif utama.

Diplomacy through sports dan *sport as diplomacy*. Pendekatan *diplomacy through sports* melihat olahraga sebagai sarana atau instrumen untuk mencapai tujuan diplomasi yang lebih luas, seperti pembangunan kepercayaan, peningkatan kerja sama, dan penguatan hubungan sosial-budaya. Sementara itu Pendekatan *sport as diplomacy* memandang olahraga itu sendiri sebagai arena diplomasi, di mana pertandingan, ajang olahraga, dan interaksi atlet berfungsi sebagai representasi hubungan antarnegara (Murray, 2012). Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Murray yang menempatkan olahraga sebagai bagian dari praktik diplomasi kontemporer dan instrumen pembangunan hubungan internasional (Murray, 2012).

Dalam penelitian ini, fokus diarahkan pada pendekatan *diplomacy through sports* karena lebih relevan untuk mendeskripsikan implementasi kerja sama olahraga melalui AMMS dalam peningkatan daya saing atlet Asia Tenggara. AMMS tidak berorientasi pada kompetisi olahraga semata, melainkan pada perumusan kebijakan, pertukaran pengetahuan, serta penguatan kerja sama olahraga kawasan sebagai bagian dari agenda ASCC.

2.2.1.1 Pendekatan *Diplomacy through sports*

Pendekatan *diplomacy through sports* menempatkan olahraga sebagai instrumen diplomasi non-tradisional yang digunakan secara strategis untuk

membangun hubungan internasional yang kooperatif. Menurut Murray, pendekatan ini menekankan bahwa olahraga tidak dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen yang memfasilitasi komunikasi, interaksi sosial, dan pembentukan persepsi positif antarnegara (Murray, 2012). Dalam kerangka ini, negara memanfaatkan program olahraga, pertukaran atlet dan pelatih, forum kebijakan, serta kerja sama kelembagaan untuk mencapai tujuan diplomatik yang lebih luas.

Pendekatan ini relevan dalam konteks kerja sama multilateral seperti ASEAN, di mana sensitivitas politik dan prinsip non-intervensi sering kali membatasi ruang diplomasi formal. Melalui olahraga, negara-negara ASEAN dapat membangun kepercayaan dan solidaritas kawasan tanpa harus terjebak pada isu-isu politik yang sensitif. *Diplomacy through sports* memungkinkan terciptanya ruang dialog yang lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan bersama, seperti pembangunan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan penguatan identitas kawasan.

AMMS, mencerminkan pendekatan *diplomacy through sports* melalui upaya kolektif negara-negara anggota dalam merumuskan kebijakan olahraga kawasan, mengembangkan program pelatihan bersama, serta mendorong pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik di bidang olahraga. Pendekatan ini juga memiliki dimensi kolektif dan kooperatif, di mana olahraga digunakan untuk memperkuat kohesi sosial dan mencegah fragmentasi kepentingan antarnegara anggota. Melalui kerja sama olahraga yang berkelanjutan, potensi ketegangan dapat diminimalkan, sementara rasa saling percaya dan keterikatan kawasan dapat diperkuat.

Dalam penelitian ini, konsep *diplomacy through sports* digunakan untuk memahami bagaimana olahraga dimanfaatkan sebagai instrumen kerja sama regional melalui AMMS. Untuk mengoperasionalkan konsep tersebut dalam konteks ASEAN, penelitian ini menggunakan tiga dimensi analisis, yaitu pengembangan program kerja sama olahraga, koordinasi kelembagaan, dan hasil daya saing olahraga.

Dimensi pengembangan program kerja sama olahraga melihat sejauh mana terjadi peningkatan dan diversifikasi program dalam kerangka kerja sama ASEAN,

yang mencakup berbagai inisiatif seperti pertukaran atlet dan pelatih (*exchange programs*), penguatan kapasitas (*capacity building*), pengembangan olahraga perempuan (*women in sport*), serta olahraga disabilitas yang menu jukan semakin berkembang dan beragam program yang dijalankan, maka semakin menunjukkan intensivitas praktik diplomasi melalui olahraga di tingkat kawasan.

Dimensi koordinasi kelembagaan menilai intensitas dan kualitas interaksi antar mekanisme dalam struktur kerja sama olahraga ASEAN, khususnya antara AMMS, SOMS, dan kerangka ASCC, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dirumuskan di tingkat regional dapat diimplementasikan secara efektif melalui koordinasi yang terstruktur dan berkelanjutan.

Adapun dimensi hasil daya saing olahraga digunakan untuk mengukur dampak dari kerja sama tersebut terhadap performa atlet di tingkat internasional, dengan indikator yang meliputi perolehan medali dalam ajang seperti *Asian Games*, peningkatan partisipasi cabang olahraga, serta persebaran prestasi antarnegara ASEAN yang mana hal ini menjadi krusial karena menunjukkan apakah *diplomacy through sports* tidak hanya berhenti pada level interaksi dan kerja sama, tetapi juga menghasilkan peningkatan kapasitas kompetitif kawasan.

Untuk memastikan keterkaitan antara kerangka teoritis dan analisis penelitian, ketiga dimensi ini selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan struktur analisis pada Bab Hasil dan Pembahasan, sehingga memungkinkan penelitian untuk menghubungkan secara sistematis antara proses diplomasi olahraga dan hasil yang dihasilkan dalam bentuk peningkatan daya saing atlet ASEAN.

2.2.1.2 Pendekatan *Sport as diplomacy*

Pendekatan *sport as diplomacy* memandang olahraga sebagai diplomasi itu sendiri. Dalam perspektif ini, aktivitas olahraga tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan diplomatik yang lebih luas, tetapi juga menjadi arena tempat berlangsungnya praktik diplomasi secara langsung. Murray menjelaskan bahwa olahraga memiliki kemampuan untuk mempertemukan individu, organisasi, maupun negara yang sebelumnya memiliki keterbatasan

komunikasi atau hubungan yang kurang harmonis. Melalui interaksi yang tercipta dalam pertandingan, kompetisi, maupun penyelenggaraan ajang olahraga internasional, olahraga dapat menghasilkan hubungan sosial dan politik yang sering kali sulit dicapai melalui saluran diplomasi konvensional.

Pendekatan *sport as diplomacy* umumnya tercermin dalam penyelenggaraan kompetisi olahraga internasional seperti Olimpiade, FIFA World Cup, *Asian Games*, maupun *SEA Games*. Dalam berbagai ajang tersebut, olahraga tidak hanya berfungsi sebagai kompetisi untuk menentukan prestasi atlet, tetapi juga menjadi sarana representasi identitas nasional, pembentukan citra negara, dan penguatan hubungan antar masyarakat. Interaksi yang terjadi selama penyelenggaraan kompetisi tersebut menunjukkan bahwa olahraga dapat berfungsi sebagai arena diplomasi yang menghasilkan dampak politik dan sosial di luar aspek olahraga itu sendiri.

Diplomasi tidak hanya terjadi melalui negosiasi formal antar pemerintah, tetapi juga melalui aktivitas olahraga yang melibatkan berbagai aktor dalam lingkungan internasional (Murray, 2018). Olahraga secara luas dimanfaatkan sebagai instrumen diplomasi sehingga berkembang istilah menjadi diplomasi olahraga (Anholt, 2011). Pada tahap awal perkembangannya, diplomasi olahraga dipahami sebagai bagian dari diplomasi publik yang menjadi basis konseptualnya. Hal ini disebabkan oleh kapasitas olahraga dalam membuka peluang bagi pelaksanaan diplomasi publik serta menciptakan jalur dialog dengan negara lain (Özsari, 2018).

Selain itu, olahraga menghadirkan arena global yang mampu menarik perhatian terhadap informasi, reputasi, dan relasi antarnegara yang merupakan elemen esensial dalam diplomasi olahraga (Özsari, 2018). Ketertarikan masyarakat internasional terhadap olahraga juga menjadi sarana strategis bagi suatu negara dalam membangun dan mengonstruksi identitasnya pada tataran global. Olahraga juga digunakan sebagai instrumen diplomasi untuk meredakan ketegangan antarnegara (Grix & Brannagan, 2016).

2.2.2 *Elite Sports Development Framework*

Dalam kajian kebijakan olahraga, *Elite Sports Development Framework* (Kerangka kerja pengembangan olahraga elit) merupakan kerangka analisis yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana negara menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan pembangunan olahraga secara terstruktur. Menurut Barrie Houlihan dalam studi *Sport and policy*, pembangunan olahraga tidak hanya menitikberatkan pada peningkatan prestasi atlet, tetapi juga mencakup partisipasi masyarakat, penguatan kelembagaan olahraga, serta kontribusi terhadap tujuan sosial dan ekonomi (Houlihan, 2009). Kerangka ini menempatkan kebijakan olahraga sebagai bagian dari kebijakan publik yang memiliki banyak dimensi. Pemerintah dalam konteks ini berperan sebagai pengatur kebijakan, penyedia sumber daya, sekaligus pelaksana strategi pembangunan olahraga.

Pemerintah juga bisa memanfaatkan olahraga sebagai sarana untuk mencapai tujuan di luar sektor olahraga, seperti peningkatan kesehatan masyarakat dan integrasi sosial (Green dkk., 2011). Selain itu, pemerintah menggunakan olahraga untuk mendukung pembangunan ekonomi melalui berbagai program dan kebijakan. Kerangka ini menunjukkan bahwa olahraga memiliki posisi yang terhubung dengan agenda pembangunan nasional secara menyeluruh. Dengan demikian, kebijakan olahraga tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari sistem kebijakan yang lebih luas. Pendekatan ini membantu menjelaskan hubungan antara olahraga dan berbagai sektor pembangunan lainnya.

Secara konseptual, *elite sports development framework* terdiri atas beberapa dimensi utama yang saling berkaitan. Dimensi pertama adalah *elite sport system* yang berfokus pada peningkatan kualitas atlet, pelatih, fasilitas, dan dukungan ilmu pengetahuan olahraga. Dimensi kedua adalah *mass participation*, yang berkaitan dengan kegiatan olahraga untuk mendorong gaya hidup sehat. Dimensi ketiga adalah *capacity building* kelembagaan organisasi olahraga melalui perbaikan tata kelola dan manajemen. Dimensi keempat adalah *integrity and regulation* yang mencakup penerapan aturan, pengawasan, dan kebijakan seperti *anti-doping* (Houlihan & Green, 2008).

Keempat dimensi tersebut membentuk dasar dalam perumusan kebijakan olahraga yang komprehensif. Selain itu, kebijakan olahraga modern menunjukkan kecenderungan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan kebijakan lain. Pemerintah menggunakan olahraga untuk mendukung pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan penguatan kohesi sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya perluasan fungsi olahraga dalam kebijakan publik.

Perkembangan kebijakan olahraga juga dipengaruhi oleh proses globalisasi dan pertukaran kebijakan antarnegara. Banyak negara mengadopsi pola kebijakan yang serupa, terutama dalam pengembangan olahraga prestasi melalui investasi dan sistem pembinaan atlet. Meskipun demikian, setiap negara tetap menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kondisi domestik masing-masing. Dengan demikian, kerangka ini memberikan dasar analisis untuk memahami peran kebijakan olahraga dalam mendukung kepentingan nasional, termasuk dalam diplomasi dan daya saing di tingkat regional maupun global.

Houlihan dan Green (2008) menjelaskan bahwa *elite sports development framework* merupakan suatu kerangka yang dirancang secara sistematis dan strategis untuk menghasilkan atlet berprestasi melalui integrasi berbagai komponen yang saling terkait. Sistem tersebut mencakup proses pembinaan yang terorganisasi dan konsisten, sehingga memungkinkan terciptanya performa olahraga yang kompetitif di tingkat internasional. Dalam perspektif ini, keberhasilan atlet tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi merupakan hasil dari efektivitas sistem yang mendukung proses pembinaan secara menyeluruh.

2.3 Kerangka Pemikiran

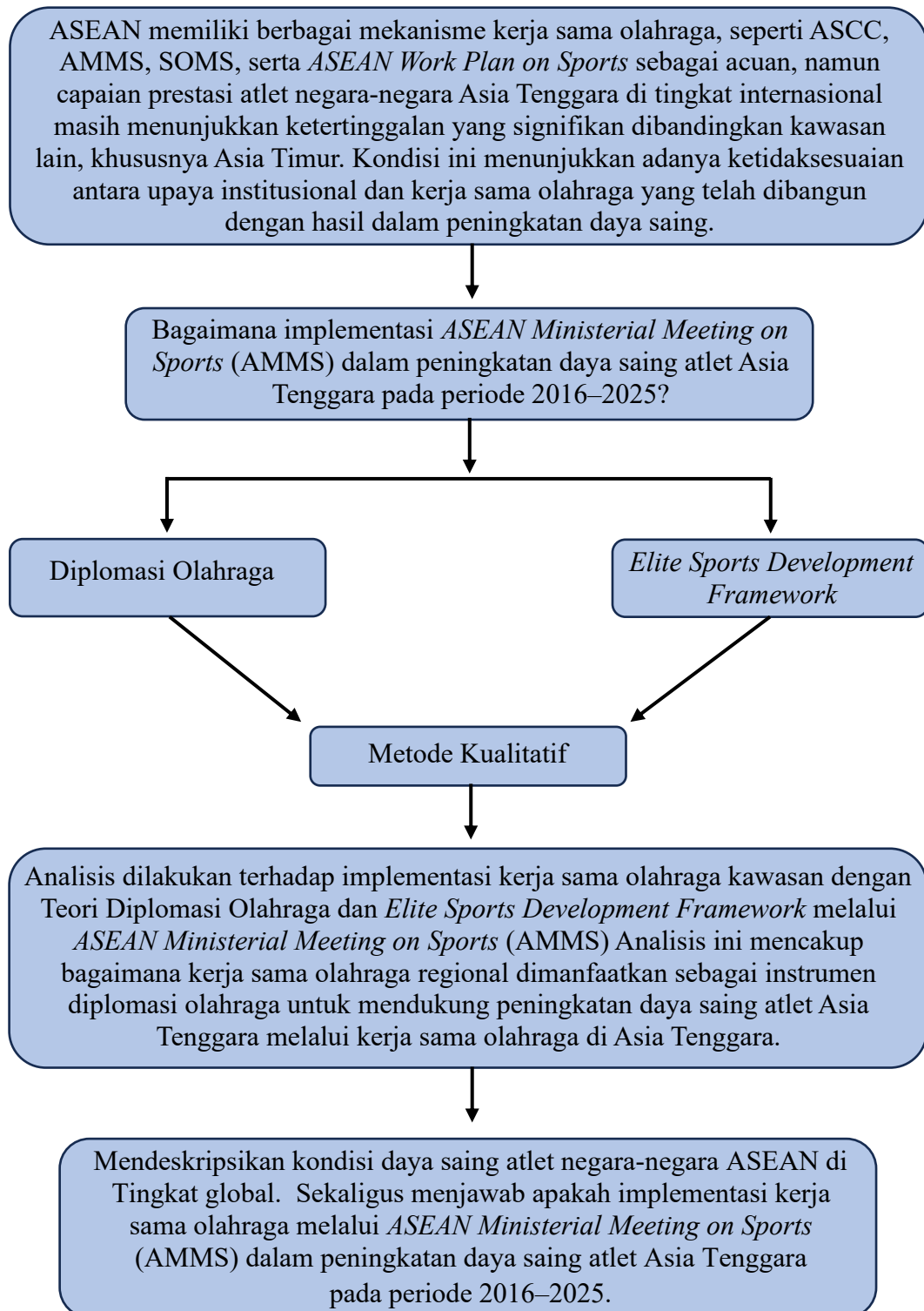
Dinamika pengembangan olahraga di Asia Tenggara menunjukkan adanya tantangan struktural berupa rendahnya daya saing atlet ASEAN di tingkat global serta kesenjangan antara tujuan normatif ASCC dan capaian empiris olahraga kawasan. Penelitian ini menggunakan teori diplomasi olahraga dengan pendekatan *diplomacy through sports* yang dikemukakan oleh Stuart Murray untuk menganalisis dinamika kerja sama olahraga sebagai instrumen interaksi dan penguatan hubungan antarnegara di Kawasan dan Pendekatan *sport as diplomacy*

memandang olahraga sebagai diplomasi itu sendiri. Dalam perspektif ini, aktivitas olahraga tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan diplomatik yang lebih luas, tetapi juga menjadi arena tempat berlangsungnya praktik diplomasi secara langsung.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan kerangka *elite sports development framework* yang digunakan untuk menganalisis dimensi *elite sport system*, *mass participation*, *capacity building*, dan *integrity and regulation*. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini mengaitkan dinamika pengembangan olahraga ASEAN dengan implementasi kerja sama olahraga melalui forum AMMS, khususnya dalam konteks kontribusi kebijakan, program kerja sama, dan peningkatan kapasitas atlet kawasan. Dengan demikian, kerangka ini digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana diplomasi olahraga dan juga *elite sports development framework* diimplementasikan melalui kerja sama olahraga ASEAN sebagai instrumen yang kolektif dan kooperatif dalam mendukung peningkatan daya saing atlet ASEAN di tingkat global.

Kerangka pemikiran ini dioperasionalkan menggunakan teori diplomasi olahraga dengan pendekatan *diplomacy through sports* dan pendekatan *sport as diplomacy* yang dikemukakan oleh Stuart Murray. Untuk menganalisis dinamika pendekatan *diplomacy through sports* yang dioperasionalisasikan ke dalam tiga dimensi analisis, yaitu pengembangan program, koordinasi kelembagaan, dan hasil daya saing atlet. Dimensi pengembangan program digunakan untuk menganalisis bentuk dan intensitas program kerja sama olahraga ASEAN melalui dokumen *ASEAN Work Plan on Sports*.

Dimensi koordinasi kelembagaan digunakan untuk melihat efektivitas interaksi antar mekanisme kerja sama, khususnya antara AMMS, SOMS, dan kerangka ASCC, yang dianalisis melalui *joint statements* AMMS dan dokumen resmi ASEAN. Sementara itu, dimensi hasil daya saing atlet digunakan untuk mengukur dampak kerja sama terhadap performa atlet melalui data perolehan medali, peringkat, dan konsistensi performa dalam ajang internasional. Adapun pendekatan *sport as diplomacy* digunakan untuk menganalisis bagaimana olahraga berfungsi sebagai arena diplomasi yang merepresentasikan identitas, nilai, dan eksistensi kawasan ASEAN di tingkat internasional.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih untuk memberikan gambaran yang mendalam dan sistematis mengenai implementasi kerja sama olahraga melalui AMMS dalam peningkatan daya saing atlet Asia Tenggara pada periode 2016–2025. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menggali dan memahami makna yang diberikan oleh individu, kelompok, maupun institusi terhadap suatu fenomena sosial dan politik (Creswell & Creswell, 2018). Proses penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan berkembang seiring dengan temuan data di lapangan, dimulai dari perumusan pertanyaan penelitian yang dapat disesuaikan, pengumpulan data, hingga analisis yang dilakukan secara bertahap.

Data yang diperoleh dianalisis dari aspek-aspek khusus untuk kemudian diinterpretasikan ke dalam tema-tema utama yang relevan dengan fokus penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti memberikan makna dan kesimpulan atas dinamika kerja sama olahraga di ASEAN melalui mekanisme AMMS, khususnya dalam upaya peningkatan kapasitas dan daya saing atlet kawasan. Pendekatan kualitatif deskriptif ini memungkinkan penulis untuk mengumpulkan data secara komprehensif melalui berbagai sumber, seperti dokumen resmi ASEAN, dokumen kebijakan olahraga kawasan, laporan kegiatan AMMS, serta data sekunder dari jurnal akademik dan publikasi institusi terkait.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan dinamika kerja sama olahraga di ASEAN dalam kerangka kerja sama regional ASEAN, khususnya melalui mekanisme AMMS. Fokus ini didasarkan pada temuan pada bagian latar belakang penelitian yang menunjukkan bahwa daya saing atlet negara-negara ASEAN di tingkat internasional masih relatif tertinggal dibandingkan kawasan lain, khususnya Asia Timur, sebagaimana terlihat pada perbandingan perolehan medali *Asian Games* tahun 2018 dan 2023. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan daya saing olahraga kawasan yang mendorong negara-negara ASEAN untuk memperkuat kerja sama olahraga melalui mekanisme kebijakan regional.

Penelitian ini menggunakan teori diplomasi olahraga yang dikemukakan oleh Stuart Murray untuk memahami bagaimana olahraga dimanfaatkan sebagai instrumen diplomasi non-tradisional dalam memperkuat hubungan kerja sama antarnegara di kawasan. Dalam kerangka tersebut, olahraga tidak hanya dipandang sebagai aktivitas kompetitif, tetapi juga sebagai sarana membangun hubungan kooperatif, meningkatkan kepercayaan, serta memperluas pertukaran pengetahuan dan kapasitas di bidang olahraga. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi kerja sama olahraga melalui AMMS berkontribusi terhadap pengembangan kapasitas olahraga di Asia Tenggara, khususnya dalam konteks peningkatan kualitas atlet, pelatih, serta program kerja sama olahraga regional yang bertujuan memperkuat daya saing atlet ASEAN di tingkat internasional.

Penelitian ini dibatasi pada periode 2016–2025 karena rentang waktu tersebut merepresentasikan fase penguatan kerja sama olahraga ASEAN melalui berbagai agenda kebijakan dan program dalam AMMS yang mencakup dua siklus kebijakan utama dalam pengembangan olahraga ASEAN, yaitu *ASEAN Work Plan on Sports 2016–2020* dan *ASEAN Work Plan on Sports 2021–2025*. Dokumen *ASEAN Work Plan on Sports 2016–2020* berfokus pada tahap awal penguatan fondasi kerja sama olahraga kawasan, dengan penekanan pada pembentukan kerangka koordinasi, pengembangan program dasar seperti pertukaran atlet dan pelatih, serta peningkatan kesadaran terhadap isu-isu strategis seperti integritas

olahraga dan *capacity building*. Sementara itu, *ASEAN Work Plan on Sports 2021–2025* menunjukkan perkembangan yang lebih lanjut dengan penekanan pada konsolidasi dan penguatan implementasi kebijakan, termasuk peningkatan kualitas program, perluasan kerja sama lintas sektor, serta penguatan tata kelola olahraga yang lebih terintegrasi di tingkat kawasan melalui mekanisme seperti AMMS.

Pemilihan periode 2016–2025 juga didasarkan pada pertimbangan empiris dan kelembagaan, karena rentang waktu tersebut merepresentasikan dua fase utama pengembangan kerja sama olahraga ASEAN melalui *ASEAN Work Plan on Sports 2016–2020* dan *ASEAN Work Plan on Sports 2021–2025*. Kedua dokumen tersebut menunjukkan kesinambungan kebijakan olahraga ASEAN dalam memperkuat koordinasi regional, pengembangan kapasitas olahraga, serta peningkatan kualitas tata kelola olahraga kawasan. Dengan demikian, periode tersebut dipilih karena mampu merepresentasikan perkembangan implementasi kerja sama olahraga ASEAN secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Perbedaan fokus ini menunjukkan adanya pergeseran dari tahap pembentukan dan pengenalan kerja sama menuju tahap penguatan dan optimalisasi kebijakan olahraga kawasan. Dengan mencakup dua fase kebijakan tersebut, penelitian ini dapat menganalisis perkembangan implementasi kerja sama olahraga ASEAN secara lebih komprehensif, baik dari sisi program, koordinasi kelembagaan, maupun hasil yang dihasilkan. Selain itu, kedua dokumen tersebut mencerminkan upaya ASEAN dalam membangun sistem kerja sama olahraga yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kapasitas serta daya saing atlet.

Unit analisis dalam penelitian ini Adalah AMMS sebagai forum kerja sama olahraga regional beserta berbagai output kebijakan yang dihasilkannya, seperti *ASEAN Work Plan on Sports*, *Joint Statement AMMS 1-8*, serta program-program kerja sama olahraga ASEAN. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memfokuskan perhatian pada AMMS sebagai forum kelembagaan, tetapi juga pada implementasi kebijakan dan program yang dijalankan dalam kerangka kerja sama olahraga kawasan.

3.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Data diperoleh dari berbagai referensi, seperti jurnal ilmiah yang membahas diplomasi olahraga, buku teori *sport diplomacy* oleh Stuart Murray, buku teori *sport and policy* oleh Houlihan, laporan resmi dari ASEAN dan AMMS seperti *ASCC Blueprint 2025*, laporan *Mid-Term Review (MTR)*, *ASEAN Work Plan on Sports 2016-2025*, *Kazan action plan*, *Joint statement AMMS 1-8*, serta dokumen kebijakan olahraga. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan artikel berita dari media massa serta situs web resmi yang menyediakan data dan informasi yang valid. Seluruh data yang dikumpulkan kemudian diolah untuk memberikan pemahaman untuk mendeskripsikan dinamika kerja sama olahraga di ASEAN melalui mekanisme AMMS dalam konteks diplomasi olahraga serta kaitannya dengan upaya peningkatan daya saing atlet di tingkat kawasan pada periode 2016–2025.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis dokumen dan studi pustaka. Analisis dokumen digunakan untuk menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku akademik, laporan resmi dari ASEAN dan AMMS seperti *ASCC Blueprint 2025*, laporan *Mid-Term Review*, *ASEAN Work Plan on Sports 2016-2025*, *Kazan action plan*, *Joint statement AMMS 1-8*, serta dokumen kebijakan olahraga, artikel berita, serta situs web resmi dan kredibel yang membahas diplomasi olahraga dan kerja sama olahraga ASEAN. Sementara itu, studi pustaka dilakukan dengan mengkaji literatur yang membahas teori diplomasi olahraga, diplomasi non-tradisional, dan hubungan internasional guna membangun kerangka konseptual penelitian.

Dokumen dipilih apabila mengandung informasi mengenai program atau proyek olahraga regional, struktur dan mekanisme kelembagaan, serta capaian implementasi kebijakan olahraga. Proses analisis data dilakukan melalui teknik

identifikasi dan mengklasifikasikan untuk mengelompokkan informasi sesuai dengan kerangka analisis yang digunakan. Data kemudian dianalisis ke dalam tiga dimensi utama *diplomacy through sports*, yaitu pengembangan program, koordinasi kelembagaan, dan hasil daya saing atlet dan dilanjutkan analisis menggunakan *sport as diplomacy*. Selain itu, data juga dianalisis menggunakan empat dimensi *elite sports development framework*, yaitu *elite sport*, *mass participation*, *capacity building*, dan *integrity and regulation*.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2014). Model ini dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian kualitatif yang menekankan proses analisis secara berkesinambungan sejak tahap pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan (Miles dkk., 2014). Analisis data dilakukan secara interaktif dan terus menerus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dinamika kerja sama olahraga di ASEAN melalui mekanisme AMMS pada periode 2016-2025. Model ini terdiri atas tiga komponen utama, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola hubungan antara kebijakan, implementasi program, dan hasil yang dicapai dalam kerja sama olahraga ASEAN. Dengan pendekatan ini, analisis tidak hanya berfokus pada deskripsi kebijakan, tetapi juga pada keterkaitan antara proses dan hasil yang dihasilkan. Penggunaan kriteria seleksi dan teknik analisis tersebut memungkinkan penelitian untuk menghasilkan analisis yang sistematis, terstruktur, dan berbasis data.

Dalam penelitian ini, hubungan antara implementasi kerja sama olahraga ASEAN melalui AMMS dan peningkatan daya saing atlet Asia Tenggara tidak dianalisis sebagai hubungan sebab-akibat secara langsung. Penelitian ini berfokus pada identifikasi keterkaitan antara kebijakan kerja sama olahraga ASEAN dan pengembangan kapasitas olahraga kawasan. Peningkatan daya saing atlet

dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti investasi olahraga nasional, kualitas pembinaan atlet, dukungan infrastruktur, kapasitas kelembagaan olahraga, dan kebijakan *elite sport System* masing-masing negara. Oleh karena itu, penelitian ini tidak bertujuan membuktikan bahwa program AMMS secara langsung meningkatkan perolehan medali internasional negara-negara ASEAN. Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi AMMS dalam menciptakan ruang koordinasi dan kerja sama olahraga kawasan.

3.5.1 Kondensasi Data

Tahap pertama adalah kondensasi data, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengorganisasian data yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, dokumen resmi ASEAN dan AMMS, dokumen kebijakan olahraga, laporan kegiatan, serta sumber kredibel lainnya diseleksi secara sistematis agar sesuai dengan konteks diplomasi olahraga dan kerja sama olahraga ASEAN. Proses kondensasi data ini dilakukan secara berkelanjutan sepanjang penelitian untuk memastikan bahwa hanya informasi yang relevan dan signifikan yang digunakan dalam tahap analisis selanjutnya.

Dalam proses ini, peneliti melakukan seleksi terhadap dokumen yang memiliki relevansi langsung dengan implementasi kerja sama olahraga ASEAN, yaitu: *ASEAN Work Plan on Sports 2016–2020 dan 2021–2025*, *Joint Statement AMMS*, *ASCC Blueprint 2025*, *Kazan action plan*, laporan *Mid-Term Review*, serta data perolehan medali *Asian Games* dan Olimpiade. Dokumen tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan dimensi analisis penelitian, yaitu pengembangan program, koordinasi kelembagaan, dan hasil daya saing atlet.

3.5.2 Penyajian Data

Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu penyusunan data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau bentuk penyajian lain yang memudahkan pemahaman. Penyajian data secara sistematis membantu peneliti dalam mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta dinamika dinamika kerja sama

olahraga di ASEAN melalui mekanisme AMMS pada periode 2016-2025. Dalam penelitian ini, penyajian data difokuskan pada penggambaran implementasi kerja sama olahraga kawasan, termasuk berbagai kebijakan, program, serta agenda kerja sama olahraga yang dikembangkan melalui forum AMMS dalam upaya mendukung pengembangan kapasitas olahraga dan peningkatan daya saing atlet di tingkat kawasan.

Penyajian data dilakukan melalui uraian naratif, tabel, grafik, dan bagan untuk mempermudah identifikasi pola dan hubungan antar data penelitian. Bentuk penyajian tersebut meliputi tabel perolehan medali *Asian Games* dan Olimpiade, bagan struktur kelembagaan AMMS dan SOMS, serta pemetaan program kerja sama olahraga ASEAN berdasarkan *ASEAN Work Plan on Sports*.

3.5.3 Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses penafsiran makna dari data yang telah disajikan serta pengujian kembali kesimpulan yang diperoleh agar selaras dengan bukti empiris yang tersedia. Proses verifikasi dilakukan secara berkesinambungan selama tahap analisis guna menjaga validitas hasil penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana dinamika kerja sama olahraga di ASEAN melalui mekanisme AMMS.

Dalam tahap ini, peneliti menafsirkan keterkaitan antara implementasi program kerja sama olahraga ASEAN dengan perkembangan daya saing atlet di tingkat internasional berdasarkan hasil analisis data yang telah disajikan. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk melihat sejauh mana program dan kebijakan dalam kerangka AMMS berkontribusi terhadap pengembangan kapasitas olahraga kawasan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

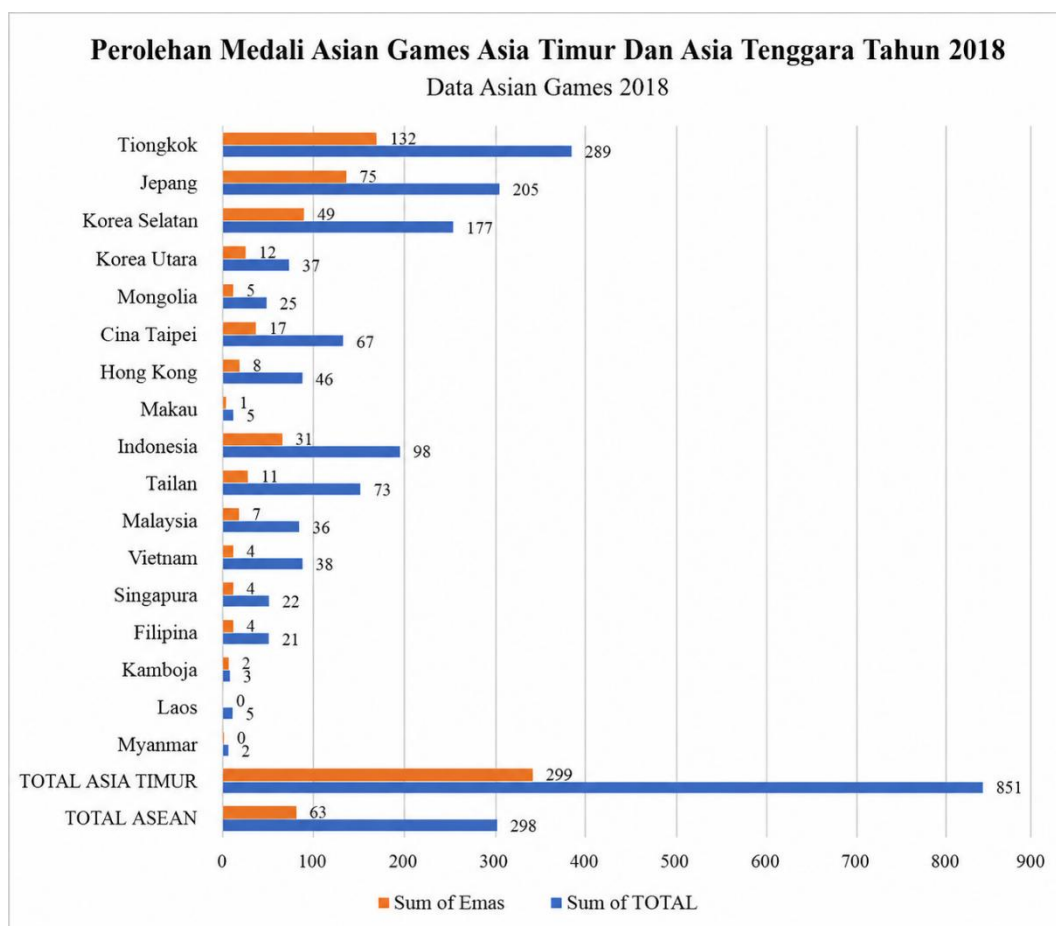
4.1.1 Daya Saing Atlet Asia Tenggara di Tingkat Global

Daya saing atlet dalam olahraga internasional mencerminkan kemampuan suatu negara atau kawasan dalam mencapai prestasi pada kompetisi tingkat regional maupun global. Menurut Houlihan dan Green (2008) menjelaskan bahwa daya saing bersifat *performance-oriented* (Houlihan & Green, 2008), yang diukur melalui capaian medali, peringkat dalam kompetisi internasional, serta konsistensi performa dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, analisis daya saing atlet Asia Tenggara dapat dilakukan melalui pengamatan terhadap capaian empiris dalam berbagai ajang olahraga seperti *Asian Games* dan Olimpiade.

Data dari berbagai ajang olahraga menunjukkan bahwa daya saing atlet Asia Tenggara masih berada dalam kondisi yang bervariasi antarnegara. Beberapa negara seperti Indonesia, Tailan, dan Malaysia menunjukkan capaian yang relatif lebih konsisten dalam perolehan medali dibandingkan negara lain di kawasan (The Olympic Studies Centre, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi daya saing di kawasan belum merata. Selain itu, perbandingan dengan negara-negara di luar kawasan, khususnya Asia Timur, memperlihatkan adanya kesenjangan capaian yang cukup signifikan. Negara-negara seperti Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan secara konsisten berada pada peringkat atas dalam berbagai ajang olahraga internasional. Perbedaan ini menunjukkan bahwa posisi Asia Tenggara dalam kompetisi global masih relatif tertinggal.

4.1.1.1 Kondisi daya Saing Atlet Asia Tenggara

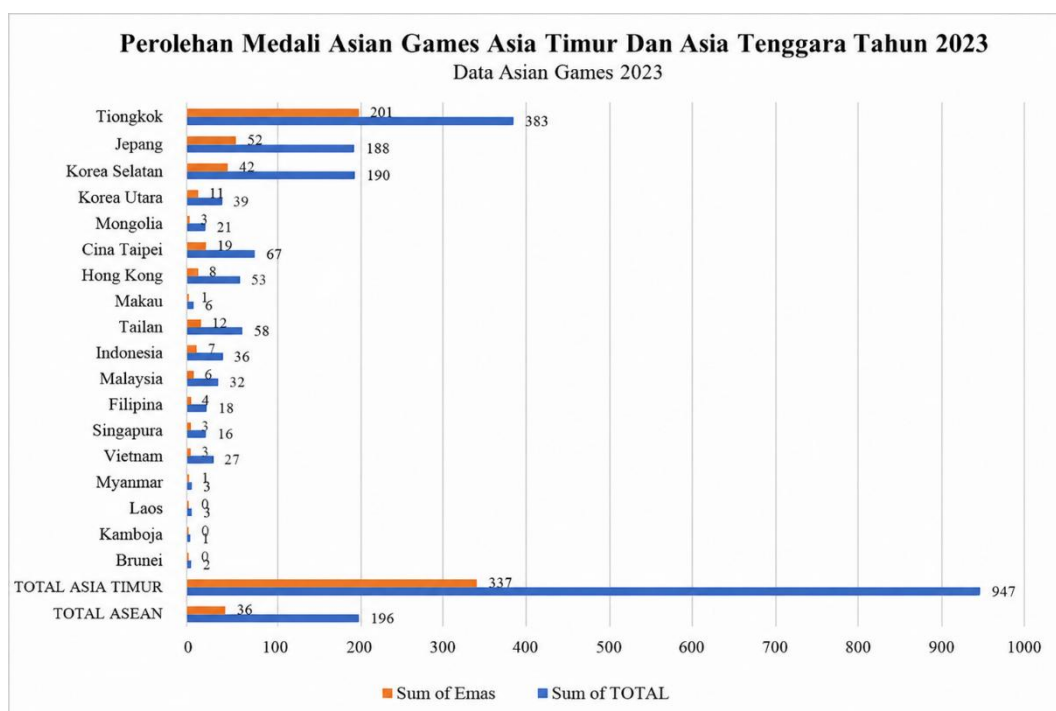
Kondisi daya saing atlet Asia Tenggara dapat dilihat secara jelas melalui capaian prestasi dalam kompetisi olahraga internasional, baik pada tingkat regional Asia maupun global. Gambar 4.1 Peringkat *Asian Games* 2018 dan *Asian Games* 2023 menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN secara kolektif memperoleh 298 medali yang terdiri dari 63 emas, 77 perak, dan 158 perunggu, sedangkan negara-negara Asia Timur memperoleh 851 medali pada periode yang sama. Pada *Asian Games* 2023, perolehan medali negara-negara ASEAN tercatat sebanyak 196 medali yang terdiri dari 36 emas, 47 perak, dan 113 perunggu, sementara negara-negara Asia Timur memperoleh 947



Gambar 4.1 Peringkat *Asian Games* 2018

Sumber: The Olympic Studies Centre, 2026

Penurunan jumlah medali dari 298 pada tahun 2018 menjadi 196 pada tahun 2023 menunjukkan adanya kecenderungan stagnasi bahkan penurunan daya saing secara kolektif di kawasan ASEAN. Perubahan jumlah medali tersebut menunjukkan adanya penurunan capaian secara kolektif di kawasan ASEAN dalam dua periode kompetisi tersebut. Penurunan ini mengindikasikan bahwa daya saing atlet ASEAN belum menunjukkan perkembangan yang konsisten dalam mempertahankan performa pada level internasional.



Gambar 4.2 Peringkat *Asian Games* 2023

Sumber: The Olympic Studies Centre, 2026

Distribusi perolehan medali di kawasan ASEAN juga menunjukkan pola yang tidak merata antarnegara. Negara seperti Indonesia, Tailan, dan Malaysia secara konsisten menjadi penyumbang utama dalam perolehan medali di berbagai ajang olahraga internasional. Sementara itu, sebagian besar negara ASEAN lainnya memiliki kontribusi yang relatif terbatas dalam capaian prestasi. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa daya saing kawasan belum terbentuk secara kolektif dan masih bergantung pada kemampuan negara tertentu. Selain itu, konsentrasi prestasi pada beberapa negara menunjukkan adanya perbedaan kapasitas dalam

menghasilkan atlet berprestasi. Kondisi ini mencerminkan bahwa tidak semua negara memiliki kemampuan yang sama dalam berpartisipasi secara kompetitif.

Data perolehan medali *Asian Games* menunjukkan bahwa total medali negara-negara ASEAN mengalami penurunan dari 298 pada tahun 2018 menjadi 196 pada tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan adanya ketidakstabilan performa atlet di tingkat kawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa daya saing ASEAN belum berkembang secara konsisten, karena keberhasilan ditentukan oleh kemampuan mempertahankan performa dalam kompetisi internasional secara berkelanjutan (Nikolai Böhlke, 2009).

Perbandingan daya saing olahraga antara kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam capaian prestasi pada kompetisi internasional. Data *Asian Games* 2018 dan 2023 menunjukkan bahwa negara-negara Asia Timur secara konsisten memperoleh jumlah medali yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN. Kawasan Asia Timur berhasil mengumpulkan lebih dari 800 medali pada *Asian Games* 2018 dan meningkat menjadi sekitar 947 medali pada *Asian Games* 2023, sementara negara-negara ASEAN hanya memperoleh 298 medali pada tahun 2018 dan menurun menjadi 196 medali pada tahun 2023 (The Olympic Studies Centre, 2026).

Perbedaan jumlah medali tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam kemampuan kawasan untuk bersaing pada level Asia. Selain itu, capaian negara-negara Asia Timur relatif stabil dan cenderung meningkat dalam setiap penyelenggaraan kompetisi. Sebaliknya, capaian negara-negara ASEAN menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan antarperiode kompetisi. Kondisi ini menunjukkan bahwa daya saing kawasan ASEAN belum berkembang secara konsisten dalam jangka panjang. Dalam perspektif kebijakan olahraga, konsistensi performa merupakan indikator utama keberhasilan sistem (Houlihan & Green, 2008). Oleh karena itu, perbedaan capaian tersebut mencerminkan adanya kesenjangan daya saing antar kawasan.

Perbedaan daya saing juga terlihat pada tingkat global melalui capaian dalam ajang Olimpiade. Negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan secara konsisten menempati posisi teratas dalam perolehan medali Olimpiade. Sebaliknya, negara-negara ASEAN umumnya berada pada peringkat

menengah ke bawah dengan jumlah medali yang relatif terbatas. Data Olimpiade Paris 2024 menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN hanya mampu memperoleh medali dalam jumlah kecil dan tidak merata antarnegara. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi kawasan ASEAN dalam kompetisi olahraga global masih terbatas. Selain itu, sebagian besar medali yang diperoleh kawasan berasal dari beberapa negara tertentu, seperti Indonesia, Tailan, dan Filipina.

Capaian yang sudah ditunjukkan negara-negara ASEAN ini menunjukkan bahwa daya saing kawasan belum terbentuk secara kolektif. Veerle De Bosscher menjelaskan bahwa keberhasilan dalam Olimpiade sangat dipengaruhi oleh kemampuan negara dalam mempertahankan performa secara berkelanjutan (De Bosscher dkk., 2006). Dengan demikian, posisi negara-negara ASEAN dalam Olimpiade mencerminkan adanya daya saing pada level global yang belum konsisten.

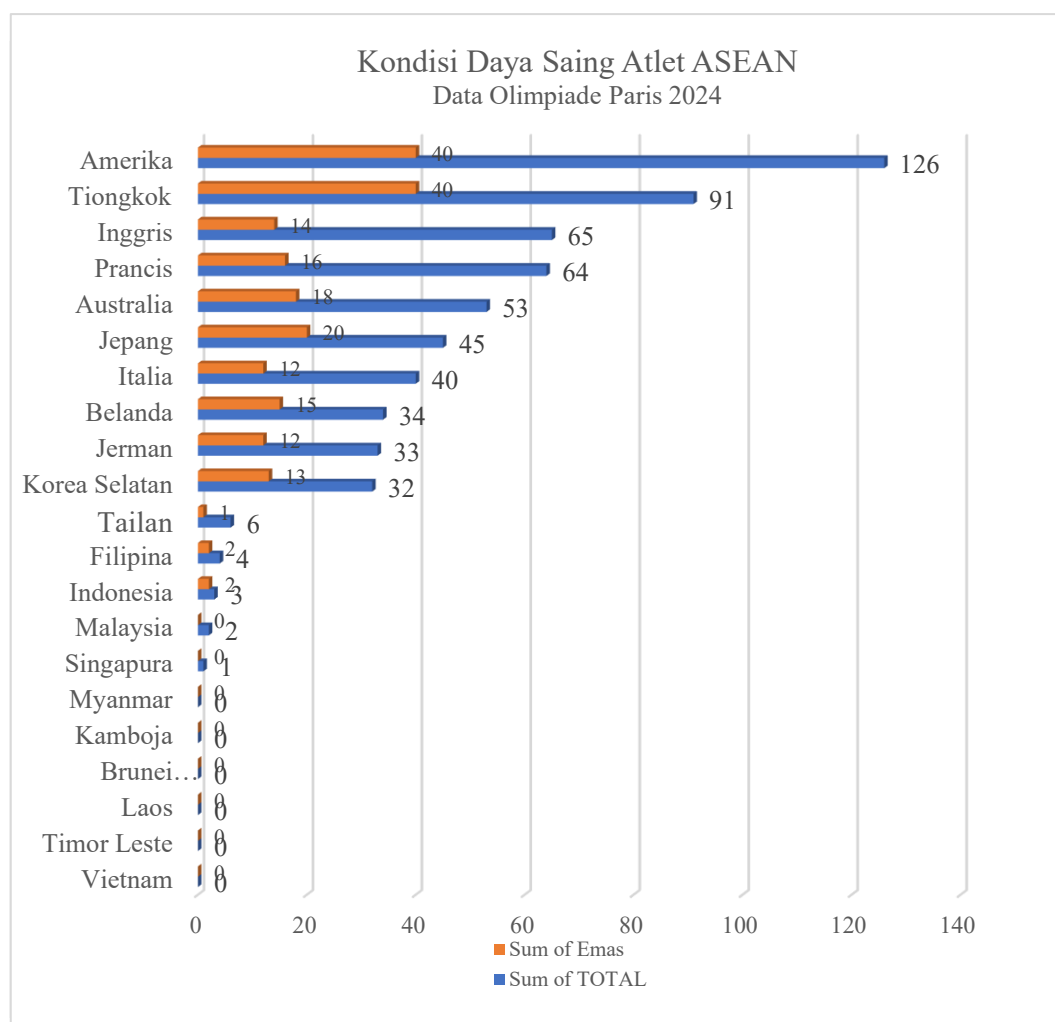
Perbandingan antar kawasan juga menunjukkan adanya perbedaan dalam distribusi kekuatan pada berbagai cabang olahraga. Negara-negara Asia Timur mampu bersaing pada cabang olahraga dengan tingkat kompetisi tinggi seperti atletik, renang, dan senam. Sebaliknya, negara-negara ASEAN cenderung memperoleh medali pada cabang olahraga tertentu yang memiliki tingkat kompetisi lebih rendah atau bersifat regional. Kondisi ini menunjukkan bahwa daya saing kawasan ASEAN masih terbatas pada cabang olahraga tertentu dan belum merata di berbagai disiplin olahraga.

Selain itu, kemampuan negara-negara Asia Timur untuk berkompetisi pada cabang olahraga dengan tingkat persaingan tinggi menunjukkan tingkat daya saing yang lebih luas. Sementara itu, keterbatasan pada cabang olahraga tertentu menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN belum menunjukkan perubahan yang konsisten. Menurut Veerle De Bosscher, tingkat kompetisi cabang olahraga menjadi faktor penting dalam menentukan peluang keberhasilan suatu negara (De Bosscher dkk., 2006). Oleh karena itu, distribusi capaian ini mempertegas adanya kesenjangan daya saing antara kedua kawasan.

Perbedaan daya saing antara Asia Tenggara dan Asia Timur secara keseluruhan menunjukkan adanya ketimpangan dalam posisi kawasan pada kompetisi olahraga internasional. Kawasan Asia Timur memiliki keunggulan dalam

jumlah medali, konsistensi performa, serta kemampuan bersaing pada berbagai cabang olahraga. Sebaliknya, kawasan ASEAN masih menghadapi keterbatasan dalam mempertahankan performa dan memperluas capaian prestasi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa daya saing olahraga di Asia Tenggara belum berkembang secara optimal jika dibandingkan dengan kawasan lain di Asia. Selain itu, ketimpangan capaian antarnegara di dalam kawasan ASEAN juga memperlemah posisi kolektif kawasan dalam kompetisi global (Hoffmann dkk., 2004). Perbedaan ini menunjukkan bahwa daya saing kawasan tidak hanya ditentukan oleh capaian individu negara, tetapi juga oleh kemampuan kawasan dalam membangun performa yang merata.



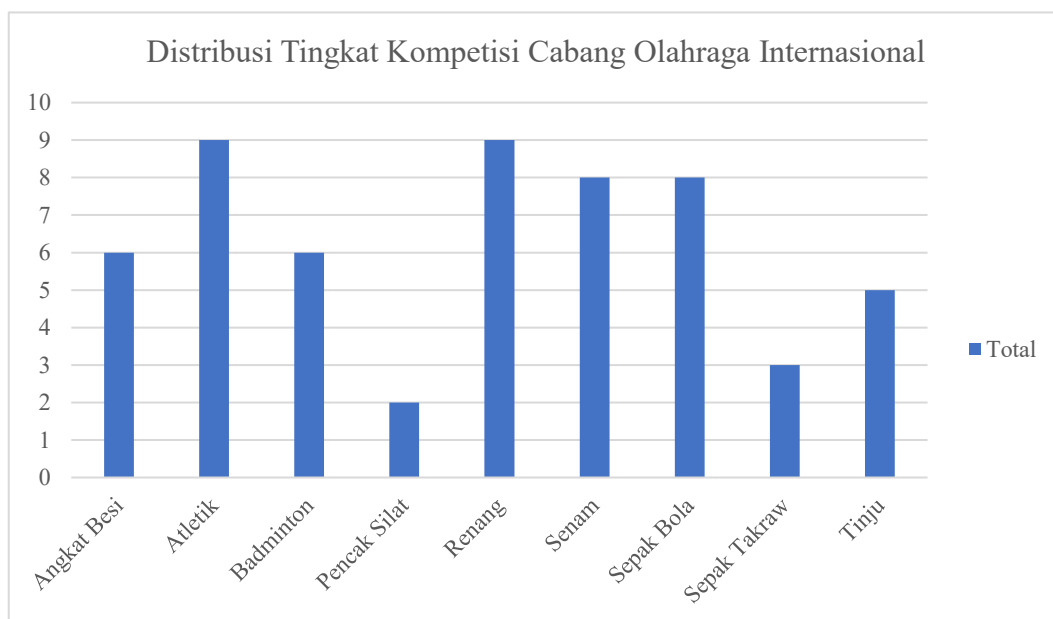
Gambar 4.3 Peringkat Olimpiade Paris 2024

Sumber: The Olympic Studies Centre, 2026

Kondisi daya saing tersebut juga tercermin dalam capaian pada tingkat global melalui ajang Olimpiade. Gambar 4.2 Peringkat Olimpiade Paris 2024 menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN menempati posisi yang relatif lebih rendah dalam peringkat dunia dibandingkan dengan negara lain. Filipina berada pada peringkat ke-37 dengan total 4 medali, diikuti Indonesia pada peringkat ke-39 dengan 3 medali, serta Tailan pada peringkat ke-44 dengan 6 medali. Negara lain seperti Malaysia dan Singapura memperoleh masing-masing 2 dan 1 medali, sementara beberapa negara ASEAN lainnya tidak memperoleh medali. Pada periode yang sama, negara-negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan menempati posisi teratas dengan jumlah medali yang jauh lebih besar.

Perbedaan capaian ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara negara-negara ASEAN dengan negara maju dalam kompetisi global. Selain itu, posisi yang relatif rendah dalam peringkat dunia menunjukkan bahwa daya saing atlet ASEAN masih terbatas dalam mencapai level tertinggi. Data ini menunjukkan adanya perbedaan capaian antara negara-negara ASEAN dengan negara lain pada tingkat global. Dengan demikian, kondisi daya saing atlet Asia Tenggara mencerminkan capaian yang bervariasi antarnegara serta menunjukkan posisi kawasan yang masih berada dalam dinamika kompetisi olahraga internasional baik di tingkat Asia maupun dunia.

Perbedaan daya saing olahraga antar kawasan juga perlu dipahami melalui karakteristik cabang olahraga yang dipertandingkan dalam kompetisi internasional. Tidak semua cabang olahraga memiliki tingkat peluang keberhasilan yang sama, karena setiap cabang memiliki struktur kompetisi dan distribusi kekuatan yang berbeda, sebagaimana tertera dalam gambar 4.3 dibawah ini.



Gambar 4.4 Tingkat Kompetisi Cabang Olahraga Internasional

Sumber: Mitchell & Stewart, 2007

Berdasarkan data *competitive index for international sport* dalam gambar 4.3 diatas, beberapa cabang olahraga menunjukkan tingkat kompetisi yang sangat tinggi karena didominasi oleh sejumlah kecil negara dengan kapasitas pembinaan yang kuat. Sebaliknya, terdapat cabang olahraga dengan tingkat kompetisi yang lebih rendah yang relatif memberikan peluang lebih besar bagi negara lain untuk meraih medali (Mitchell & Stewart, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa peluang keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kualitas atlet, tetapi juga oleh tingkat kesulitan kompetisi pada cabang olahraga tertentu.

Negara yang memiliki sistem pembinaan yang maju cenderung mampu bersaing pada cabang dengan *competitive index* tinggi, sementara negara dengan kapasitas terbatas cenderung terkonsentrasi pada cabang tertentu dengan tingkat kompetisi yang lebih rendah. Kondisi ini mempertegas bahwa daya saing olahraga tidak bersifat merata, melainkan sangat dipengaruhi oleh struktur kompetisi global yang melekat pada masing-masing cabang olahraga.

Gambar 4.3 diatas menunjukkan distribusi tingkat kompetisi cabang olahraga internasional berdasarkan nilai *competitive index*. Cabang olahraga seperti

atletik, renang, dan senam berada pada kategori dengan tingkat kompetisi tinggi, yang menunjukkan bahwa cabang tersebut didominasi oleh negara-negara dengan sistem pembinaan olahraga yang maju dan investasi yang besar (Mitchell & Stewart, 2007). Sementara itu, cabang olahraga seperti badminton dan angkat besi berada pada tingkat kompetisi menengah dengan distribusi kekuatan yang lebih beragam antarnegara. Di sisi lain, cabang olahraga seperti sepak takraw dan pencak silat berada pada tingkat kompetisi yang lebih rendah dan cenderung bersifat regional.

Distribusi ini menunjukkan bahwa tidak semua cabang olahraga memiliki tingkat kesulitan yang sama dalam meraih prestasi internasional. Perbedaan tingkat kompetisi ini berimplikasi pada strategi yang harus dikembangkan oleh suatu negara dalam menentukan prioritas pembinaan olahraga. Negara dengan kapasitas terbatas cenderung memiliki peluang lebih besar pada cabang dengan tingkat kompetisi rendah hingga menengah. Sebaliknya, untuk dapat bersaing pada cabang dengan tingkat kompetisi tinggi diperlukan sistem pembinaan yang lebih terstruktur dan dukungan sumber daya yang signifikan. Dengan demikian, distribusi ini menegaskan bahwa daya saing olahraga sangat dipengaruhi oleh struktur kompetisi global yang berbeda antar cabang olahraga.

4.1.1.2 Distribusi Daya Saing Antar Negara Asia Tenggara

Distribusi daya saing atlet di kawasan Asia Tenggara menunjukkan pola yang tidak merata antarnegara dalam berbagai ajang olahraga internasional. Capaian prestasi yang diukur melalui perolehan medali menunjukkan bahwa kontribusi terbesar masih berasal dari beberapa negara tertentu seperti Indonesia, Tailan, Malaysia, dan Filipina. Sementara itu, negara lain seperti Laos, Kamboja, dan Brunei memiliki kontribusi yang relatif terbatas dan belum mampu bersaing secara konsisten dalam perolehan medali. Temuan ini sejalan dengan studi yang menunjukkan bahwa capaian medali negara-negara ASEAN cenderung terkonsentrasi pada negara dengan kapasitas ekonomi dan populasi yang lebih besar.

Konsentrasi capaian prestasi pada beberapa negara utama mencerminkan bahwa daya saing kawasan masih bersifat terfragmentasi. Negara dengan jumlah populasi yang besar seperti Indonesia, Tailan, dan Filipina memiliki keunggulan dalam menyediakan basis talenta atlet yang lebih luas dibandingkan negara dengan populasi kecil seperti Brunei atau Singapura (Hoffmann dkk., 2004). Hal ini menunjukkan bahwa distribusi daya saing tidak hanya dipengaruhi oleh performa kompetitif, tetapi juga oleh struktur demografis yang dimiliki masing-masing negara. Selain itu, negara dengan kapasitas ekonomi yang lebih tinggi cenderung memiliki peluang lebih besar dalam menghasilkan capaian prestasi. Kondisi ini memperlihatkan adanya hubungan antara kapasitas nasional dan distribusi daya saing di kawasan.

Distribusi daya saing antarnegara juga dapat dilihat dari variasi jumlah medali yang diperoleh dalam satu periode kompetisi. Data estimasi dan capaian medali menunjukkan bahwa negara seperti Indonesia dan Tailan mampu memperoleh medali secara lebih konsisten dibandingkan negara lain di kawasan, sementara beberapa negara bahkan tidak memperoleh medali sama sekali (Hoffmann dkk., 2004). Pola ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup berbeda dalam kemampuan menghasilkan atlet berprestasi antarnegara ASEAN. Selain itu, kondisi ini mencerminkan bahwa tidak semua negara memiliki tingkat partisipasi kompetitif yang sama dalam ajang olahraga internasional.

4.1.2 AMMS sebagai Instrumen Kerja Sama Olahraga ASEAN

ASEAN Ministerial Meeting on Sports (AMMS) merupakan forum kerja sama kawasan yang dibentuk melalui persetujuan KTT ASEAN ke-18 yang diselenggarakan pada 7-8 Mei 2011 di Jakarta, Indonesia untuk memperkuat kolaborasi di bidang olahraga di antara negara-negara anggota ASEAN. *The ASEAN Senior Officials Meeting on Sports* (SOMS) membantu AMMS dalam implementasi kerja sama olahraga regional berdasarkan Rencana Kerja ASEAN tentang Olahraga.

Untuk mendukung pengembangan olahraga di ASEAN, pada tahun 2017, AMMS mendirikan mekanisme kerja sama dengan Jepang melalui AMMS+Jepang

dan SOMS+Jepang. Forum ini menjadi wadah bagi para menteri olahraga ASEAN untuk merumuskan kebijakan, menyepakati program bersama, serta menjadikan olahraga sebagai instrumen pembangunan sosial, ekonomi, dan diplomasi di kawasan (ASEAN Main Portal, 2026a). Melalui AMMS, olahraga diposisikan tidak hanya sebagai aktivitas kompetitif, tetapi juga sarana memperkuat solidaritas, mempererat identitas kolektif ASEAN, dan membuka jalur komunikasi lintas budaya.

AMMS, setiap negara anggota memiliki peran yang berbeda sesuai dengan kapasitas nasional dan prioritas kebijakan masing-masing. Terdapat negara yang memanfaatkan AMMS sebagai sarana diplomasi budaya, seperti Tailan. Tailan berhasil menjadikan olahraga tradisional *Muay Thai* sebagai instrumen diplomasi, bahkan memperoleh pengakuan UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa Tailan mampu menggunakan AMMS sebagai medium untuk memperkuat identitas nasional sekaligus memproyeksikan soft power di tingkat kawasan dan global (UNESCO, 2020). Ada negara yang menekankan olahraga dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi dan pariwisata, seperti Singapura. Melalui AMMS, Singapura mendorong pengembangan *sport tourism* dengan mengintegrasikan ajang olahraga internasional seperti *Formula 1 Night Race* dan *Sport Hub* ke dalam agenda kawasan. Peran ini memperlihatkan bagaimana Singapura menjadikan AMMS sebagai platform untuk mengaitkan olahraga dengan strategi ekonomi kreatif dan diplomasi kota global (Muhammad, 2025). Terdapat negara berkembang dengan kapasitas besar, seperti Indonesia. Indonesia terlibat aktif dalam sejumlah program AMMS, misalnya *ASEAN Youth Sports Exchange*, *Women in Sports*, dan pelatihan atlet lintas negara (KEMENPORA, 2026).

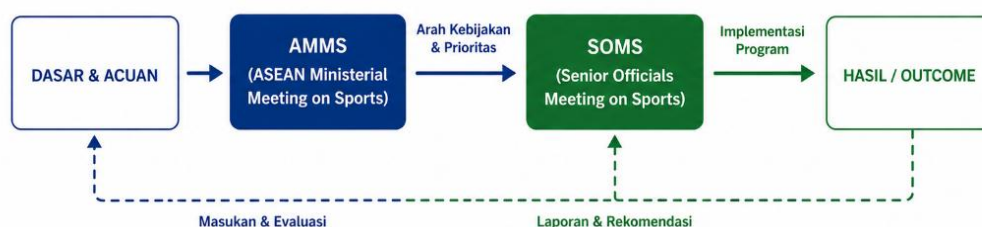
AMMS berfungsi sebagai instrumen diplomasi olahraga kawasan yang mengoordinasikan kerja sama antarnegara anggota melalui pemanfaatan olahraga sebagai media interaksi dan komunikasi. AMMS merumuskan kebijakan regional dan mengarahkan implementasi program olahraga melalui *ASEAN Work Plan on Sports* sebagai kerangka kerja utama. Dalam perspektif Stuart Murray, praktik ini mencerminkan *diplomacy through sports*, yaitu penggunaan olahraga secara

strategis oleh negara untuk membangun hubungan, memperkuat citra, dan meningkatkan konektivitas antar Masyarakat (Murray, 2012).

AMMS memfasilitasi berbagai kegiatan seperti kompetisi regional, pertukaran atlet, serta pelatihan pelatih yang memungkinkan terjadinya interaksi lintas negara secara berkelanjutan (ASEAN Main Portal, 2026a). Negara anggota menggunakan forum ini untuk memperluas kerja sama sekaligus membangun kepercayaan melalui aktivitas olahraga yang bersifat inklusif. Kegiatan tersebut menciptakan ruang diplomasi informal yang melengkapi jalur diplomasi formal antar pemerintah. AMMS juga mendorong pembentukan jaringan kerja sama antara institusi olahraga nasional dan regional sebagai bagian dari penguatan hubungan kawasan.

Implementasi program melalui AMMS menunjukkan bahwa olahraga berfungsi sebagai sarana untuk mempertemukan kepentingan negara dalam suasana yang lebih kooperatif. Namun, peran AMMS tetap bersifat koordinatif dan tidak memiliki kewenangan mengikat terhadap kebijakan domestik negara anggota (ASEAN Main Portal, 2026d). Dengan demikian, AMMS dapat dipahami sebagai instrumen diplomasi olahraga yang efektif dalam membangun relasi regional, tetapi memiliki keterbatasan dalam memastikan implementasi yang terintegrasi di seluruh negara ASEAN.

Implementasi *diplomacy through sports* dalam ASEAN ditopang oleh interaksi antara AMMS, SOMS, dan kerangka ASCC (The ASEAN Magazine, 2023). Struktur ini menunjukkan bahwa diplomasi olahraga ASEAN bersifat *multi-level governance*, koordinatif, dan *non-binding*, di mana pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif tanpa adanya otoritas supranasional yang mengikat.



Gambar 4.5 Alur Kelembagaan AMMS

Sumber: The ASEAN Magazine, 2023

Alur kelembagaan kerja sama olahraga ASEAN dimulai dari dasar acuan yang menjadi landasan dalam perumusan kebijakan. ASEAN menggunakan dokumen seperti *ASEAN Charter*, *ASCC Blueprint 2025*, dan *ASEAN Work Plan on Sports* sebagai pedoman utama dalam menentukan arah kerja sama olahraga kawasan. Acuan tersebut menetapkan prinsip, tujuan, dan prioritas yang harus diikuti oleh seluruh negara anggota ASEAN. AMMS menggunakan dasar acuan tersebut untuk merumuskan kebijakan strategis di tingkat regional. Proses ini memastikan bahwa kebijakan olahraga ASEAN selaras dengan agenda pembangunan kawasan. Selain itu, dasar acuan tersebut juga memberikan kerangka normatif yang mengaitkan olahraga dengan pembangunan sosial dan identitas ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community, 2025). Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi dan arah yang jelas. Tahap ini menunjukkan bahwa kerja sama olahraga ASEAN dibangun atas dasar perencanaan yang terstruktur.

Pada tahap berikutnya, AMMS berperan sebagai forum tingkat menteri yang menetapkan kebijakan, prioritas, dan arah kerja sama olahraga ASEAN. AMMS menyusun dan menyetujui *ASEAN Work Plan on Sports* sebagai dokumen perencanaan utama. AMMS juga memperkuat komitmen politik negara anggota dalam pelaksanaan kerja sama olahraga. Kebijakan yang dihasilkan oleh AMMS kemudian menjadi pedoman bagi implementasi di tingkat teknis. Selanjutnya, SOMS berperan sebagai forum pejabat senior yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh AMMS. SOMS menyusun rencana kerja teknis dan mengoordinasikan pelaksanaan program di antara negara anggota. SOMS juga memantau pelaksanaan program untuk memastikan kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, SOMS bekerja sama dengan berbagai mitra dan pemangku kepentingan, seperti federasi olahraga, institusi nasional, serta organisasi internasional (ASEAN Main Portal, 2026a).

Tahap akhir dari alur ini adalah hasil yang dihasilkan dari implementasi program kerja sama olahraga ASEAN. Program yang dijalankan melalui koordinasi SOMS menghasilkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia olahraga di

Kawasan (The ASEAN Magazine, 2023). Selain itu, kerja sama ini juga memperkuat kohesi sosial dan identitas regional melalui interaksi antarnegara. ASEAN juga mengalami peningkatan daya saing olahraga yang ditunjukkan melalui partisipasi dan prestasi dalam ajang internasional. Program kerja sama turut berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam aspek kesehatan, inklusivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Hasil ini menunjukkan bahwa olahraga berfungsi sebagai instrumen diplomasi yang mendukung hubungan antarnegara.

4.1.3 Implementasi Kerja Sama Olahraga ASEAN melalui AMMS

Olahraga memiliki posisi strategis dalam pembangunan kawasan Asia Tenggara, tidak hanya sebagai aktivitas sosial, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang terintegrasi dalam agenda pembangunan regional. ASEAN menempatkan olahraga dalam kerangka ASCC dengan mengaitkannya pada tujuan pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya dalam aspek kesehatan, inklusivitas, dan kohesi sosial. Komitmen ini ditegaskan melalui *Vientiane Declaration on Sports Cooperation in ASEAN* (2013) serta dioperasionalkan melalui *ASEAN Work Plan on Sports* sebagai kerangka utama dalam mengarahkan implementasi kerja sama olahraga Kawasan (ASEAN Socio-Cultural Community, 2025).

ASEAN mengembangkan *ASEAN Work Plan on Sports 2016–2020* sebagai tahap awal pembentukan fondasi kerja sama, yang berfokus pada penguatan koordinasi dan pengembangan program dasar seperti pertukaran atlet, pelatih, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia olahraga. Selanjutnya, *ASEAN Work Plan on Sports 2021–2025* disusun dengan pendekatan yang lebih sistematis melalui integrasi dengan *ASCC Blueprint 2025* serta penetapan prioritas yang mencakup olahraga untuk pembangunan dan perdamaian, olahraga untuk semua, integritas olahraga, ilmu olahraga, serta pengembangan industri dan pariwisata olahraga. Perkembangan ini menunjukkan adanya upaya ASEAN untuk memperkuat posisi olahraga sebagai bagian dari kebijakan pembangunan kawasan yang lebih terstruktur.

Implementasi kerja sama olahraga ASEAN melalui AMMS dapat dianalisis menggunakan perspektif *diplomacy through sports* yang dikemukakan oleh Stuart Murray. Murray menjelaskan bahwa olahraga dapat berfungsi sebagai instrumen diplomasi untuk membangun kerja sama (*cooperation*), memperkuat kepercayaan (*trust building*), serta menciptakan ruang interaksi non-politik yang lebih fleksibel dibandingkan diplomasi formal (Murray, 2018). Namun, efektivitas diplomasi olahraga tidak hanya diukur dari intensitas interaksi, tetapi juga dari kemampuannya menghasilkan hasil yang konkret. AMMS berfungsi sebagai platform utama yang mengoordinasikan berbagai program olahraga regional, seperti *ASEAN School Games* dan *ASEAN University Games*, yang secara langsung mendorong interaksi antar atlet, pelatih, dan institusi olahraga di Kawasan (The ASEAN Magazine, 2023). Program-program tersebut menunjukkan bahwa olahraga dimanfaatkan sebagai sarana untuk mempertemukan aktor-aktor dari berbagai negara dalam ruang yang relatif bebas konflik, sehingga memungkinkan terciptanya komunikasi informal di luar jalur diplomasi formal.

Selain itu, implementasi kerja sama ini juga mencerminkan upaya ASEAN dalam membangun *people-to-people connectivity* melalui kegiatan olahraga yang bersifat partisipatif dan inklusif. Dalam perspektif *diplomacy through sports*, aktivitas semacam ini berperan penting dalam membangun kepercayaan dan saling pengertian antarnegara anggota. ASEAN juga menggunakan olahraga untuk memperkuat identitas kawasan melalui promosi nilai-nilai bersama, seperti sportivitas, solidaritas, dan kerja sama (Murray, 2012). Dengan demikian, implementasi AMMS tidak hanya berfungsi sebagai koordinasi teknis olahraga, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi yang memperkuat integrasi sosial dan politik di kawasan Asia Tenggara.

Implementasi *ASEAN Work Plan on Sports 2016–2020* menunjukkan bahwa ASEAN menggunakan olahraga sebagai instrumen diplomasi untuk memperkuat hubungan antarnegara anggota melalui berbagai program kolaboratif. AMMS mengoordinasikan kegiatan seperti *ASEAN School Games*, *ASEAN University Games*, dan pertukaran pelatih serta atlet sebagai sarana interaksi lintas negara (ASEAN Main Portal, 2026b). Program tersebut mencerminkan praktik *diplomacy through sports* sebagaimana dikemukakan oleh Stuart Murray, yaitu penggunaan

olahraga secara strategis untuk membangun hubungan dan komunikasi antar Masyarakat (Murray, 2018). ASEAN memanfaatkan olahraga untuk meningkatkan konektivitas sosial dan memperkuat identitas kawasan melalui partisipasi bersama dalam kegiatan olahraga.

Negara anggota berpartisipasi aktif dalam program tersebut dengan tujuan memperluas jaringan kerja sama dan meningkatkan pemahaman antarbudaya. Kegiatan pertukaran dan kompetisi olahraga menciptakan ruang interaksi informal yang tidak selalu dapat dicapai melalui diplomasi formal. AMMS menjalankan fungsi koordinatif dalam memastikan keberlangsungan program-program tersebut di tingkat regional. Namun, implementasi pada periode ini masih berfokus pada pelaksanaan kegiatan tanpa mekanisme evaluasi yang terstruktur terhadap dampaknya. ASEAN belum menetapkan indikator yang jelas untuk mengukur efektivitas program terhadap tujuan diplomasi kawasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi masih berada pada tahap penguatan hubungan sosial melalui olahraga sebagai sarana diplomasi regional.

Pada periode *ASEAN Work Plan on Sports 2021–2025*, implementasi kerja sama olahraga ASEAN mengalami perkembangan dengan pendekatan yang lebih sistematis dan terarah. AMMS mengintegrasikan prinsip *monitoring and evaluation* (M&E) serta menetapkan indikator kinerja untuk menilai capaian program secara lebih terukur (ASEAN Main Portal, 2026c). ASEAN tetap menggunakan olahraga sebagai instrumen diplomasi, tetapi dengan pendekatan yang lebih terencana dan melibatkan berbagai aktor. Program kerja sama melibatkan organisasi internasional seperti UNESCO dan UNICEF (*United Nations Children's Fund*) dalam mendukung pengembangan olahraga di kawasan. Keterlibatan aktor non-negara menunjukkan adanya perluasan praktik diplomasi olahraga ke dalam bentuk jaringan kerja sama yang lebih luas.

ASEAN mengembangkan program pelatihan, peningkatan kapasitas, serta kampanye gaya hidup sehat sebagai bagian dari agenda diplomasi olahraga. Program tersebut bertujuan untuk memperkuat hubungan antarnegara sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang olahraga. AMMS berperan dalam mengoordinasikan pelaksanaan program serta memastikan keterlibatan seluruh negara anggota. Meskipun demikian, fokus implementasi masih didominasi

oleh pembangunan relasi dan kerja sama dibandingkan dengan pencapaian hasil yang bersifat kompetitif. Dengan demikian, implementasi periode ini menunjukkan penguatan fungsi olahraga sebagai instrumen diplomasi yang lebih terstruktur, namun tetap berorientasi pada hubungan sosial dan kerja sama regional.

4.1.3.1 Implementasi *ASEAN Work Plan on Sports 2016–2020*

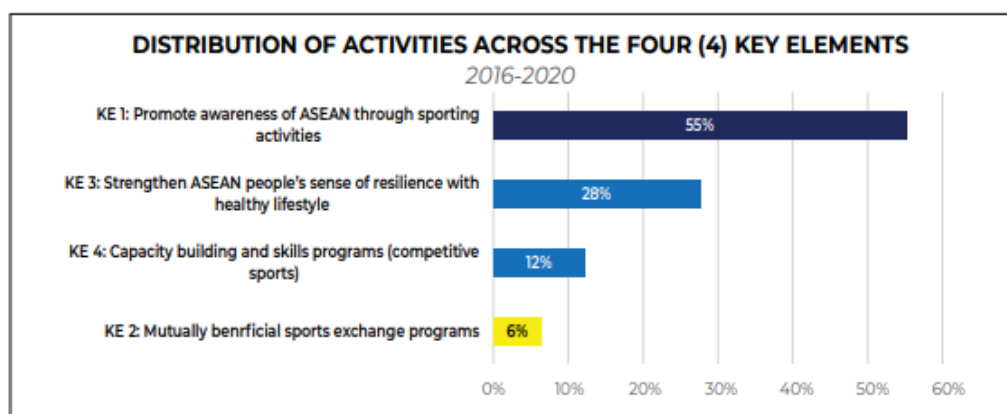
Pada periode *ASEAN Work Plan on Sports 2016–2020*, pengembangan program dan inisiatif kerja sama olahraga ASEAN menunjukkan bahwa AMMS memanfaatkan olahraga sebagai instrumen diplomasi kawasan melalui berbagai kegiatan kolaboratif. AMMS mengoordinasikan program seperti *ASEAN School Games*, *ASEAN University Games*, serta pengembangan *Traditional Sports and Games* (TSG) sebagai bagian dari upaya memperkuat interaksi antarnegara. ASEAN juga melaksanakan kegiatan coaching clinic, pelatihan pelatih, dan pertukaran atlet untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia olahraga (ASEAN Main Portal, 2026b).

Implementasi *diplomacy through sports* dalam ASEAN pada periode 2016–2020 menunjukkan tingkat aktivitas yang cukup tinggi dengan dukungan data implementasi yang terukur. ASEAN mengembangkan sebanyak 36 program utama yang dijabarkan ke dalam 156 aktivitas yang dilaksanakan di tingkat nasional, regional, dan global. Program tersebut diimplementasikan oleh negara anggota, Sekretariat ASEAN, serta mitra dialog dan organisasi terkait. Data menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian program mencapai 86 persen atau 31 dari 36 program berhasil dilaksanakan hingga akhir periode (ASEAN Main Portal, 2026b). Sementara itu, 14 persen program lainnya dilanjutkan ke periode berikutnya dalam *ASEAN Work Plan on Sports 2021–2025*.

Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi program kerja sama olahraga ASEAN berjalan secara aktif dan berkelanjutan. Selain itu, keberadaan *Mid-Term Review* pada tahun 2019 menunjukkan adanya upaya evaluasi terhadap pelaksanaan program. ASEAN juga menggunakan *ASCC Implementation-Focused Monitoring System* sebagai acuan dalam memantau perkembangan program (ASEAN Main Portal, 2026c). Mekanisme ini mencerminkan adanya upaya awal

dalam membangun *monitoring system* dalam kerja sama olahraga. Dengan demikian, pengembangan program pada periode ini tidak hanya berbasis aktivitas, tetapi juga mulai mengarah pada pendekatan evaluatif.

Tingginya jumlah program dan aktivitas tersebut perlu dilihat tidak hanya dari sisi implementasi, tetapi juga dari orientasi kebijakan yang dihasilkan. Dalam perspektif *diplomacy through sports* menurut Stuart Murray, efektivitas diplomasi olahraga tidak hanya diukur dari intensitas interaksi atau jumlah program yang dijalankan, tetapi juga dari kemampuan program tersebut menghasilkan hasil strategis (Murray, 2012). Dengan demikian, capaian 86 persen Implementasi AMMS menunjukkan perkembangan dalam penguatan mekanisme kerja sama olahraga regional pada level aktivitas dan koordinasi, namun belum secara otomatis mencerminkan keberhasilan dalam peningkatan daya saing olahraga. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi masih lebih kuat pada proses dibandingkan hasil.



Gambar 4.6 Distribusi Aktivitas *ASEAN Work Plan on Sports* 2016-2020

Sumber: ASEAN Main Portal, 2026

Distribusi aktivitas program menunjukkan bahwa fokus utama ASEAN berada pada penguatan kesadaran kawasan melalui olahraga.

1. *Key Element* 1 sebanyak 55 persen aktivitas berada pada *promote awareness of ASEAN through sporting activities*. ASEAN menggunakan kegiatan olahraga untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap identitas regional.

2. *Key Element 2* yaitu 28 persen aktivitas difokuskan pada *mutually beneficial sports exchange programs*. Program ini mencakup pertukaran atlet, pelatih, serta kerja sama antarnegara dalam pengembangan olahraga.

3. *Key Element 3* sebanyak 12 persen aktivitas diarahkan pada penguatan gaya hidup sehat masyarakat.

4. *Key Element 4* yaitu 6 persen aktivitas yang difokuskan yaitu *capacity building and skills programs* untuk olahraga kompetitif (ASEAN Main Portal, 2026c).

Distribusi aktivitas tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan orientasi kebijakan dalam kerja sama olahraga ASEAN. Dominasi program pada aspek kesadaran kawasan dan pertukaran sosial mengindikasikan bahwa olahraga lebih difungsikan sebagai instrumen integrasi dan komunikasi regional. Dalam pendekatan *diplomacy through sports* Stuart Murray, kondisi ini mencerminkan perkembangan pada *relationship building*, tetapi sekaligus menunjukkan keterbatasan pada *performance oriented* (Murray, 2012). Rendahnya proporsi program yang berfokus pada olahraga kompetitif (6 persen) menjadi indikasi bahwa kerja sama regional belum diarahkan secara sistematis untuk mendukung pengembangan atlet elit dan peningkatan performa internasional.

Pengembangan program juga menunjukkan adanya kesinambungan kebijakan melalui pengalihan beberapa program ke periode berikutnya. Terdapat lima program utama yang dibawa ke *ASEAN Work Plan on Sports 2021–2025* sebagai bagian dari kelanjutan implementasi. Program tersebut meliputi penguatan mekanisme *Traditional Sports and Games*, proyek outreach komunitas yang melibatkan atlet ASEAN, publikasi indikator olahraga, pembentukan *ASEAN Centre of Excellence*, serta pelatihan manajemen fasilitas olahraga (ASEAN Main Portal, 2026c). Program-program ini menunjukkan bahwa ASEAN mulai mengembangkan pendekatan yang lebih terstruktur dalam pengelolaan olahraga kawasan. Selain itu, program tersebut juga mencerminkan upaya untuk memperkuat aspek kelembagaan dan manajerial dalam sistem olahraga.

ASEAN juga mulai memperhatikan pentingnya data dan indikator dalam pengembangan kebijakan olahraga. Namun, program yang dikembangkan masih belum secara langsung terhubung dengan sistem pembinaan atlet elit di tingkat

nasional. Fokus program masih berada pada penguatan kapasitas umum dan kerja sama antarnegara. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan program lebih diarahkan pada fungsi diplomasi sosial dibandingkan fungsi peningkatan daya saing. Dengan demikian, meskipun jumlah dan implementasi program cukup tinggi, orientasi yang diambil masih belum sepenuhnya mendukung peningkatan performa kompetitif Kawasan.

Pengembangan program dan inisiatif kerja sama olahraga ASEAN pada periode 2016–2025 menunjukkan adanya peningkatan intensitas dan kompleksitas implementasi kebijakan melalui. Namun, jika dianalisis menggunakan *elite sports development framework*, orientasi program yang dikembangkan ASEAN masih menunjukkan dominasi pada dimensi *mass participation* dan *capacity building*, sementara dimensi *elite sport development* belum menjadi prioritas utama. Kondisi ini dapat dilihat dari distribusi aktivitas pada periode 2016–2020 yang menempatkan 55 persen program pada peningkatan kesadaran kawasan melalui olahraga dan hanya 6 persen yang secara langsung berkaitan dengan penguatan olahraga kompetitif.

Dalam konteks implementasi kerja sama olahraga ASEAN melalui AMMS, pengembangan kapasitas olahraga nasional menjadi salah satu aspek penting dalam peningkatan daya saing atlet di kawasan Asia Tenggara. *ASEAN Work Plan on Sports 2016–2020* dan *2021–2025* menempatkan beberapa agenda strategis seperti pengembangan pelatih, *sport science*, *women in sport*, *anti-doping*, dan *capacity building* sebagai bagian dari penguatan sistem olahraga kawasan. Meskipun implementasinya dilakukan pada level regional, efektivitas hasil tetap sangat bergantung pada kapasitas domestik masing-masing negara dalam membangun *elite sport* secara nasional.

Indonesia menjadi salah satu contoh negara ASEAN yang menunjukkan keterkaitan antara pengembangan sistem olahraga nasional dengan peningkatan prestasi olahraga internasional. Keberhasilan *elite sports system* di Indonesia memainkan peran dalam pembangunan dan konstruksi identitas bangsa (Rahadian dkk., 2021). Peran strategis dalam *elite sports system* dapat bermanfaat dengan mempertimbangkan visi untuk diintegrasikan secara efektif dalam pencapaian tujuan (Molan dkk., 2019). Selain itu, arah kebijakan dan rencana strategis

merupakan acuan dalam penentuan skala prioritas pembangunan olahraga (Rahadian, 2021).

Seiring perkembangannya, keberhasilan olahraga digambarkan sebagai simbol kebangkitan nasional dan juara olahraga menjadi ikon nasional. Status dan kekuatan olahraga Indonesia di antara negara-negara lain diukur dari keberhasilan negara dalam pencapaian prestasi di ajang-ajang olahraga internasional. Dalam konteks ini, pengembangan *elite sports development framework* dapat dimaknai sebagai proses pembinaan cabang olahraga unggulan yang ditujukan untuk menghadapi kompetisi yang tepat (Kidd, 2008), baik pertandingan maupun perlombaan mulai dari tingkat regional hingga internasional.

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Indonesia dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005 (UU No. 3 Tahun 2005, 2005). Sistem pembinaan dan pengembangan atlet elit di Indonesia yang diadaptasi dari *elite sports development framework* yang berorientasi pada beberapa prioritas utama, yaitu pembangunan fasilitas elit, pendanaan, dukungan bagi atlet, penyediaan pelatihan dan ilmu keolahragaan, serta kesempatan bertanding yang dipusatkan melalui pemusatan latihan nasional (Pelatnas) untuk menghadapi kompetisi internasional seperti Asian Games 2018 (Rahadian, 2021).

Pelaksanaan program-program pembangunan olahraga tersebut dilakukan secara sistematis dan terpadu. Dalam perspektif Houlihan & Green (2008), keberhasilan *elite sports development framework* bukan hanya berkaitan dengan pencapaian prestasi, tetapi juga menyangkut pengakuan diplomatik, persaingan ideologi, serta manfaat politik dan ekonomi yang diperoleh negara melalui olahraga internasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa *elite sports development framework* telah berkembang menjadi bagian dari instrumen pembangunan nasional dan identitas negara. Di sisi lain, keberhasilan atlet elit juga menjadi fokus utama pembuat kebijakan dalam meningkatkan posisi perolehan medali, meskipun pengelolaan *elite sports system* jauh melampaui faktor *meso-level* dalam kebijakan olahraga (Sotiriadou & De Bosscher, 2017).

Implementasi kebijakan *elite sports development framework* Indonesia juga terlihat dalam penyelenggaraan *Asian Games* 2018. Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan strategis seperti Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan *Asian Games* 2018 (PERPRES No. 48 Tahun 2017, 2017), Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) (PERPRES No. 95 Tahun 2017, 2017), serta Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana dan Sarana *Asian Games* 2018 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN), 2022). Dukungan kebijakan tersebut memperlihatkan adanya pendekatan sistemik dalam pembangunan *elite sports development framework* Indonesia.

Pencapaian Indonesia dalam *Asian Games* 2018 juga memperlihatkan adanya peningkatan performa olahraga nasional. Indonesia berhasil memperoleh 31 medali emas, 24 medali perak, dan 43 medali perunggu serta menempati peringkat keempat dari 45 negara peserta Asia. Capaian tersebut menjadi salah satu prestasi tertinggi Indonesia sepanjang sejarah *Asian Games* sejak 1951. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan pemusatan latihan nasional, dukungan pemerintah, pembangunan fasilitas olahraga, serta penguatan *sport science* dan sistem pembinaan atlet elit secara lebih terstruktur.

Implementasi kerja sama olahraga ASEAN melalui AMMS dapat dipahami memiliki keterkaitan dengan penguatan kapasitas olahraga nasional negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Agenda kerja sama seperti pengembangan pelatih, *sport science*, *women in sport*, *anti-doping*, dan *capacity building* menunjukkan adanya upaya regional untuk memperkuat pengembangan olahraga kawasan. Oleh karena itu, kontribusi AMMS terhadap daya saing atlet lebih tepat dipahami sebagai mekanisme fasilitasi, koordinasi, dan penguatan kapasitas regional dibandingkan sebagai faktor tunggal yang secara langsung menentukan peningkatan prestasi olahraga internasional.

4.1.3.2 Implementasi *ASEAN Work Plan on Sports 2021–2025*

Pada periode *ASEAN Work Plan on Sports 2021–2025*, implementasi AMMS menunjukkan pergeseran menuju pendekatan yang lebih strategis dan terukur dalam pengembangan kerja sama olahraga kawasan. ASEAN mulai menerapkan mekanisme *monitoring and evaluation* (M&E) serta menetapkan *key performance indicators* (KPIs) untuk menilai capaian program secara sistematis. ASEAN juga mengintegrasikan program olahraga dengan agenda SDGs dan *ASEAN Community Vision 2025* sebagai bagian dari arah kebijakan jangka panjang. AMMS mengembangkan program seperti *capacity building* untuk pelatih dan tenaga profesional olahraga, kampanye gaya hidup sehat, penguatan *sport science*, serta kerja sama dengan organisasi internasional seperti UNESCO, UNICEF, JSPO (*Join Statement on Sports Policy*), ACSF, FIFA (*Fédération Internationale de Football Association*) (ASEAN Main Portal, 2026).

Pada periode *ASEAN Work Plan on Sports 2021–2025*, pengembangan program kerja sama olahraga ASEAN menunjukkan struktur yang lebih sistematis dengan pembagian ke dalam lima *Priority Areas*, lima belas program, dan tiga puluh enam aktivitas utama. ASEAN merancang kebijakan ini untuk mendukung *ASEAN Community Vision 2025* dengan menempatkan olahraga sebagai instrumen pembangunan sosial dan perdamaian kawasan. ASCC menjadi kerangka utama yang mengintegrasikan program olahraga dengan agenda pembangunan regional (ASEAN Main Portal, 2026).

Implementasi *ASEAN Work Plan on Sports 2021–2025* merupakan upaya strategis kawasan untuk mewujudkan Visi Komunitas ASEAN 2025 melalui penguatan kerja sama keolahragaan yang berintegritas serta berfungsi sebagai sarana kemajuan pembangunan sosial-budaya dan perdamaian. Secara operasional, rencana kerja ini menerapkan prinsip kepemimpinan negara (*Country Leadership*), di mana setiap Negara Anggota ASEAN diwajibkan untuk menginisiasi atau memimpin setidaknya satu kegiatan guna memastikan fokus pada aktivitas yang digerakkan oleh aspirasi regional (ASEAN Main Portal, 2017).

Dukungan sumber daya untuk implementasi ini dimobilisasi melalui pendanaan mandiri negara pelaksana, pendanaan kolektif, serta kolaborasi dengan mitra wicara, organisasi internasional, dan lembaga pemikir (*think tanks*). Selain itu, mekanisme *monitoring and evaluation* (M&E) dilakukan secara berkala oleh Direktorat Analisis dan Pemantauan Sekretariat ASEAN untuk dilaporkan kepada SOMS untuk Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (SOCA), dengan menggunakan *key performance indicator* (KPI) yang dinamis guna memastikan kemajuan yang terukur.

Activity distribution:	
PRIORITY AREA 1: Sports' Contribution to Key Development Outcomes and Peace Outcome Statement: Sports is perceived as one of the strategic approaches for ASEAN Community-building.	29%
PRIORITY AREA 2: Promotion of Healthy Lifestyle through Sports Participation and Physical Activities Outcome Statement: Strengthened collaboration with relevant stakeholders in promoting healthy lifestyle through sports and physical activities.	25%
PRIORITY AREA 3: Professional Capacity Development, Sports Integrity and Sports Science Outcome Statement: Strengthened cooperation in capacity building for sports professionals and physical education (PE) teachers, protection of sports integrity and advancement of sports science.	20%
PRIORITY AREA 4: Promoting ASEAN Awareness through Sports Activities, Sports Tourism and Sports Industry Outcome Statement: ASEAN Awareness and Culture are promoted through regional sports initiatives and major sports events.	15%
PRIORITY AREA 5: Resource Mobilisation, Partner Engagement, and M&E for ASEAN Cooperation on Sports Outcome Statement: ASEAN Member States are provided with financial support and technical expertise to undertake cooperation in sports.	11%

Gambar 4.7 Distribusi Aktivitas *ASEAN Work Plan on Sports 2021-2025*

Sumber: ASEAN Main Portal, 2026

ASEAN menetapkan *Priority Area 1* yaitu *Sports' Contribution to Key Development Hasil and Peace* dengan kontribusi sebesar 29 persen dari total aktivitas program. Program dalam area ini meliputi *Programme 1.1* tentang pengembangan referensi berbasis bukti kebijakan olahraga, *Programme 1.2* tentang partisipasi perempuan dalam olahraga, *Programme 1.3* tentang pemberdayaan penyandang disabilitas, dan *Programme 1.4* tentang keterlibatan pemuda (ASEAN

Main Portal, 2026). Program-program ini menempatkan olahraga sebagai instrumen untuk membangun masyarakat inklusif dan damai.

Fokus utama dari bidang prioritas ini mencakup pengembangan standar berbasis bukti untuk mengukur kontribusi olahraga terhadap pembangunan, promosi partisipasi perempuan dan anak perempuan termasuk kepemimpinan, aksesibilitas, dan keamanan, serta pemberdayaan pemuda berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas melalui media olahraga. Kebijakan ini berlandaskan pada *Vientiane Declaration on Sports Cooperation in ASEAN* (2013) dan diselaraskan dengan *Kazan action plan* untuk mendukung pencapaian SDGs serta memperkuat peran olahraga sebagai bentuk perdamaian dan toleransi (ASEAN Main Portal, 2019).

Implementasi bidang prioritas ini dijabarkan ke dalam lima program utama dengan berbagai aktivitas yang dipimpin oleh negara-negara anggota, sebagai berikut: *Programme 1.1*: Pengembangan referensi berbasis bukti mengenai kontribusi olahraga terhadap hasil pembangunan. Aktivitasnya meliputi penyelenggaraan simposium mengenai olahraga untuk pembangunan dan perdamaian oleh Sekretariat ASEAN, serta analisis kontribusi olahraga terhadap hasil pembangunan sosial-ekonomi di setiap negara anggota yang dipimpin oleh Singapura (ASEAN Main Portal, 2026). *Programme 1.2*: Promosi partisipasi perempuan dan anak perempuan dalam olahraga. Program ini mencakup dialog kebijakan seperti Forum Pemimpin Perempuan ASEAN dalam Olahraga yang dipimpin oleh Myanmar, Simposium Perempuan ASEAN dalam Olahraga oleh Malaysia, serta proyek kerja sama ASEAN-Jepang untuk kesetaraan gender dalam olahraga (ASEAN Main Portal, 2026).

Programme 1.3: Pemberdayaan penyandang disabilitas (PWDs) dan pemuda berkebutuhan khusus melalui inisiatif olahraga. Aktivitas utamanya adalah penyelenggaraan Konvensi ASEAN tentang PWDs dalam Olahraga yang dipimpin oleh Malaysia, serta pelatihan promosi kesehatan dan pertolongan pertama bagi atlet Special Olympics yang dipimpin oleh Indonesia (ASEAN Main Portal, 2026). *Programme 1.4*: Pelibatan pemuda dalam olahraga untuk pengembangan keterampilan. Program ini mencakup *funshop* SDGs pemuda dan olahraga bersama UNESCO, program pelatihan kepemimpinan etis pemuda oleh Myanmar, serta

penyelenggaraan rutin *ASEAN School Games* oleh negara-negara tuan rumah (ASEAN Main Portal, 2026). *Programme 1.5* (Aktivitas iii dari *Programme 1.4*): Pencegahan kejahatan pemuda melalui olahraga. Tailan, melalui *Tailan Institute of Justice* (TIJ), memimpin inisiatif komprehensif mulai dari studi dasar, kampanye peningkatan kesadaran, hingga penyelenggaraan Konferensi ASEAN tentang Pencegahan Kejahatan Pemuda melalui Olahraga (ASEAN Main Portal, 2026).

Menurut Stuart Murray yang menekankan penggunaan olahraga sebagai sarana membangun hubungan sosial dan persepsi positif antarnegara (Murray, 2012). ASEAN menggunakan olahraga untuk memperkuat kohesi sosial dan membangun identitas kawasan melalui partisipasi masyarakat. Secara langsung program pada area ini menunjukkan orientasi kuat pada pembangunan sosial melalui olahraga.

Selanjutnya, ASEAN mengembangkan *Priority Area 2* yaitu *Promotion of Healthy Lifestyle through Sports Participation and Physical Activities* dengan kontribusi sebesar 25 persen aktivitas (ASEAN Main Portal, 2026). Mengusung slogan *Sports for All*: Kolaborasi menuju Komunitas ASEAN yang lebih sehat dan aktif, Program dalam area ini mencakup *Programme 2.1* tentang platform pertukaran pengetahuan untuk promosi kesehatan dan *Programme 2.2* tentang penguatan *ASEAN Physical Fitness Indicators* (APFI). ASEAN menggunakan program ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat melalui aktivitas olahraga (ASEAN Main Portal, 2026). Program ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, komunitas, dan organisasi kesehatan.

Implementasi bidang prioritas ini difokuskan pada dua program utama yang melibatkan berbagai negara anggota sebagai pemimpin kegiatan: *Programme 2.1*: Menyelenggarakan platform pertukaran pengetahuan dan pelibatan masyarakat. Fokusnya adalah mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan, termasuk penuaan yang sehat dan aktif (*healthy and active ageing*). Aktivitas spesifiknya meliputi: Singapura memimpin pertukaran keahlian mengenai kesehatan melalui program *Active Health*. Vietnam melakukan kampanye kesadaran selama *SEA Games* ke-31 dan *ASEAN Para Games* ke-10 terkait pengurangan bahaya tembakau, keamanan pangan, dan pencegahan COVID-19. Indonesia memimpin penyelenggaraan rutin

ASEANMove! Week melalui kolaborasi lintas sektor kesehatan. Lao PDR mengembangkan modul pelatihan gaya hidup sehat untuk kaum muda guna mencegah penyakit tidak menular (NCDs). Myanmar memimpin Proyek *ASEAN Active (Inter) Generation* yang bertujuan meningkatkan aktivitas fisik antara generasi muda dan lansia melalui festival olahraga hibrida dan pengembangan panduan aktivitas (ASEAN Main Portal, 2026).

Programme 2.2: Memperluas jaringan ASEAN untuk implementasi APFI. Program ini bertujuan untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam memajukan inisiatif APFI guna mendukung pembuatan kebijakan berbasis bukti. Tailan memimpin program ini melalui pembentukan Kelompok Kerja Teknis, pengumpulan data kebugaran di tingkat nasional, serta publikasi laporan indikator olahraga yang dapat diakses secara daring. Secara kontekstual, bidang ini merupakan kelanjutan dari mandat *Vientiane Declaration on Sports Cooperation in ASEAN* (2013) yang menekankan kebijakan *Sports for All* (ASEAN Main Portal, 2026). Rencana kerja periode ini juga didasarkan pada hasil Survei Partisipasi Olahraga ACW 2021 yang dilakukan di 10 kota ASEAN untuk memberikan gambaran mengenai manfaat ekonomi dan sosial dari aktivitas fisik (Murray, 2012).

Pada *Priority Area 3* yaitu *Professional Capacity Development, Sports Integrity and Sports Science* dengan kontribusi sebesar 20 persen aktivitas, ASEAN menekankan penguatan kapasitas kelembagaan dan profesional olahraga (ASEAN Main Portal, 2026). Program yang dikembangkan meliputi *Programme 3.1* tentang standardisasi pelatihan pelatih ASEAN, *Programme 3.2* tentang pertukaran profesional dan pelatihan bersama, *Programme 3.3* tentang *anti-doping* dan hukum olahraga, serta *Programme 3.4* tentang pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga (ASEAN Main Portal, 2026). Program ini menunjukkan adanya peningkatan fokus pada penguatan kualitas sumber daya manusia olahraga. ASEAN juga mulai mengintegrasikan aspek *sport science* dan integritas olahraga dalam kebijakan regional. Fokus bidang ini mencakup standarisasi program pelatihan pelatih, platform pertukaran profesional dengan mitra wicara ASEAN, inisiatif hukum olahraga dan *anti-doping*, serta pengembangan regulasi manajemen olahraga yang aman.

Implementasi bidang prioritas ini dijabarkan ke dalam empat program utama sebagai berikut: *Programme 3.1: Standardisasi Program Pelatihan Pelatih ASEAN*. Malaysia memimpin studi kelayakan mengenai pembentukan *ASEAN Centre for Excellence in Sports Coaching*. Hasil studi ini akan menentukan implementasi proyek standardisasi program pelatihan dan sertifikasi pelatih di seluruh kawasan. *Programme 3.2: Pertukaran Profesional, Program Pelatihan Bersama, dan Platform Pengembangan Kapasitas*. Program ini melibatkan kerja sama dengan mitra wicara dan pemangku kepentingan eksternal. Aktivitasnya meliputi: Lao PDR memimpin program pertukaran untuk bidang kedokteran olahraga, ilmuwan olahraga, dan ahli gizi olahraga. Singapura memfasilitasi pertukaran pejabat olahraga berkinerja tinggi melalui kunjungan ke *Singapore Sports Institute* (SSI), partisipasi dalam simposium ilmu olahraga, serta jaringan *Association of Sports Institutes in Asia* (ASIA). Malaysia menyelenggarakan simposium *Women Can Coach* serta dialog terkait kedokteran dan ilmu olahraga. Kamboja mengimplementasikan kursus penyegaran dan pengembangan kapasitas bagi guru-guru Pendidikan Jasmani di ASEAN (ASEAN Main Portal, 2026).

Programme 3.3: Pelibatan Negara Anggota ASEAN dalam Inisiatif Hukum Olahraga dan Anti-Doping. Fokus utamanya adalah perlindungan integritas olahraga melalui edukasi dan kepatuhan terhadap standar internasional. Inisiatifnya mencakup: Pelatihan ahli *Therapeutic Use Exemption* (TUE) dan simposium edukasi *anti-doping* yang dipimpin oleh Malaysia. Edukasi *anti-doping* di ajang olahraga besar (*SEA Games* dan *ASEAN Para Games*) serta pembangunan jaringan petugas kontrol *doping* oleh Singapura. Kursus pelatihan Petugas Kontrol *Doping* (DCO) dan seminar TUE oleh Filipina. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) resmi antara ASEAN dan *World Anti-Doping Agency* (WADA) yang difasilitasi oleh Singapura (ASEAN Main Portal, 2026).

Programme 3.4: Berbagi Pengetahuan dan Pengembangan Kebijakan/Regulasi serta Manajemen Olahraga. Singapura memimpin upaya untuk memastikan lingkungan yang aman bagi seluruh atlet (*Safe Sport*) dan meningkatkan kesadaran terhadap segala bentuk pelecehan dalam olahraga melalui partisipasi rutin dalam forum-forum terkait (ASEAN Main Portal, 2026). Dalam perspektif *diplomacy through sports*, penguatan kapasitas ini menjadi instrumen

untuk meningkatkan kepercayaan antarnegara melalui standar dan praktik bersama. Program pertukaran profesional juga menciptakan jaringan kerja sama yang lebih luas antarnegara anggota (Murray, 2012).

Pada *Priority Area 4* yaitu *Promoting ASEAN Awareness through Sports Activities, Sports Tourism and Sports Industry* dengan kontribusi sebesar 15 persen aktivitas, ASEAN mengembangkan program yang berorientasi pada identitas kawasan dan ekonomi olahraga. Program yang dijalankan meliputi *Programme 4.1* tentang pencalonan tuan rumah ajang olahraga internasional seperti *FIFA World Cup*, *Programme 4.2* tentang pertukaran masyarakat melalui olahraga dan revitalisasi TSG, serta *Programme 4.3* dan *4.4* tentang pengembangan sport tourism dan sport industry. Program ini menunjukkan bahwa olahraga digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan visibilitas ASEAN di tingkat global (ASEAN Main Portal, 2026). ASEAN juga memanfaatkan olahraga sebagai media untuk memperkuat interaksi masyarakat lintas negara.

Fokus utama bidang ini meliputi persiapan pencalonan tuan rumah *FIFA world cup*, revitalisasi olahraga tradisional, serta pengembangan dialog mengenai industri dan pariwisata olahraga sebagai sektor yang tumbuh cepat. Implementasi bidang prioritas ini dijabarkan ke dalam tiga program utama dengan aktivitas sebagai berikut: *Programme 4.1*: Persiapan pengajuan (*bidding*) *FIFA world cup* 2034 dan eksplorasi peluang tuan rumah bersama acara olahraga global lainnya. Aktivitas strategisnya mencakup: Pembentukan Kelompok Kerja Teknis (*Technical Working Group*) *FIFA world cup* 2034 yang dipimpin oleh Tailan. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Tahunan Kelompok Kerja Teknis yang dipimpin oleh Malaysia. Penyusunan naskah pengajuan (*bid*) untuk *FIFA world cup* 2034 yang dilakukan secara kolektif oleh Negara Anggota ASEAN (ASEAN Main Portal, 2026).

Programme 4.2: Promosi pertukaran antar-masyarakat melalui kegiatan olahraga dalam konteks *Sports for All* dan Revitalisasi Olahraga dan Permainan Tradisional (TSG). Program ini menekankan bahwa TSG adalah warisan budaya takbenda yang memperkuat identitas dan kebanggaan regional. Aktivitasnya meliputi penelitian TSG ASEAN, pembuatan materi informasi, pengembangan perangkat (*toolkit*) perlindungan TSG di dunia modern, serta penyelenggaraan seminar dan festival TSG ASEAN (ASEAN Main Portal, 2026).

Programme 4.3: Promosi pertukaran pengetahuan dan dialog mengenai pariwisata olahraga dan industri olahraga di ASEAN. Inisiatif ini bertujuan memanfaatkan manfaat sosio-ekonomi dari olahraga melalui: *ASEAN Dialogue on Sports Industry* yang dipimpin oleh Tailan (ASEAN Main Portal, 2026). Pertemuan Bisnis Daring industri olahraga dan kesehatan dari wilayah ASEAN ke Jepang yang dipimpin oleh Jepang. program ini mencerminkan penggunaan olahraga sebagai alat untuk membangun citra kawasan dan memperluas jejaring internasional (Murray, 2012). Selain itu, pengembangan sport tourism menunjukkan adanya integrasi antara olahraga dan sektor ekonomi membuat kerja sama olahraga ASEAN berkembang ke arah multidimensional yang mencakup aspek sosial, budaya, dan ekonomi (Anholt, 2011).

Terakhir, ASEAN mengembangkan *Priority Area 5* yaitu *Resource Mobilisation, Partner Engagement, and Monitoring and Evaluation* dengan kontribusi 11 persen yang berfokus pada penguatan tata kelola kerja sama olahraga. Program dalam area ini meliputi *Programme 5.1* tentang pembentukan *ASEAN Sports Fund* dan *Programme 5.2* tentang *Monitoring, Evaluation, and Learning Cycle* (ASEAN Main Portal, 2026). ASEAN menggunakan program ini untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas implementasi kebijakan olahraga. Selain itu, ASEAN juga memperkuat kerja sama dengan mitra dialog dan organisasi internasional dalam pelaksanaan program. Mekanisme *monitoring* dan *evaluation* menunjukkan bahwa ASEAN mulai mengadopsi pendekatan berbasis kinerja dalam pengelolaan program.

Fokus utama bidang ini adalah mengatasi tantangan yang diidentifikasi dari rencana kerja periode sebelumnya, yaitu keterbatasan sumber daya manusia, keahlian, dan pendanaan, melalui pembentukan kemitraan strategis dengan entitas ASEAN, organisasi olahraga, serta Mitra Wicara ASEAN. Implementasi bidang prioritas ini dibagi menjadi dua program utama sebagai berikut: *Programme 5.1: Pembentukan Dana Olahraga ASEAN dan Penguatan Kerja Sama dengan Mitra.* Program ini bertujuan menciptakan mekanisme pendanaan yang berkelanjutan dan memperluas jaringan kolaborasi. Aktivitas utamanya meliputi: Sekretariat ASEAN memfasilitasi konsultasi antarnegara anggota untuk pembentukan Dana Olahraga ASEAN (*ASEAN Sports Fund*). Negara-negara anggota dan Sekretariat ASEAN

memperluas keterlibatan dengan pihak eksternal, termasuk mitra wicara dan organisasi internasional. Singapura memimpin adopsi Pernyataan Bersama tentang penguatan fondasi atlet ASEAN di *SEA Games* untuk menyelaraskan pemilihan cabang olahraga dengan standar *Asian Games* dan Olimpiade (ASEAN Main Portal, 2026).

Programme 5.2: Siklus Pemantauan, Evaluasi, dan Pembelajaran Implementasi Rencana Kerja. Program ini bertujuan memastikan kemajuan yang terukur melalui kerangka kerja yang sistematis. Aktivitasnya meliputi: Pengembangan kerangka M&E untuk mengukur kontribusi olahraga terhadap pembangunan nasional yang dipimpin oleh Ketua SOMS dengan dukungan Sekretariat ASEAN. Pelaksanaan Penilaian Jangka Menengah (*Mid-Term Assessment*) pada tahun 2023 dan Penilaian Akhir (*End-of-Term Assessment*) pada tahun 2025 untuk mengevaluasi efektivitas rencana kerja (ASEAN Main Portal, 2026).

Struktur program dalam *ASEAN Work Plan on Sports 2021–2025* masih menunjukkan dominasi pendekatan *sport for development* dibandingkan *sport for performance*. Meskipun terdapat penguatan pada aspek kapasitas profesional dan *sport science*, program yang dikembangkan belum secara langsung terhubung dengan sistem identifikasi bakat, pelatihan intensif, dan pengembangan atlet elit. Dalam perspektif Stuart Murray, kondisi ini menunjukkan bahwa diplomasi olahraga ASEAN telah terinstitusionalisasi secara lebih baik (Murray, 2018), namun belum sepenuhnya diarahkan untuk menghasilkan hasil kompetitif yang terukur.

Dalam setiap programnya AMMS melibatkan aktor non-negara yang menunjukkan bahwa kerja sama olahraga ASEAN berkembang ke arah *networked sport diplomacy* yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam perspektif Murray, perkembangan ini menunjukkan bahwa diplomasi olahraga menjadi lebih terstruktur, berbasis kebijakan jangka panjang, dan melibatkan multi-aktor dalam implementasinya (Murray, 2018). Namun, jika dianalisis lebih lanjut, implementasi masih menghadapi keterbatasan struktural dalam kaitannya dengan *elite sports system*. Program regional belum terhubung secara langsung dengan sistem identifikasi bakat, pelatihan atlet elit, dan pengembangan *high performance*

sport di tingkat nasional. Selain itu, terdapat ketimpangan kapasitas antarnegara anggota seperti Tailan, Vietnam, dan Indonesia yang memengaruhi efektivitas implementasi program. Fokus program masih didominasi oleh kegiatan *capacity building* umum seperti pelatihan dasar, *workshop*, dan *knowledge sharing*.

Pengembangan program dan inisiatif kerja sama olahraga ASEAN melalui AMMS menunjukkan adanya paradoks dalam implementasi kebijakan. Di satu sisi, ASEAN berkembang membangun sistem kerja sama yang aktif, terstruktur, dan berbasis multi-aktor. Namun di sisi lain, orientasi program yang dominan pada aspek sosial, partisipatif, dan kapasitas umum menyebabkan kontribusi terhadap peningkatan daya saing atlet masih terbatas. Dengan demikian, implementasi *diplomacy through sports* di ASEAN lebih efektif dalam membangun hubungan dan integrasi kawasan dibandingkan dalam mendorong peningkatan performa kompetitif secara kolektif.

Pengembangan program dan inisiatif kerja sama olahraga ASEAN pada periode 2016–2025 menunjukkan adanya peningkatan intensitas dan kompleksitas implementasi kebijakan melalui. Namun, program yang dikembangkan ASEAN masih menunjukkan dominasi pada dimensi *mass participation* dan *capacity building*, sementara dimensi *elite sport development* belum menjadi prioritas utama. Kondisi ini dapat dilihat dari distribusi aktivitas pada periode 2016–2020 yang menempatkan 55 persen program pada peningkatan kesadaran kawasan melalui olahraga dan hanya 6 persen yang secara langsung berkaitan dengan penguatan olahraga kompetitif.

Dalam konteks implementasi kerja sama olahraga ASEAN melalui AMMS, pengembangan kapasitas olahraga nasional menjadi salah satu aspek penting dalam peningkatan daya saing atlet di kawasan Asia Tenggara. *ASEAN Work Plan on Sports 2016–2020* dan *2021–2025* menempatkan beberapa agenda strategis seperti pengembangan pelatih, *sport science*, *women in sport*, *anti-doping*, dan *capacity building* sebagai bagian dari penguatan sistem olahraga kawasan. Meskipun implementasinya dilakukan pada level regional, efektivitas hasil tetap sangat bergantung pada kapasitas domestik masing-masing negara dalam membangun *elite sport system* secara nasional.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Implementasi Kerja Sama Olahraga ASEAN dalam Diplomasi Olahraga

Diplomasi olahraga semakin dipahami sebagai salah satu bentuk nyata penerapan *soft power*, olahraga memiliki kapasitas diplomatik yang signifikan karena karakteristiknya yang universal serta kemampuannya menjembatani berbagai perbedaan politik, budaya, dan ideologi (Murray & Pigman, 2014). Melalui aktivitas olahraga, negara dapat membangun dan menampilkan citra positif kepada masyarakat internasional, mempererat hubungan antarnegara, serta mendorong terbentuknya solidaritas lintas batas negara (Cha, 2016a). Dalam konteks ini, olahraga tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas kompetitif, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi yang mendukung pencapaian kepentingan politik dan hubungan internasional secara damai.

Selain sebagai instrumen *soft power*, diplomasi olahraga juga memiliki peran penting dalam praktik *middle power diplomacy*, khususnya bagi negara-negara yang berupaya memperkuat pengaruhnya melalui kerja sama multilateral. Negara-negara berkekuatan menengah cenderung mengedepankan pendekatan kolaboratif melalui institusi dan forum internasional, promosi norma bersama, serta pemanfaatan *soft power* untuk meningkatkan posisi diplomatik mereka (Cooper & Parlar Dal, 2016). Dalam perspektif tersebut, olahraga dapat menjadi sarana yang efektif bagi negara-negara *middle power* untuk memperluas jaringan kerja sama, meningkatkan visibilitas internasional, dan memperkuat perannya dalam tatanan regional maupun global.

Implementasi kerja sama olahraga ASEAN melalui AMMS mencerminkan penggunaan olahraga sebagai instrumen diplomasi kawasan. Melalui berbagai kebijakan dan program yang disepakati secara kolektif, negara-negara anggota ASEAN memanfaatkan olahraga tidak hanya sebagai sarana pengembangan prestasi, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi kawasan. Implementasi kerja sama olahraga yang diwujudkan melalui *ASEAN Work Plan on Sports*, pengembangan kapasitas sumber daya manusia olahraga, pertukaran pengetahuan, serta

penyelenggaraan berbagai ajang olahraga regional menunjukkan bagaimana olahraga digunakan untuk memperkuat hubungan antarnegara anggota dan membangun identitas kawasan yang lebih kohesif. Kondisi ini mencerminkan praktik diplomasi olahraga sebagaimana dijelaskan oleh Murray, baik melalui pendekatan *diplomacy through sports* yang menempatkan olahraga sebagai sarana kerja sama, maupun *sport as diplomacy* yang menjadikan olahraga sebagai arena representasi identitas dan eksistensi kawasan ASEAN di tingkat internasional.

4.2.1.1 Pendekatan *Diplomacy Through Sports*

Kerja sama olahraga ASEAN menunjukkan karakter *diplomacy through sports* karena olahraga digunakan sebagai instrumen untuk memperkuat hubungan antarnegara anggota. Melalui AMMS, negara-negara ASEAN membangun komunikasi, koordinasi kebijakan, serta pertukaran pengetahuan olahraga yang bertujuan meningkatkan kapasitas kawasan secara kolektif. Analisis terhadap dimensi Pengembangan Program Kerja Sama Olahraga dalam kerangka diplomasi olahraga ASEAN menunjukkan sebuah transformasi strategis di mana olahraga diposisikan sebagai instrumen diplomasi non-tradisional yang melampaui batas kompetisi fisik. Berdasarkan pendekatan Murray (2012), dimensi ini menekankan penggunaan olahraga sebagai sarana komunikasi dan interaksi sosial guna membangun persepsi positif serta hubungan internasional yang kooperatif.

ASEAN mengimplementasikan prinsip ini melalui *ASEAN Work Plan on Sports 2021–2025* yang mencakup diversifikasi program sangat luas untuk memperkuat identitas regional. Intensivitas praktik diplomasi kawasan tercermin dari peningkatan jenis dan cakupan inisiatif yang kini lebih terintegrasi dengan agenda global seperti SDGs. Program-program ini dirancang untuk menciptakan ruang dialog yang lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan bersama, seperti pembangunan sumber daya manusia yang tangguh. Melalui penyusunan standar berbasis bukti dalam *Programme 1.1: Development of evidence based references on the contribution of sports to development outcomes*, ASEAN berupaya mengukur dampak nyata olahraga bagi perdamaian (Murray, 2012).

Fokus utama dalam pengembangan program ini adalah aspek inklusivitas yang menyorot kelompok masyarakat rentan untuk memperkuat kohesi sosial di kawasan. Melalui *Programme 1.2: Promotion of the participation of Women and Girls in Sports in ASEAN*, negara-negara anggota aktif mendorong kepemimpinan perempuan melalui platform seperti ASEAN Forum for Women Leadership in Sports (ASEAN Main Portal, 2026c). Di sisi lain, pemberdayaan penyandang disabilitas dilakukan secara sistematis melalui *Programme 1.3: Empowerment of persons with disabilities (PWDs) and youth with special needs through initiatives on sports* guna meruntuhkan hambatan partisipasi fisik (ASEAN Main Portal, 2026c). Pelibatan generasi muda juga diperkuat melalui *Programme 1.4: Engagement of youth in sports for skills development* serta inisiatif *Promote Youth Crime Prevention Through Sports* untuk mencegah kerentanan sosial (ASEAN Main Portal, 2026c). Pendekatan ini menunjukkan bahwa diplomasi olahraga ASEAN telah menyentuh dimensi human security dengan menempatkan kesejahteraan individu sebagai inti dari pembangunan komunitas. Keberagaman program tersebut menjadi bukti bahwa olahraga berfungsi sebagai media efektif untuk menyebarkan nilai toleransi antarbangsa (Murray, 2012).

Selain aspek sosial, pengembangan program ini juga menyorot pada penguatan identitas budaya dan daya saing profesional di kancah internasional. Upaya revitalisasi dilakukan melalui *Programme 4.2: Promote people to people exchange through sports activities in the context of Sports for All and the Revitalisation of Traditional Sports and Games* (TSG) sebagai warisan budaya takbenda. TSG dipandang sebagai sarana diplomasi budaya yang vital untuk membangkitkan rasa memiliki dan kebanggaan regional di bawah visi *One Vision, One Identity, One Community* (ASEAN Main Portal, 2026c). Peningkatan profesionalisme atlet dan pelatih juga menjadi prioritas dalam *Programme 3.1: Standardisation of ASEAN Coach Training Programmes* serta pemanfaatan ilmu pengetahuan olahraga dalam advancement of sports science (ASEAN Main Portal, 2026c). Ambisi global ASEAN secara kolektif pun diwujudkan melalui *Programme 4.1: Preparation for the bidding of FIFA World Cup 2034*, yang bertujuan meningkatkan visibilitas kawasan di mata dunia secara masif. Melalui implementasi APFI, kawasan ini berupaya membangun masyarakat yang sehat dan

kompetitif secara global(ASEAN Main Portal, 2026c). Keseluruhan program ini menegaskan bahwa pengembangan kerja sama olahraga telah menjadi elemen permanen dalam memperkuat integrasi dan kemajuan di kawasan ASEAN.

Dimensi koordinasi kelembagaan dalam kerja sama olahraga ASEAN merupakan manifestasi konkret dari strategi diplomasi kolektif yang terstruktur untuk memastikan keberlanjutan kebijakan regional. Kerangka kerja ini mengandalkan sinergi antara AMMS sebagai perumus kebijakan tingkat tinggi dan SOMS yang bertanggung jawab dalam operasionalisasi rencana kerja. Seluruh inisiatif ini diselaraskan dengan *Strategic Measures of ASCC Blueprint 2025* guna mendukung visi pembangunan sosial-budaya kawasan yang inklusif dan berorientasi pada masyarakat (ASEAN Socio-Cultural Community, 2025) . Melalui mekanisme ini, olahraga ditempatkan sebagai instrumen integrasi fungsional dalam pilar ASCC untuk mencapai persatuan dan solidaritas regional. Pola interaksi yang berkelanjutan antarmekanisme ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dirumuskan tidak berhenti pada tataran formalitas, melainkan diterjemahkan menjadi aksi nyata secara kolaboratif. Hal ini memperkuat rasa saling percaya di antara negara anggota melalui forum kebijakan yang teratur dan berkesinambungan demi mewujudkan identitas regional yang kuat.

Efektivitas koordinasi ini diperkuat oleh peran teknis *ASEAN Secretariat* yang memfasilitasi *monitoring* serta mobilisasi sumber daya melalui program *Monitoring, Evaluation and Learning Cycle of the Work Plan Implementation*. Rencana kerja periode 2021–2025 menerapkan prinsip *Country Leadership*, di mana setiap negara anggota diwajibkan memimpin setidaknya satu aktivitas utama guna menjamin rasa kepemilikan dan fokus pada kegiatan yang digerakkan oleh aspirasi regional. Mekanisme pelaporan dilakukan secara berkala kepada *Senior Officials Committee for the ASEAN Socio-Cultural Community* (SOCA) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pencapaian *key performance indicators* (KPIs) (ASEAN Main Portal, 2026d). Dalam dimensi ini, intensitas interaksi kelembagaan menjadi kunci dalam menyebarkan praktik terbaik keolahragaan di antara para pejabat senior untuk mengatasi tantangan sumber daya manusia dan pakar teknis. Koordinasi yang sistematis ini juga melibatkan SOMS Chair dalam mengarahkan penilaian jangka menengah serta akhir guna memantau kontribusi

olahraga terhadap pembangunan nasional dan global. Struktur kelembagaan ini telah menciptakan ekosistem kerja sama yang dinamis, adaptif, dan mampu merespons tren global melalui pendekatan multidimensi.

Dimensi koordinasi kelembagaan juga meluas melampaui batas internal melalui keterlibatan strategis dengan ASEAN *Dialogue Partners* serta berbagai organisasi internasional ternama. Pembentukan mekanisme kerja sama seperti AMMS+Japan, SOMS+Japan, serta kemitraan baru melalui AMMS+Tiongkok dan SOMS+Tiongkok mencerminkan perluasan jangkauan diplomasi olahraga ASEAN ke tingkat global (ASEAN Main Portal, 2024). Koordinasi eksternal ini memfasilitasi pertukaran pengetahuan dalam bidang ilmu keolahragaan dan manajemen kebijakan melalui kolaborasi dengan entitas seperti FIFA, UNESCO, WADA, serta Commonwealth Secretariat. Selain itu, sinergi lintas sektor dilakukan dengan badan sektoral kesehatan melalui kegiatan seperti *ASEANMove! Week in collaboration with the SOMHD* untuk mempromosikan gaya hidup aktif bagi masyarakat. Partisipasi aktif dalam forum internasional semacam ini membuktikan bahwa kerja sama olahraga ASEAN telah berevolusi menjadi platform diplomasi polilateral yang sangat intensif dan berdaya guna. Hubungan kemitraan yang didasarkan pada mutual interest and benefits ini memungkinkan ASEAN untuk memobilisasi dukungan finansial dan keahlian teknis secara lebih luas dari para mitra eksternal (ASEAN Main Portal, 2024).

Dimensi hasil daya saing olahraga dalam kerangka diplomasi ASEAN bukan sekadar tentang partisipasi rutin, melainkan upaya sistematis untuk mencapai keunggulan kompetitif yang diakui secara global sebagai manifestasi kemajuan kawasan. ASEAN mengimplementasikan visi kompetitif ini melalui *Priority Area 3: Professional Capacity Development, Sports Integrity and Sports Science* guna meningkatkan performa atlet di tingkat regional maupun internasional secara konsisten. Salah satu inisiatif kunci adalah *Programme 3.1: Standardisation of ASEAN Coach Training Programmes* yang bertujuan menciptakan ekosistem kepelatihan yang seragam dan berkualitas tinggi di seluruh kawasan Asia Tenggara (ASEAN Main Portal, 2026c). Penguatan kapasitas profesional ini selaras dengan argumen Murray bahwa kesuksesan atletik sering kali dieksploitasi oleh elit politik untuk mendemonstrasikan keunggulan sistem kenegaraan serta prestise nasional di

mata dunia. Melalui standardisasi ini, ASEAN berupaya membangun fondasi yang kokoh bagi para atlet agar mampu bersaing secara adil namun tetap memiliki daya dobrak yang kompetitif di panggung internasional (Murray, 2012).

ASEAN secara sadar memposisikan ajang regional sebagai batu loncatan menuju kompetisi yang lebih prestisius melalui *Joint Statement on Cementing Strong Foundation for ASEAN Athletes at the Southeast Asian Games*. Langkah strategis ini mencerminkan pemikiran Murray mengenai upaya negara untuk meningkatkan reputasi internasional sebuah negara (*international prestige*) dan memperbaiki citra nasional melalui kesuksesan di acara olahraga besar berskala global (Murray, 2012). Penyelarasan cabang olahraga di *SEA Games* dengan standar *Asian Games* dan *Olympic Games* dilakukan agar jalur prestasi atlet menjadi lebih stabil serta progresif menuju panggung dunia yang lebih luas. Selain itu, advancement of sports science menjadi pilar penting melalui *Programme 3.2: Professional exchange, joint training Programmes and capacity development platforms* yang melibatkan ahli nutrisi, kedokteran olahraga, hingga ilmuwan olahraga (ASEAN Main Portal, 2026c). Murray menekankan bahwa dalam era informasi modern, olahraga telah berkembang menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung kebijakan luar negeri suatu negara. yang dapat mengubah persepsi publik asing secara drastis melalui performa fisik yang tingkatnya tinggi (Murray & Pigman, 2014). Dengan mengintegrasikan sains olahraga secara mendalam, ASEAN berharap dapat mengoptimalkan performa atletik sekaligus meminimalkan risiko cedera sehingga tercipta keunggulan kompetitif kawasan yang berkelanjutan.

Daya saing yang berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari aspek integritas serta etika yang diakui secara internasional guna menjaga kredibilitas hasil kompetisi tersebut di mata masyarakat global. Stuart Murray mengingatkan bahwa sisi gelap olahraga, seperti penggunaan *doping* dan kecurangan, dapat merusak reputasi negara dan menjadi bentuk *sports anti-diplomacy* yang sangat merugikan posisi diplomatik (Murray, 2018). Oleh karena itu, ASEAN memperkuat perlindungan integritas melalui *Programme 3.3: Engagement of ASEAN Member States and relevant stakeholders in initiatives on sports law and anti-doping*. Penandatanganan *Memorandum of Understanding between ASEAN and the World*

Anti-Doping Agency (WADA) merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa keunggulan atlet ASEAN diraih melalui proses yang jujur serta transparan (ASEAN Main Portal, 2026c).

Sebagaimana dinyatakan Murray, diplomasi olahraga yang efektif harus mencerminkan identitas dan nilai yang dimiliki suatu negara (*authenticity*) dan kepatuhan terhadap aturan internasional, diplomasi olahraga dapat membangun kredibilitas negara dan menghindari dampak negatif yang timbul akibat pelanggaran etika maupun berbagai kontroversi dalam penyelenggaraannya (Murray, 2018). Melalui komitmen terhadap etika dan sportivitas ini, ASEAN tidak hanya mengejar perolehan medali, tetapi juga berupaya membangun identitas kawasan yang bersih, kompetitif, dan memiliki integritas tinggi di dalam struktur masyarakat olahraga internasional.

4.2.1.2 Pendekatan *Sport as Diplomacy*

Olahraga semakin diakui sebagai instrumen diplomasi yang efektif karena memiliki karakter universal yang mampu melintasi batas politik, budaya, maupun ideologi (Murray, 2020). Berbagai ajang olahraga internasional berskala besar, seperti Olimpiade, FIFA *world cup*, dan *Asian Games*, telah dimanfaatkan oleh banyak negara sebagai bagian dari strategi untuk mendukung pencapaian kepentingan serta tujuan kebijakan luar negeri mereka (Grix & Brannagan, 2024). Kemampuan olahraga dalam mempertemukan individu dari beragam latar belakang melalui nilai sportivitas dan kompetisi yang adil menjadikannya ruang netral bagi terjalinnya interaksi diplomatik, yang dalam banyak situasi lebih sulit diwujudkan melalui mekanisme diplomasi tradisional (Trunkos & Heere, 2017).

Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa penyelenggaraan ajang olahraga internasional bergengsi, seperti Olimpiade, FIFA *world cup*, dan *Asian Games*, dapat dimanfaatkan sebagai sarana yang efektif untuk memperkuat soft power suatu negara. Dalam konteks hubungan internasional kontemporer, diplomasi olahraga berkembang menjadi instrumen penting yang digunakan untuk membuka ruang dialog, membangun kepercayaan, serta mendorong kerja sama antarnegara (Mirzayeva, 2024). Melalui olahraga, negara dapat memproyeksikan

citra yang positif sekaligus mempertegas identitas nasionalnya di hadapan masyarakat internasional (Murray, 2018). Selain itu, olahraga juga menyediakan ruang interaksi lintas budaya yang lebih terbuka dan inklusif dibandingkan dengan jalur diplomasi politik formal, sehingga mampu mempererat hubungan antarbangsa secara lebih fleksibel (Cha, 2016).

Implementasi kerja sama olahraga ASEAN menggunakan pendekatan *sport as diplomacy* untuk menjadikan setiap aktivitas fisik sebagai arena praktik diplomasi secara langsung. Stuart Murray menjelaskan bahwa olahraga memiliki kapasitas unik untuk mempertemukan negara-negara anggota yang memiliki keterbatasan saluran komunikasi konvensional. Dalam *Programme 4.1 Preparation for the bidding of FIFA World Cup 2034 and explore opportunities to jointly host other global sports events* (ASEAN Main Portal, 2026c). AMMS membentuk Kelompok Kerja Teknis di bawah kepemimpinan Tailan dan Malaysia menyusun draf pengajuan bersama (*joint bidding*) menjadi tuan rumah *FIFA World Cup 2034* guna membangun citra positif kawasan. Pengajuan tuan rumah *FIFA World Cup 2034* tersebut mencerminkan identitas kolektif *One ASEAN* sebagai upaya memperkuat citra dan posisi ASEAN di tingkat internasional (Grix & Brannagan).

Programme 4.1 dalam Rencana Kerja ASEAN di Bidang Olahraga 2021-2025 memprioritaskan persiapan pengajuan bersama (*joint bidding*) untuk menjadi tuan rumah *FIFA World Cup 2034*. ASEAN membentuk Kelompok Kerja Teknis (TWG) di bawah kepemimpinan Tailan dan Malaysia untuk merancang draf pengajuan tersebut secara profesional (ASEAN Main Portal, 2026c). *sport as diplomacy* memandang program pengajuan tuan rumah *FIFA World Cup 2034* ini sebagai arena tempat berlangsungnya praktik diplomasi kawasan secara langsung. Inisiatif pengajuan bersama ini merepresentasikan identitas kolektif *One ASEAN* guna meningkatkan reputasi serta citra kawasan di mata publik internasional. Pertemuan koordinasi tahunan Kelompok Kerja Teknis memfasilitasi negosiasi diplomatik yang intensif guna menyelaraskan kepentingan nasional dari sepuluh negara anggota. Aktivitas olahraga berskala global ini berfungsi sebagai saluran komunikasi publik yang strategis untuk menunjukkan stabilitas politik serta ekonomi ASEAN kepada dunia. Penyelenggaraan acara olahraga besar mampu

menarik perhatian global terhadap informasi dan relasi antarnegara yang merupakan elemen esensial diplomasi.

Indonesia menerapkan pendekatan *sport as diplomacy* melalui partisipasi atlet dalam SEAP Games 1965 di Kuala Lumpur saat konflik Konfrontasi sedang memuncak. Penyelenggaraan SEA Games 1979 di Jakarta menjadi sarana pemerintah untuk memproyeksikan citra semangat gotong royong kepada tetangga regional. Indonesia juga memanfaatkan momentum Asian Games 2018 guna memperkuat posisi sebagai kekuatan menengah (*middle power*) yang mampu menyatukan rivalitas kawasan (Hoffmann dkk., 2004).

Pada tahun 2018, Indonesia memperoleh kesempatan untuk menjalankan praktik *sport as diplomacy* melalui penyelenggaraan Asian Games 2018. Asian Games menjadi arena diplomasi yang memiliki arti strategis bagi negara-negara di kawasan Asia. Kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah membuka peluang besar bagi negara ini untuk memperkuat posisinya dalam dinamika politik internasional (Cai dkk., 2025). Selain menjadi wadah kompetisi olahraga, penyelenggaraan Asian Games 2018 juga mencerminkan berbagai dimensi sosial, budaya, dan politik yang saling berkaitan.

Upacara pembukaan dan penutupan Asian Games 2018 berhasil menarik perhatian dunia melalui penampilan yang menonjolkan keberagaman budaya Nusantara. Berbagai simbol budaya, pertunjukan musik, dan tarian tradisional dimanfaatkan Indonesia sebagai sarana promosi budaya yang menunjukkan keterkaitan erat antara diplomasi olahraga dan *nation branding*. Melalui strategi tersebut, Indonesia berupaya membangun citra sebagai negara yang modern tanpa meninggalkan kekayaan tradisi yang dimilikinya. Dalam perspektif hubungan internasional, olahraga dapat berfungsi sebagai instrumen diplomasi yang mampu mengurangi ketegangan politik sekaligus memperkuat kerja sama antarnegara melalui interaksi nonformal, baik dalam arena pertandingan maupun melalui berbagai aktivitas budaya yang menyertai penyelenggaraan acara olahraga internasional (Cha, 2016b)

Selain itu, olahraga tradisional Indonesia juga memperoleh perhatian yang cukup besar selama Asian Games 2018 sebagai bagian dari upaya promosi budaya nasional. Pencak silat, yang merupakan salah satu warisan budaya Indonesia,

diperkenalkan sebagai instrumen *soft power* yang berhasil menarik perhatian masyarakat internasional sekaligus memperlihatkan keunikan budaya Indonesia. Kehadiran pencak silat dalam ajang tersebut turut memperluas diplomasi Indonesia melalui pengenalan unsur-unsur budaya yang lebih mendalam melalui medium olahraga (Trotier, 2021b). Dalam konteks yang lebih luas, *Asian Games* 2018 juga berfungsi sebagai media komunikasi internasional yang merepresentasikan identitas negara dan berkontribusi dalam memperkuat reputasi serta pengakuan global terhadap Indonesia. Dengan demikian, ajang ini menjadi platform simbolik yang efektif dalam membangun dan memperkuat citra Indonesia melalui praktik diplomasi tidak langsung (Tjiang, 2025).

Jika dikaitkan dengan konsep *sport as diplomacy*, pencak silat tidak hanya berfungsi sebagai cabang olahraga yang dipertandingkan dalam *Asian Games* 2018, tetapi juga menjadi instrumen diplomasi budaya yang digunakan Indonesia untuk memperluas pengaruh dan memperkuat identitas nasional di tingkat internasional (Tjiang, 2025). Berbeda dengan cabang olahraga modern yang bersifat universal dan tidak memiliki keterikatan kuat dengan identitas negara tertentu, pencak silat merupakan warisan budaya Indonesia yang mengandung nilai sejarah, filosofi, dan identitas bangsa. Oleh karena itu, ketika Indonesia berhasil memasukkan pencak silat ke dalam *Asian Games* 2018, yang dipromosikan bukan hanya aspek kompetitif olahraga, tetapi juga budaya nasional yang melekat di dalamnya.

Dalam perspektif diplomasi olahraga, pencak silat berfungsi sebagai instrumen *soft power* yang memungkinkan Indonesia memengaruhi persepsi masyarakat internasional melalui daya tarik budaya, bukan melalui tekanan politik maupun kekuatan ekonomi. Kehadiran pencak silat dalam *Asian Games* memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memperkenalkan nilai-nilai budaya lokal seperti sportivitas, disiplin, penghormatan terhadap lawan, dan harmoni yang menjadi bagian dari filosofi bela diri tersebut (Muhammad Miqdad, 2023). Dengan demikian, Indonesia menggunakan olahraga sebagai medium untuk menyampaikan narasi budaya kepada audiens internasional secara lebih efektif dan mudah diterima.

Lebih jauh lagi, pencak silat dapat dipahami sebagai bentuk *cultural branding* dalam diplomasi olahraga Indonesia. Jika Korea Selatan memanfaatkan taekwondo sebagai simbol identitas nasional dan Jepang menggunakan judo

maupun karate sebagai representasi budayanya di dunia internasional, maka Indonesia berupaya menempatkan pencak silat pada posisi yang serupa. Melalui *Asian Games* 2018, Indonesia tidak hanya memperkenalkan pencak silat kepada negara-negara Asia, tetapi juga berusaha meningkatkan legitimasi internasional olahraga tersebut agar dapat diterima secara lebih luas dalam kompetisi global (Tjiang, 2025). Upaya ini menunjukkan bahwa diplomasi olahraga tidak selalu dilakukan melalui penyelenggaraan ajang olahraga internasional, tetapi juga melalui promosi cabang olahraga yang merepresentasikan identitas nasional.

Dari sudut pandang *nation branding*, keberhasilan atlet Indonesia meraih 14 dari 16 medali emas cabang pencak silat semakin memperkuat asosiasi antara Indonesia dan olahraga tersebut. Prestasi tersebut menciptakan citra bahwa Indonesia merupakan pusat perkembangan pencak silat dunia sekaligus pemilik otoritas budaya terhadap olahraga tersebut. Kondisi ini penting karena dalam diplomasi modern, pengakuan internasional terhadap suatu unsur budaya dapat meningkatkan reputasi negara asalnya dan memperkuat daya tarik nasional di mata dunia (Rahadian, 2021).

Program *ASEANMove! Week* yang dikoordinasikan oleh Indonesia guna mempromosikan gaya hidup sehat melalui kolaborasi lintas sektor yang inklusif juga menunjukkan adanya pendekatan *sport as diplomacy* digunakan. Aktivitas olahraga tersebut berfungsi sebagai instrumen strategis untuk membangun narasi positif tanpa menggunakan kekuatan militer. Pemerintah pusat mengoordinasikan pembangunan infrastruktur besar-besaran untuk menunjukkan kapasitas manajerial negara di mata dunia. Selain itu, partisipasi 45 negara anggota *Olympic Council of Asia* menunjukkan pengakuan internasional bahwa Indonesia tidak hanya menjadi tuan rumah yang sukses tetapi juga menempati posisi strategis dalam jaringan diplomasi olahraga Asia (Trotier, 2021b). Implementasi program olahraga ini pada akhirnya memperkuat *nation branding* Indonesia di panggung politik internasional.

Malaysia dan Tailan menggunakan arena olahraga sebagai ruang negosiasi dan representasi politik yang sangat krusial di kawasan. Malaysia menyelenggarakan *SEAP Games* 1965 sebagai sinyal diplomatik untuk menunjukkan stabilitas nasional di tengah tekanan militer Konfrontasi. Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman memosisikan ajang tersebut sebagai bukti komitmen

Malaysia terhadap perdamaian regional dan kerja sama multilateral (Creak & Trotier, 2024). Tailan bertindak sebagai pendiri *SEAP Games* 1959 guna mempererat hubungan persahabatan negara-negara di Semenanjung Asia Tenggara. Saat ini, Tailan mengelola inisiatif APFI guna mengumpulkan data kebugaran regional secara ilmiah bagi pembuat kebijakan.

Vietnam, Laos, dan Kamboja memanfaatkan ajang *SEA Games* sebagai arena untuk membuktikan integrasi penuh mereka ke dalam komunitas regional pasca-konflik. Vietnam melakukan rekonsiliasi regional melalui kembalinya partisipasi atlet dalam *SEA Games* 1989 setelah absen selama empat belas tahun akibat perang. Penyelenggaraan *SEA Games* 2003 menjadi tonggak sejarah bagi Vietnam untuk memamerkan keberhasilan reformasi kebijakan *Doi Moi* kepada publik internasional (Creak & Trotier, 2024). Laos menyelenggarakan *SEA Games* 2009 guna menunjukkan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi nasional setelah isolasi yang panjang (Creak & Trotier, 2024). Pemerintah Laos menerapkan diplomasi kreatif dengan menjalin kemitraan pembangunan fasilitas olahraga bersama Tiongkok dan Vietnam. Kamboja mengusulkan turnamen bola voli *Friendship Match* pada tahun 2011 sebagai upaya memulihkan kepercayaan publik setelah sengketa perbatasan (Creak & Trotier, 2024). Atlet Kamboja tetap berpartisipasi dalam ajang internasional di Tailan meskipun ketegangan teritorial sedang berlangsung di wilayah perbatasan. Penyelenggaraan perdana *SEA Games* 2023 oleh Kamboja akhirnya melengkapi status negara tersebut sebagai anggota. Seluruh aktivitas tersebut membuktikan bahwa olahraga mampu bertindak sebagai jembatan diplomatik ketika saluran komunikasi resmi mengalami kebuntuan.

Singapura, Brunei Darussalam, dan Myanmar mengimplementasikan diplomasi olahraga melalui penguatan kapasitas profesional dan kepemimpinan di tingkat regional. Singapura memimpin penguatan integritas olahraga melalui penandatanganan *memorandum of understanding* resmi antara ASEAN dengan WADA (The Brunei Aquatics, 2021). *Singapore Sports Institute* (SSI) memfasilitasi pertukaran profesional kedokteran olahraga dan ilmuwan tingkat tinggi di kawasan Asia. Singapura juga aktif mengelola dialog kebijakan untuk memastikan lingkungan olahraga yang aman bagi seluruh atlet dari segala bentuk pelecehan (ASEAN Main Portal, 2026c). Brunei Darussalam menginisiasi program *ASEAN*

Youth Sports Camp guna memupuk kepemimpinan pemuda dan solidaritas regional sejak usia dini (ASEAN Main Portal, 2026c). Myanmar mengelola platform *ASEAN Forum for Women Leadership in Sports* untuk meningkatkan kepemimpinan dan keamanan bagi atlet Perempuan (ASEAN Main Portal, 2026c). Setiap negara anggota ASEAN memimpin setidaknya satu aktivitas spesifik dalam Rencana Kerja Olahraga guna menjamin kepemilikan bersama atas integrasi kawasan.

4.2.2 Analisis Implementasi Kerja Sama Olahraga ASEAN dalam *Elite Sports Development Framework*

Analisis terhadap hasil kerja sama olahraga ASEAN menunjukkan bahwa hasil yang dicapai belum sepenuhnya optimal jika diukur dari peningkatan daya saing atlet di tingkat internasional. Meskipun implementasi program dalam *ASEAN Work Plan on Sports 2016–2020* dan *2021–2025* menunjukkan tingkat aktivitas yang tinggi, hasil yang dihasilkan masih didominasi oleh aspek sosial dan kelembagaan. Dalam *elite sports development framework* milik Houlihan dan Green, kondisi ini dapat dijelaskan melalui beberapa keterbatasan struktural yang memengaruhi efektivitas kebijakan olahraga kawasan.

Secara konseptual, kerangka tersebut terdiri atas beberapa dimensi utama yang saling berkaitan, yaitu; Dimensi *elite sport development* menekankan pembangunan *elite sport system* melalui penguatan kualitas atlet, pelatih, fasilitas, kompetisi, dan dukungan *sport science*. Dimensi *mass participation* yang menekankan pengembangan partisipasi olahraga Masyarakat. Dimensi *capacity building* yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan, tata kelola, dan manajemen organisasi olahraga. Dimensi *integrity and regulation* yang mencakup penerapan aturan, pengawasan, dan kebijakan olahraga seperti *anti-doping* (Houlihan & Green, 2008). Keterbatasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan desain program, tetapi juga dengan karakteristik kelembagaan ASEAN serta ketimpangan kapasitas antarnegara anggota (Houlihan & Green, 2008). Dengan demikian, analisis ini berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya kontribusi kerja sama olahraga ASEAN terhadap peningkatan daya saing atlet.

Dalam perspektif Houlihan dan Green, keberhasilan peningkatan daya saing atlet sangat ditentukan oleh kekuatan *elite sports system* yang mencakup pembinaan atlet, *sport science*, serta dukungan fasilitas berstandar tinggi (Houlihan & Green, 2008). Namun, program-program ASEAN pada periode awal lebih berfungsi sebagai instrumen diplomasi sosial dibandingkan sebagai mekanisme pengembangan performa atlet. Kegiatan seperti *ASEAN School Games*, pertukaran atlet, dan promosi TSG memang menciptakan ruang interaksi lintas negara, tetapi tidak secara langsung terhubung dengan sistem pembinaan atlet elit. Dengan demikian, meskipun aktivitas program tinggi, kontribusinya terhadap peningkatan performa kompetitif masih bersifat tidak langsung.

Dalam perspektif De Bosscher dkk. (2009), keberhasilan *elite sports development framework* negara-negara maju ditentukan oleh pendekatan sistemik yang mencakup dukungan pendanaan olahraga, dukungan organisasi nasional, identifikasi pengembangan talenta, dukungan karir atlet, fasilitas pelatihan olahraga, kompetisi nasional dan internasional, serta riset ilmiah olahraga (De Bosscher dkk., 2009). Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan *elite sports development framework* membutuhkan integrasi antara kebijakan nasional, sistem pembinaan olahraga, dan pengembangan kapasitas olahraga secara berkelanjutan.

4.2.2.1 Dimensi *Elite sport system*

Dalam dimensi *elite sport system* di tingkat Kawasan, Program kerja sama olahraga ASEAN yang tertuang dalam *ASEAN Work Plan on Sports* lebih banyak berfokus pada pertukaran, pelatihan atlet elit, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Data implementasi periode 2016–2020 menunjukkan bahwa hanya sekitar 6 persen aktivitas yang secara langsung berkaitan dengan penguatan olahraga kompetitif, sementara sebagian besar aktivitas difokuskan pada peningkatan kesadaran kawasan dan interaksi sosial melalui olahraga. Selain itu, dokumen *ASEAN Work Plan on Sports 2021–2025* juga tidak menunjukkan adanya pembentukan sistem pembinaan atlet elit secara regional, seperti mekanisme

identifikasi bakat lintas negara, pusat pelatihan berstandar tinggi, atau sistem kompetisi elit yang terintegrasi.

Kualitas sistem pembinaan dan pengembangan atlet. Sistem pembinaan yang efektif mencakup identifikasi bakat sejak usia dini, pelatihan berjenjang, serta jalur karier atlet yang jelas (Hoffmann dkk., 2004). Negara dengan sistem pembinaan terstruktur mampu menghasilkan atlet yang siap bersaing di tingkat internasional (Houlihan dkk., 2010). Sebaliknya, sistem yang tidak terintegrasi menyebabkan proses regenerasi atlet terhambat. Kondisi ini banyak ditemukan di negara-negara Asia Tenggara yang masih mengandalkan pendekatan jangka pendek. Literatur menjelaskan bahwa keberhasilan *elite sport system* sangat bergantung pada efektivitas sistem pembinaan jangka panjang (Houlihan & Green, 2008). Selain itu, integrasi antara lembaga pendidikan, federasi olahraga, dan pemerintah juga menjadi elemen penting.

Program yang dikembangkan dalam *Priority Area 3* memang mencakup pelatihan atlet elit dan penguatan kapasitas profesional, namun belum diarahkan secara spesifik pada pembentukan sistem *high-performance sport*. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pengembangan *elite sports development framework* di tingkat kawasan yang menjadi faktor utama terbatasnya peningkatan daya saing atlet ASEAN. Kondisi sistem pembinaan olahraga di Asia Tenggara pada dasarnya masih berada dalam tahap berkembang dan belum sepenuhnya terinstitusionalisasi secara kuat seperti di negara-negara maju. Dalam perspektif kebijakan olahraga, keberhasilan prestasi internasional tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari sistem pembinaan yang terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam jangka Panjang (Hoye dkk., 2010). Mengacu pada *elite sports development framework* yang dikembangkan oleh Barrie Houlihan dan Mick Green, *elite sport system* yang efektif setidaknya mencakup beberapa komponen utama, yaitu pembangunan fasilitas elit, dukungan pendanaan, penyediaan pelatihan atlet elit dan *sport science*, serta struktur kompetisi yang terarah menuju ajang internasional (Houlihan & Green, 2008). Model ini menjadi standar dalam menilai apakah suatu negara memiliki sistem pembinaan yang mampu menghasilkan atlet berprestasi global.

Dalam konteks Asia Tenggara, beberapa negara seperti Indonesia mulai mengadopsi pendekatan tersebut melalui sistem pembinaan nasional yang mencakup pelatihan terpusat (Pelatnas), dukungan *sport science*, serta penyediaan fasilitas dan pendanaan untuk atlet elit (Rahadian dkk., 2021). Keberhasilan pendekatan ini dapat dilihat, misalnya, pada capaian Indonesia dalam *Asian Games* 2018 yang berhasil meraih 31 medali emas dan menempati posisi ke-4 di Asia. Data ini menunjukkan bahwa ketika sistem pembinaan berjalan relatif terstruktur dan didukung kebijakan yang kuat, peningkatan prestasi dapat dicapai.

Namun demikian, kondisi tersebut tidak merata di seluruh kawasan Asia Tenggara. Dalam penelitian mengenai kebijakan olahraga di ASEAN menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam aspek pendanaan, partisipasi, dan pengembangan sistem olahraga, terutama di negara-negara dengan kapasitas ekonomi lebih rendah (Hoffmann dkk., 2004). Bahkan, literatur yang tersedia terkait sistem olahraga di beberapa negara ASEAN masih sangat terbatas, yang menunjukkan lemahnya pengembangan institusional di sektor ini.

Selain itu, sistem pembinaan olahraga secara umum memerlukan pendekatan jangka panjang melalui *sport development pyramid*, yang mencakup tahapan dari partisipasi dasar hingga prestasi elit. Namun, penelitian menunjukkan bahwa keberadaan sistem tersebut saja tidak cukup untuk menghasilkan atlet berprestasi tinggi tanpa adanya jalur *athlete pathway* yang jelas dan berkelanjutan (Green dkk., 2011). Dalam banyak kasus di Asia Tenggara, jalur ini masih belum terbentuk secara optimal, sehingga regenerasi atlet tidak berjalan secara konsisten. Dari sisi kebijakan regional, ASEAN sebenarnya telah berupaya membangun kerangka pembinaan melalui *ASEAN Work Plan on Sports 2021–2025*.

Pengembangan olahraga prestasi memerlukan pendekatan yang holistik dan terorganisasi, termasuk penguatan *sport science*, *talent identification* sejak usia dini (De Bosscher dkk., 2006), serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan secara terintegrasi. Selain itu, ASEAN juga mendorong penyelarasan cabang olahraga di *SEA Games* dengan *Asian Games* dan Olimpiade sebagai bagian dari jalur pembinaan atlet menuju level global. Namun, tantangan utama terletak pada implementasi. Kerja sama ASEAN bersifat *non-binding*, sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas dan komitmen masing-masing negara. Hal ini

menyebabkan tidak adanya standar regional yang kuat dalam sistem pembinaan olahraga, sehingga kesenjangan antar negara tetap tinggi.

kondisi sistem pembinaan olahraga di Asia Tenggara menunjukkan beberapa karakter utama. Pertama, adanya upaya menuju sistem yang lebih terstruktur, terutama di negara-negara tertentu. Kedua, masih terdapat ketimpangan kapasitas yang signifikan antar negara. Ketiga, lemahnya integrasi sistem pembinaan jangka panjang yang berdampak pada tidak stabilnya produksi atlet elit (Hoffmann dkk., 2004). Dengan demikian, rendahnya daya saing atlet Asia Tenggara sebagaimana terlihat pada capaian medali emas sebelumnya tidak hanya disebabkan oleh faktor performa individu, tetapi juga oleh keterbatasan sistem pembinaan yang belum sepenuhnya matang. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kerangka normatif yang telah dibangun di tingkat regional dengan realitas implementasi di tingkat nasional.

4.2.2.2 Dimensi *Mass Participation*

Dalam dimensi *mass participation*, orientasi kebijakan yang lebih menekankan pada pembangunan sosial dibandingkan peningkatan performa olahraga kompetitif. Program-program dalam *ASEAN Work Plan on Sports 2021–2025* menunjukkan fokus yang kuat pada isu inklusivitas, partisipasi masyarakat, gaya hidup sehat, serta pemberdayaan kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. *Priority Area 1* dan *Priority Area 2* secara eksplisit menempatkan olahraga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan sosial dan kesehatan masyarakat. Selain itu, berbagai program juga diarahkan untuk mendukung *ASEAN Community Vision 2025* dan SDGs. Dalam perspektif *diplomacy through sports*, orientasi ini menunjukkan perkembangan ASEAN dalam menggunakan olahraga sebagai alat untuk membangun kohesi sosial dan identitas kawasan. Namun, dalam kerangka Houlihan dan Green, fokus yang dominan pada dimensi *mass participation* menyebabkan pengembangan *elite sports development framework* menjadi kurang mendapat perhatian (Green dkk., 2011). Hal ini berdampak pada terbatasnya kontribusi kebijakan terhadap peningkatan daya saing atlet.

Dimensi *mass participation* memang memiliki fungsi penting dalam memperluas basis partisipasi olahraga masyarakat dan membangun budaya olahraga nasional. Peningkatan partisipasi masyarakat dianggap dapat menjadi fondasi awal dalam proses identifikasi bakat olahraga (*talent pool*) yang nantinya mendukung pembinaan atlet elit. Namun, Houlihan dan Green menekankan bahwa peningkatan partisipasi massal tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan prestasi olahraga internasional apabila tidak diikuti oleh sistem pembinaan elit yang terstruktur, dukungan *sport science*, jalur pengembangan atlet (*athlete pathway*), serta investasi kompetitif jangka panjang (Green dkk., 2011). Dalam konteks ASEAN, kebijakan olahraga kawasan masih lebih dominan diarahkan pada perluasan akses olahraga masyarakat dibanding pembentukan sistem *high performance sport* yang terintegrasi.

Dominasi pendekatan sosial tersebut terlihat dari berbagai program ASEAN yang lebih berorientasi pada kampanye hidup sehat, olahraga untuk pembangunan (*sport for development*), penguatan inklusivitas sosial, serta pemberdayaan komunitas melalui olahraga. ASEAN juga aktif mengembangkan program seperti *Women in Sports*, TSG, olahraga untuk disabilitas, dan kampanye kesehatan masyarakat sebagai bagian dari penguatan identitas sosial kawasan. Bahkan, sebagian besar implementasi program *ASEAN Work Plan on Sports 2016–2020* lebih banyak diarahkan pada kegiatan partisipatif dan pembangunan komunitas dibanding pengembangan olahraga kompetitif tingkat tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa olahraga di ASEAN masih diposisikan sebagai instrumen sosial dan pembangunan masyarakat, bukan sebagai instrumen strategis untuk membangun kekuatan *elite sports development framework*.

Dalam perspektif *elite sports development framework*, kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara dimensi *mass participation* dan *elite sport development*. Negara-negara dengan sistem olahraga maju seperti Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan tidak hanya mengembangkan olahraga masyarakat, tetapi juga secara simultan membangun *elite sport system* melalui pusat pelatihan nasional, identifikasi bakat usia dini, *sport science*, dukungan finansial, dan kompetisi berjenjang yang terintegrasi (Houlihan & Green, 2008). Sebaliknya, ASEAN belum menunjukkan integrasi yang kuat antara program partisipasi

masyarakat dengan jalur pembinaan atlet elit di tingkat kawasan. Akibatnya, peningkatan partisipasi olahraga masyarakat belum secara konsisten bertransformasi menjadi peningkatan performa kompetitif di tingkat internasional.

Selain itu, orientasi *mass participation* yang terlalu dominan juga memengaruhi alokasi prioritas kebijakan dan sumber daya olahraga kawasan. Sebagian besar program kerja sama ASEAN lebih banyak diarahkan pada pembangunan sosial, peningkatan jejaring komunitas, dan penguatan identitas regional dibanding pembangunan *elite sport system* yang berbasis performa. Dalam jangka panjang, kondisi ini menyebabkan kerja sama olahraga ASEAN lebih berhasil menghasilkan pengembangan hasil olahraga sosial dibanding hasil kompetitif. ASEAN relatif berkembang memperkuat hubungan sosial kawasan melalui olahraga, namun belum mampu membangun daya saing atlet ASEAN secara kolektif di tingkat global.

4.2.2.3 Dimensi *Capacity Building*

Dalam dimensi *capacity building* dan tata kelola kelembagaan Keterbatasan, struktur kerja sama olahraga ASEAN melalui AMMS dan SOMS bersifat koordinatif dan tidak mengikat secara hukum. Kebijakan yang dihasilkan dalam *ASEAN Work Plan on Sports* hanya berfungsi sebagai pedoman bersama yang pelaksanaannya sangat bergantung pada komitmen masing-masing negara anggota. Mekanisme ini tercermin dalam proses implementasi program yang dilakukan oleh negara anggota, Sekretariat ASEAN, serta mitra kerja sama secara terdesentralisasi. Meskipun pada periode 2021–2025 ASEAN mulai mengembangkan mekanisme *monitoring and evaluation* (M&E) serta indikator kinerja, efektivitas implementasi tetap bergantung pada kapasitas nasional. Dalam kerangka Houlihan dan Green, kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam dimensi *capacity building* pada tingkat kawasan, karena tidak terdapat otoritas supranasional yang mampu memastikan keseragaman implementasi kebijakan. Akibatnya, hasil yang dihasilkan menjadi tidak konsisten antarnegara.

Daya saing atlet di kawasan Asia Tenggara dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural yang saling berkaitan dalam sistem olahraga nasional. Salah satu faktor

utama adalah tingkat investasi dan pendanaan dalam sektor *elite sport system*. Negara yang mengalokasikan anggaran lebih besar cenderung memiliki fasilitas yang memadai, program pelatihan yang berkelanjutan, serta dukungan teknologi yang lebih baik. Sebaliknya, keterbatasan anggaran menyebabkan pembinaan atlet tidak berjalan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan finansial memiliki peran penting dalam menentukan kualitas output atlet. *Elite sports development framework* berkorelasi langsung dengan keberhasilan prestasi internasional (De Bosscher dkk., 2006). Faktor ini menjelaskan mengapa terdapat kesenjangan prestasi antarnegara di kawasan ASEAN.

Perbedaan kapasitas antarnegara di Asia Tenggara menunjukkan variasi yang signifikan dalam mendukung pembangunan olahraga prestasi. Negara seperti Indonesia dan Tailan memiliki dukungan kelembagaan, pendanaan, serta pengalaman kompetisi yang relatif lebih kuat dibandingkan negara lain di kawasan. Sementara itu, negara seperti Laos, Kamboja, dan Timor Leste masih menghadapi keterbatasan dalam infrastruktur olahraga dan sumber daya manusia (Hoffmann dkk., 2004). Kondisi ini menciptakan ketimpangan dalam kemampuan negara untuk membangun sistem pembinaan yang efektif. Perbedaan kapasitas tersebut tidak hanya terlihat dari aspek ekonomi, tetapi juga dari prioritas kebijakan nasional terhadap sektor olahraga. Dalam penelitian De Bosscher menunjukkan bahwa tata kelola yang baik merupakan salah satu determinan utama keberhasilan *elite sport development framework* (De Bosscher dkk., 2006). Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga memengaruhi kepercayaan publik dan dukungan terhadap sektor olahraga. Negara dengan tata kelola lemah cenderung mengalami hambatan dalam pengembangan olahraga prestasi.

Negara dengan komitmen kebijakan yang lebih tinggi cenderung memiliki program pembinaan yang lebih terarah. Sebaliknya, negara dengan kapasitas terbatas cenderung mengandalkan pendekatan jangka pendek. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa pembangunan olahraga di Asia Tenggara belum berjalan secara merata. Kapasitas negara sangat memengaruhi keberhasilan *elite sport system* (Houlihan & Green, 2008). Oleh karena itu, perbedaan kapasitas menjadi faktor utama dalam menjelaskan variasi prestasi antarnegara di kawasan. Negara dengan kapasitas tinggi lebih mampu memanfaatkan program regional

dibandingkan negara dengan kapasitas rendah. Kondisi ini menyebabkan manfaat kerja sama tidak terdistribusi secara merata. kebijakan di ASEAN menunjukkan bahwa kerja sama olahraga ASEAN masih berfokus pada penguatan kapasitas dan pertukaran pengetahuan (Hoffmann dkk., 2004).

Perbedaan kapasitas tersebut secara langsung tercermin dalam capaian prestasi olahraga di tingkat internasional. Data Olimpiade menunjukkan bahwa hanya beberapa negara Asia Tenggara yang mampu meraih medali emas, seperti Indonesia dan Filipina dengan masing-masing dua medali emas serta Tailan dengan satu medali emas. Sementara itu, sebagian besar negara lain di kawasan tidak memperoleh medali emas sama sekali (The Olympic Studies Centre, 2026). Distribusi capaian ini menunjukkan bahwa prestasi olahraga di Asia Tenggara terkonsentrasi pada negara tertentu. Negara dengan kapasitas pembinaan yang lebih baik mampu menghasilkan atlet yang kompetitif di tingkat global. Sebaliknya, negara dengan kapasitas rendah belum mampu menembus level prestasi tertinggi. Kondisi ini memperlihatkan adanya hubungan langsung antara kapasitas nasional dan capaian prestasi. Studi menunjukkan bahwa investasi dalam *elite sport system* berkorelasi positif dengan keberhasilan internasional (De Bosscher dkk., 2006). Dengan demikian, capaian prestasi yang tidak merata merupakan konsekuensi dari perbedaan kapasitas yang dimiliki masing-masing negara. Hal ini menegaskan bahwa daya saing kawasan belum terbentuk secara kolektif.

Perbedaan kapasitas juga memengaruhi kemampuan negara dalam memanfaatkan kerja sama regional di ASEAN. Kerangka kerja seperti *ASEAN Work Plan on Sports* telah memberikan arah normatif bagi peningkatan kapasitas olahraga. Namun, implementasi kebijakan tersebut sangat bergantung pada kemampuan masing-masing negara dalam menerjemahkannya ke dalam kebijakan nasional. Negara dengan kapasitas tinggi lebih mampu mengadopsi dan mengimplementasikan program regional secara efektif. Sebaliknya, negara dengan kapasitas terbatas mengalami kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kondisi domestik.

Kondisi ini menyebabkan manfaat kerja sama regional tidak dirasakan secara merata. Kerja sama olahraga di ASEAN masih menghadapi kendala dalam hal kesenjangan kapasitas dan koordinasi kebijakan (Hoffmann dkk., 2004).

Akibatnya, tujuan kolektif untuk meningkatkan daya saing kawasan belum tercapai secara optimal. Perbedaan ini memperkuat adanya kesenjangan antara kerangka normatif dan realitas implementasi. Oleh karena itu, variasi kapasitas antarnegara menjadi faktor penting dalam menjelaskan ketimpangan capaian prestasi di Asia Tenggara.

4.2.2.4 Dimensi Integrity dan Regulation

Dalam dimensi *integrity and regulation, elite sports development framework* juga menunjukkan bahwa kerja sama olahraga ASEAN masih belum berkembang secara optimal dalam mendukung peningkatan daya saing atlet. Dalam kerangka Houlihan dan Green, dimensi ini mencakup penerapan regulasi, tata kelola olahraga (*sport governance*), pengawasan, standarisasi kebijakan, mekanisme *monitoring*, serta penguatan sistem integritas olahraga seperti *anti-doping policy* dan *fair play system* (Houlihan & Green, 2008). Keberadaan regulasi dan tata kelola yang kuat menjadi elemen penting dalam menciptakan *elite sport system* yang profesional, transparan, dan kompetitif di tingkat internasional.

Dalam konteks ASEAN, beberapa upaya sebenarnya telah mulai dikembangkan melalui *ASEAN Work Plan on Sports 2021–2025*, terutama pada aspek penguatan tata kelola olahraga dan integritas kompetisi. Dokumen *ASEAN Work Plan* menunjukkan bahwa ASEAN mulai mendorong kerja sama dalam bidang *anti-doping education*, pengembangan standar kebijakan olahraga, peningkatan kapasitas organisasi olahraga, serta penguatan mekanisme *monitoring and evaluation* (M&E) terhadap implementasi program olahraga kawasan. Bahkan, dalam *Programme 3.3 ASEAN* secara khusus mengembangkan kerja sama mengenai *sports law and anti-doping* melalui pelatihan *Doping Control Officer* (DCO), *anti-doping education course*, *Therapeutic Use Exemption* (TUE), hingga pembentukan kerja sama resmi dengan WADA melalui *ASEAN-WADA Memorandum of Understanding*. Selain itu, ASEAN juga melibatkan SEARADO sebagai mitra dalam penguatan integritas olahraga kawasan (ASEAN Main Portal, 2026).

ASEAN juga mulai mengembangkan sistem *monitoring and evaluation* (M&E) beserta *key performance indicators* (KPIs) dalam *ASEAN Work Plan on Sports 2021–2025* guna meningkatkan efektivitas implementasi program olahraga Kawasan (ASEAN Main Portal, 2026). Mekanisme ini dikelola bersama oleh *ASEAN Secretariat* dan SOMS sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola olahraga yang lebih terukur dan akuntabel. Selain itu, ASEAN juga mulai mengaitkan kebijakan olahraga dengan prinsip *good governance*, perlindungan atlet, *sports integrity*, dan pencegahan manipulasi kompetisi olahraga sebagaimana tercermin dalam integrasi *ASEAN Work Plan* dengan *Kazan action plan* dan *ASCC Blueprint 2025*.

Namun demikian, implementasi dimensi *integrity and regulation* di ASEAN masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural. Dalam praktiknya, sistem regulasi olahraga ASEAN masih bersifat koordinatif dan belum memiliki mekanisme pengawasan supranasional yang mengikat. ASEAN belum memiliki standar regional yang seragam terkait sertifikasi pelatih, sistem pembinaan atlet elit, *sport science*, maupun tata kelola federasi olahraga. Akibatnya, kualitas regulasi dan implementasi kebijakan olahraga sangat bergantung pada kapasitas nasional masing-masing negara anggota.

Kondisi tersebut terlihat dari masih adanya permasalahan kepatuhan terhadap standar *anti-doping* internasional di beberapa negara Asia Tenggara. Pada tahun 2021, Indonesia dan Tailan sempat dinyatakan *non-compliant* oleh WADA akibat permasalahan implementasi program pengawasan *anti-doping* dan penerapan *World Anti-Doping Code* (Rahadian, 2021). Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun ASEAN telah mulai mengembangkan kerja sama integritas olahraga, kapasitas implementasi regulasi olahraga di tingkat nasional masih belum merata di seluruh kawasan.

Selain itu, beberapa negara ASEAN juga masih berada pada tahap penguatan regulasi domestik *anti-doping*. Brunei Darussalam, misalnya, baru memperbarui regulasi *anti-doping* nasional pada tahun 2021 agar sesuai dengan *World Anti-Doping Code 2021* sebagai bagian dari kewajiban kepatuhan terhadap WADA (The Brunei Aquatics, 2021). Proses ini menunjukkan bahwa penguatan

integritas olahraga di Asia Tenggara masih berlangsung secara bertahap dan belum sepenuhnya terinstitusionalisasi secara kuat di tingkat kawasan.

Dalam perspektif *elite sports development framework*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ASEAN masih lebih menekankan dimensi koordinasi normatif dibanding pembangunan *performance-based governance system* yang mampu mendukung pengembangan *elite sports development framework* secara kompetitif. Sebagian besar indikator dalam *ASEAN Work Plan* masih berfokus pada jumlah kegiatan, partisipasi program, serta penguatan jejaring kerja sama, bukan pada target peningkatan performa olahraga internasional yang terukur (Rahadian dkk., 2021). Padahal, dalam *elite sport development framework*, keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari intensitas program, tetapi juga dari kemampuan tata kelola olahraga dalam menghasilkan peningkatan prestasi atlet secara konsisten.

Dengan demikian, keterbatasan dimensi *integrity and regulation* memperlihatkan bahwa ASEAN masih menghadapi tantangan dalam membangun sistem tata kelola olahraga regional yang terintegrasi, terstandarisasi, dan berbasis performa. Meskipun terdapat perkembangan dalam aspek *anti-doping awareness*, *sports governance*, *fair play system*, dan *monitoring* implementasi kebijakan, mekanisme tersebut belum mampu membentuk sistem pengawasan *elite sports development framework* yang kuat di tingkat kawasan (vietnam.vn, 2025). Dalam kerangka Houlihan dan Green, lemahnya dimensi ini turut menjelaskan mengapa kerja sama olahraga ASEAN belum menghasilkan peningkatan daya saing atlet secara konsisten di tingkat global.

Dengan demikian, keterbatasan hasil kerja sama olahraga ASEAN dapat dijelaskan melalui kombinasi faktor struktural yang mencakup lemahnya pengembangan *elite sports development framework*, keterbatasan kelembagaan, orientasi kebijakan yang lebih bersifat sosial, ketimpangan kapasitas antarnegara, serta kurangnya integrasi antara program regional dan sistem nasional. Dalam perspektif *diplomacy through sports*, ASEAN dapat dikatakan mengalami perkembangan dalam membangun hubungan sosial, memperkuat identitas kawasan, serta memperluas jaringan kerja sama melalui olahraga. Namun, dalam

elite sports development framework, perkembangan tersebut belum diikuti dengan peningkatan daya saing atlet secara konsisten di tingkat global.

4.2.3 Analisis Implementasi Kerja Sama Olahraga ASEAN melalui AMMS dalam Perspektif *Diplomacy Through Sports* dan *Elite Sports Development Framework*

Jika dianalisis menggunakan kerangka *diplomacy through sports* dari Stuart Murray, mekanisme kelembagaan ini menunjukkan bahwa ASEAN telah berkembang dalam membangun dimensi *cooperation* melalui koordinasi lintas negara yang terstruktur. Interaksi yang difasilitasi oleh AMMS dan SOMS menciptakan ruang kerja sama yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat dimensi *trust building* melalui proses koordinasi yang rutin dan berbasis consensus (Murray, 2018). Struktur kelembagaan ini memungkinkan negara anggota untuk terlibat dalam kerja sama olahraga tanpa tekanan politik yang tinggi, sehingga memperkuat fungsi olahraga sebagai medium diplomasi non-formal.

Dalam *ASEAN Work Plan on Sports 2021–2025*, penguatan kelembagaan terlihat melalui pembentukan kerangka *monitoring and evaluation* (M&E) dan penggunaan *key performance indicators* (KPIs) (ASEAN Main Portal, 2026). Mekanisme ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta memastikan adanya pengukuran terhadap capaian kerja sama olahraga kawasan. Selain itu, ASEAN melibatkan mitra eksternal seperti UNESCO dan Japan Sports Agency dalam mendukung implementasi program melalui kerja sama teknis dan pendanaan. Pelibatan aktor eksternal menunjukkan bahwa koordinasi kelembagaan tidak hanya berlangsung di tingkat internal ASEAN, tetapi juga melibatkan jaringan kerja sama internasional. Dalam perspektif *diplomacy through sports*, mekanisme ini mencerminkan upaya untuk membangun *institutionalised diplomacy* melalui penguatan struktur dan prosedur kerja sama (Murray, 2018).

Namun, karakter ASEAN yang tidak memiliki otoritas supranasional menyebabkan efektivitas koordinasi sangat bergantung pada komitmen masing-masing negara anggota. Setiap negara memiliki kapasitas, sumber daya, dan prioritas kebijakan yang berbeda dalam mengimplementasikan program kerja sama

olahraga. Perbedaan tersebut berdampak pada tingkat partisipasi dan kontribusi negara dalam pelaksanaan program regional.

Analisis hasil kebijakan dalam kerja sama ASEAN dilakukan menilai sejauh mana implementasi kebijakan melalui AMMS berkontribusi terhadap peningkatan daya saing atlet di kawasan. Dalam penelitian ini, daya saing atlet dipahami sebagai kemampuan negara-negara ASEAN dalam mencapai prestasi olahraga di tingkat internasional secara kompetitif dan berkelanjutan. Untuk mengkaji hal tersebut, penelitian ini menggunakan *elite sports development framework* yang dikembangkan oleh Barrie Houlihan dan Mick Green, yang menekankan empat dimensi utama, yaitu *elite sport*, *mass participation*, *capacity building*, serta *integrity and regulation* (Houlihan & Green, 2008).

Dalam kerangka ini, keberhasilan kebijakan olahraga tidak hanya diukur dari capaian prestasi atlet, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan mampu membangun sistem olahraga yang terintegrasi dan berkelanjutan (Houlihan & Green, 2008). Dengan demikian, analisis pada sub bab ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir berupa perolehan medali, tetapi juga pada keterkaitan antara program kerja sama olahraga ASEAN dengan struktur pengembangan olahraga di tingkat kawasan. Pendekatan ini penting untuk melihat apakah kerja sama olahraga ASEAN melalui AMMS telah mampu bergerak dari sekadar interaksi dan koordinasi menuju peningkatan kapasitas kompetitif atlet secara nyata.

Jika dilihat dari distribusi hasil, kerja sama olahraga ASEAN menunjukkan kecenderungan yang lebih kuat pada dimensi *mass participation* dan *capacity building*. Program-program yang dikembangkan dalam *ASEAN Work Plan on Sports 2016–2020* maupun *2021–2025* banyak berfokus pada peningkatan partisipasi masyarakat melalui kegiatan olahraga, promosi gaya hidup sehat, serta pertukaran atlet dan pelatih. Selain itu, ASEAN juga menunjukkan penguatan pada dimensi *capacity building* melalui berbagai program pelatihan, pertukaran profesional, serta pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga. Hal ini mencerminkan bahwa kerja sama olahraga ASEAN diarahkan untuk membangun fondasi sosial dan kelembagaan dalam sistem olahraga kawasan.

Pada periode 2021–2025, ASEAN juga mulai memperkuat dimensi *integrity and regulation* melalui pengembangan kebijakan *anti-doping*, standarisasi

pelatihan, serta penerapan mekanisme *monitoring* dan *evaluation* (Rahadian dkk., 2021). Perkembangan ini menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan tata kelola olahraga yang lebih transparan dan terstruktur. Selain itu, keterlibatan mitra internasional dalam berbagai program juga memperkuat dimensi kerja sama dan pertukaran pengetahuan di tingkat regional.

Indonesia menjadi salah satu contoh negara ASEAN yang menunjukkan keterkaitan antara pengembangan sistem olahraga nasional dengan peningkatan prestasi olahraga internasional. Keberhasilan *elite sports system* di Indonesia memainkan peran dalam pembangunan dan konstruksi identitas bangsa (Rahadian dkk., 2021). Peran strategis dalam *elite sports system* dapat bermanfaat dengan mempertimbangkan visi untuk diintegrasikan secara efektif dalam pencapaian tujuan (Molan dkk., 2019). Selain itu, arah kebijakan dan rencana strategis merupakan acuan dalam penentuan skala prioritas pembangunan olahraga (Rahadian, 2021).

Seiring perkembangannya, keberhasilan olahraga digambarkan sebagai simbol kebangkitan nasional dan juara olahraga menjadi ikon nasional. Status dan kekuatan olahraga Indonesia di antara negara-negara lain diukur dari keberhasilan negara dalam pencapaian prestasi di ajang-ajang olahraga internasional. Dalam konteks ini, pengembangan *elite sports system* dapat dimaknai sebagai proses pembinaan cabang olahraga unggulan yang ditujukan untuk menghadapi kompetisi yang tepat (Kidd, 2008), baik pertandingan maupun perlombaan mulai dari tingkat regional hingga internasional.

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Indonesia dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005 (UU No. 3 Tahun 2005, 2005). Sistem pembinaan dan pengembangan atlet elit di Indonesia yang diadaptasi dari *elite sports system* yang berorientasi pada beberapa prioritas utama, yaitu pembangunan fasilitas elit, pendanaan, dukungan bagi atlet, penyediaan pelatihan dan ilmu keolahragaan, serta kesempatan bertanding yang dipusatkan melalui pemusatan latihan nasional (Pelatnas) untuk menghadapi kompetisi internasional seperti *Asian Games* 2018 (Rahadian, 2021).

Pelaksanaan program-program pembangunan olahraga tersebut dilakukan secara sistematis dan terpadu. Dalam perspektif Houlihan & Green (2008), keberhasilan *elite sports development framework* bukan hanya berkaitan dengan pencapaian prestasi, tetapi juga menyangkut pengakuan diplomatik, persaingan ideologi, serta manfaat politik dan ekonomi yang diperoleh negara melalui olahraga internasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa *elite sports development framework* telah berkembang menjadi bagian dari instrumen pembangunan nasional dan identitas negara. Di sisi lain, keberhasilan atlet elit juga menjadi fokus utama pembuat kebijakan dalam meningkatkan posisi perolehan medali, meskipun pengelolaan *elite sports system* jauh melampaui faktor meso-level dalam kebijakan olahraga (Sotiriadou & De Bosscher, 2017).

Implementasi kebijakan *elite sports development framework* Indonesia juga terlihat dalam penyelenggaraan *Asian Games* 2018. Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan strategis seperti Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan *Asian Games* 2018 (PERPRES No. 48 Tahun 2017, 2017), Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) (PERPRES No. 95 Tahun 2017, 2017), serta Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana dan Sarana *Asian Games* 2018 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN), 2022). Dukungan kebijakan tersebut memperlihatkan adanya pendekatan sistemik dalam pembangunan *elite sports development framework* Indonesia.

Pencapaian Indonesia dalam *Asian Games* 2018 juga memperlihatkan adanya peningkatan performa olahraga nasional. Indonesia berhasil memperoleh 31 medali emas, 24 medali perak, dan 43 medali perunggu serta menempati peringkat keempat dari 45 negara peserta Asia. Capaian tersebut menjadi salah satu prestasi tertinggi Indonesia sepanjang sejarah *Asian Games* sejak 1951. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan pemusatan latihan nasional, dukungan pemerintah, pembangunan fasilitas olahraga, serta penguatan *sport science* dan sistem pembinaan atlet elit secara lebih terstruktur.

Dalam perspektif De Bosscher dkk. (2009), keberhasilan *elite sports development framework* negara-negara maju ditentukan oleh pendekatan sistemik yang mencakup dukungan pendanaan olahraga, dukungan organisasi nasional, identifikasi pengembangan talenta, dukungan karir atlet, fasilitas pelatihan olahraga, kompetisi nasional dan internasional, serta riset ilmiah olahraga (De Bosscher dkk., 2009). Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan *elite sports development framework* membutuhkan integrasi antara kebijakan nasional, sistem pembinaan olahraga, dan pengembangan kapasitas olahraga secara berkelanjutan.

Implementasi kerja sama olahraga ASEAN melalui AMMS dapat dipahami memiliki keterkaitan dengan penguatan kapasitas olahraga nasional negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Agenda kerja sama seperti pengembangan pelatih, *sport science*, *women in sport*, *anti-doping*, dan *capacity building* menunjukkan adanya upaya regional untuk memperkuat pengembangan olahraga kawasan. Namun demikian, temuan ini juga memperlihatkan bahwa peningkatan daya saing atlet ASEAN tetap sangat dipengaruhi oleh kapasitas domestik masing-masing negara dalam membangun *elite sport system* yang terstruktur, dukungan pendanaan, kualitas pembinaan atlet, serta keberlanjutan kebijakan olahraga nasional.

Dalam perspektif Houlihan dan Green, keberhasilan peningkatan daya saing atlet sangat ditentukan oleh kekuatan *elite sports system* yang mencakup pembinaan atlet, *sport science*, serta dukungan fasilitas berstandar tinggi (Houlihan & Green, 2008). Namun, program-program ASEAN pada periode awal lebih berfungsi sebagai instrumen diplomasi sosial dibandingkan sebagai mekanisme pengembangan performa atlet. Kegiatan seperti *ASEAN School Games*, pertukaran atlet, dan promosi TSG memang menciptakan ruang interaksi lintas negara, tetapi tidak secara langsung terhubung dengan sistem pembinaan atlet elit. Dengan demikian, meskipun aktivitas program tinggi, kontribusinya terhadap peningkatan performa kompetitif masih bersifat tidak langsung.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kerja sama olahraga melalui AMMS pada periode 2016–2025 telah berkembang secara kelembagaan dan program dalam kerangka ASCC. AMMS berperan sebagai instrumen utama dalam mendorong diplomasi olahraga kawasan melalui pendekatan *diplomacy through sports*, yang diwujudkan dalam berbagai program seperti pertukaran atlet dan pelatih, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyusunan kebijakan kolektif melalui *ASEAN Work Plan on Sports*.

Dari sisi pengembangan program, kerja sama olahraga ASEAN mengalami peningkatan dalam hal diversifikasi dan intensitas kegiatan. Program-program yang dijalankan menunjukkan adanya upaya kolektif untuk memperkuat fondasi olahraga kawasan, termasuk dalam aspek *women in sport*, olahraga disabilitas, *sport science*, serta penguatan tata kelola olahraga. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif dan institusional, ASEAN telah memiliki kerangka kerja yang cukup komprehensif dalam mendukung pengembangan olahraga.

Dari sisi koordinasi kelembagaan, AMMS dan SOMS telah membentuk mekanisme interaksi yang terstruktur dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan olahraga kawasan. Hubungan antara AMMS, SOMS, dan kerangka ASCC menunjukkan adanya pola koordinasi yang relatif konsisten, yang mencerminkan komitmen negara-negara anggota dalam membangun kerja sama olahraga yang terorganisasi. Namun demikian, efektivitas koordinasi tersebut masih dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas nasional, prioritas kebijakan, serta tingkat implementasi di masing-masing negara.

Meskipun demikian, dari sisi hasil, implementasi kerja sama olahraga ASEAN melalui AMMS belum mampu menghasilkan peningkatan daya saing atlet yang konsisten di tingkat internasional. Data empiris menunjukkan adanya penurunan capaian medali kolektif negara-negara ASEAN dalam *Asian Games* serta posisi yang relatif rendah dalam kompetisi global seperti Olimpiade. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas kerja sama belum diikuti oleh peningkatan performa atlet secara konsisten.

Selain itu, distribusi daya saing di kawasan masih bersifat tidak merata. Prestasi olahraga masih terkonsentrasi pada beberapa negara dengan kapasitas yang lebih kuat, seperti Indonesia, Tailan, dan Malaysia, sementara sebagian besar negara lainnya memiliki kontribusi yang terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama olahraga ASEAN belum mampu membentuk daya saing kolektif yang inklusif dan merata di seluruh kawasan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara kapasitas kelembagaan dan capaian empiris. Di satu sisi, ASEAN telah mengalami perkembangan dalam membangun struktur kerja sama olahraga yang relatif solid dan terinstitusionalisasi. Namun di sisi lain, struktur tersebut belum sepenuhnya mampu diterjemahkan menjadi output konkret dalam bentuk peningkatan daya saing atlet. Dengan demikian, implementasi AMMS masih berada pada tahap penguatan proses kerja sama, dan belum mencapai tahap optimal dalam menghasilkan dampak strategis terhadap performa olahraga kawasan.

5.2 Saran

Indonesia perlu memanfaatkan kerja sama olahraga ASEAN sebagai sarana untuk memperkuat sistem pembinaan olahraga prestasi secara lebih strategis dan berkelanjutan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa berbagai program yang dikembangkan dalam kerangka kerja sama ASEAN, seperti *capacity building*, pertukaran pelatih dan atlet, *sport science sharing*, pengembangan sumber daya manusia olahraga, serta penguatan tata kelola olahraga, dapat menjadi sumber pembelajaran yang berharga bagi negara-negara anggota. Program-program tersebut tidak hanya berfungsi sebagai wadah pertukaran pengalaman dan

pengetahuan, tetapi juga membuka peluang bagi negara anggota untuk memahami berbagai pendekatan yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pembinaan dan prestasi olahraga.

Oleh karena itu, Indonesia perlu mengoptimalkan partisipasinya dalam berbagai program kerja sama tersebut dan menerjemahkan hasilnya ke dalam kebijakan nasional yang berorientasi pada peningkatan performa atlet. Pemanfaatan kerja sama ASEAN sebaiknya tidak berhenti pada tingkat keikutsertaan dalam forum atau kegiatan regional semata, tetapi juga diikuti dengan upaya untuk mengintegrasikan pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik yang diperoleh ke dalam sistem olahraga nasional. Dengan demikian, kerja sama regional dapat memberikan dampak yang lebih nyata terhadap peningkatan kualitas pembinaan atlet di Indonesia.

Selain itu, Indonesia perlu memperkuat investasi pada aspek *sport science*, pengembangan kapasitas pelatih, sistem talent identification, serta pembinaan atlet jangka panjang yang terstruktur dan berkesinambungan. Penguatan pada aspek-aspek tersebut menjadi penting mengingat persaingan olahraga internasional saat ini tidak hanya ditentukan oleh bakat atlet, tetapi juga oleh kualitas sistem pendukung yang meliputi ilmu pengetahuan olahraga, teknologi, manajemen pelatihan, nutrisi, hingga layanan kesehatan olahraga. Dalam konteks ini, pengalaman negara-negara ASEAN yang mengembangkan cabang olahraga tertentu dapat dijadikan referensi untuk memperbaiki kebijakan dan program pembinaan olahraga di Indonesia.

kerja sama olahraga ASEAN juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana benchmarking untuk mengidentifikasi dan mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan olahraga prestasi. Indonesia dapat mempelajari berbagai model pembinaan atlet, sistem kompetisi, pengembangan pelatih, maupun tata kelola organisasi olahraga yang diterapkan oleh negara-negara anggota ASEAN yang menunjukkan perkembangan positif dalam prestasi olahraga. Melalui proses pembelajaran tersebut, Indonesia dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik sistem olahraga nasional.

Dengan demikian, keterlibatan Indonesia dalam kerja sama olahraga ASEAN tidak hanya berkontribusi pada penguatan solidaritas dan integrasi

kawasan, tetapi juga memberikan manfaat konkret bagi peningkatan kapasitas kelembagaan olahraga nasional, kualitas pembinaan atlet, serta daya saing olahraga Indonesia di tingkat regional maupun internasional. Pada akhirnya, pemanfaatan kerja sama ASEAN secara optimal dapat menjadi salah satu instrumen pendukung bagi Indonesia dalam mewujudkan prestasi olahraga yang lebih kompetitif pada ajang-ajang internasional, seperti *Asian Games*, *SEA Games*, hingga Olimpiade.

Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji secara lebih mendalam mengenai posisi dan klasifikasi negara atau wilayah dalam analisis perbandingan prestasi olahraga internasional. Dalam penelitian ini, Mongolia, Makau, Cina Taipei, dan Hong Kong ditempatkan dalam kelompok Asia Timur bersama Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan berdasarkan klasifikasi yang umum digunakan dalam statistik olahraga internasional seperti *Asian Games* dan berbagai publikasi olahraga Asia. Namun demikian, keberadaan Hong Kong dan Makau sebagai Daerah Administratif Khusus Tiongkok serta Cina Taipei yang memiliki status politik dan representasi internasional yang unik membuka ruang analisis yang menarik mengenai hubungan antara status politik, identitas nasional, dan representasi olahraga internasional.

Seperti dalam kasus Cina Taipei, olahraga dapat dipahami sebagai sarana untuk mempertahankan visibilitas dan identitas internasional di tengah kompleksitas status politiknya dalam hubungan dengan Tiongkok. Kajian semacam ini dapat memperluas pemahaman mengenai pendekatan *sport as diplomacy* yang memandang olahraga sebagai arena diplomasi itu sendiri. Kajian tersebut penting untuk menjelaskan bagaimana olahraga menjadi arena representasi identitas politik dan diplomasi internasional, khususnya bagi negara yang memiliki status politik khusus atau masih menjadi objek sengketa dalam hubungan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2009). *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order*.
- Anholt, S. (2011). *Beyond the Nation Brand: The Role of Image and Identity in International Relations*. Dalam A. Pike (Ed.), *Brands and Branding Geographies*. Edward Elgar Publishing.
<https://doi.org/10.4337/9780857930842.00027>
- ASEAN Main Portal. (2017, November 10). *Joint Statement of The Fourth ASEAN Ministerial Meeting on Sports (AMMS-4)*. ASEAN Main Portal.
<https://asean.org/speechandstatement/joint-statement-of-the-fourth-asean-ministerial-meeting-on-sports-amms-4/>
- ASEAN Main Portal. (2019, November 10). *Joint Statement of The Fifth ASEAN Ministerial Meeting on Sports (AMMS-5)*. ASEAN Main Portal.
<https://asean.org/speechandstatement/joint-statement-of-the-fifth-asean-ministerial-meeting-on-sports-amms-5/>
- ASEAN Main Portal. (2024, Oktober 16). *ASEAN Senior Officials Meetings on Sports conclude with strong focus on regional collaboration and sports development*. ASEAN Main Portal. <https://asean.org/asean-senior-officials-meetings-on-sports-conclude-with-strong-focus-on-regional-collaboration-and-sports-development/>
- ASEAN Main Portal. (2025, Oktober 16). *Strengthening Regional Sports Cooperation: The 8th ASEAN Ministerial Meeting on Sports (AMMS-8) Held in Hanoi*. ASEAN Main Portal.

<https://asean.org/strengthening-regional-sports-cooperation-the-8th-asean-ministerial-meeting-on-sports-amms-8-held-in-hanoi/>

ASEAN Main Portal. (2026a). *Major Sectoral Bodies/Committees. ASEAN Main Portal.* <https://asean.org/our-communities/asean-socio-cultural-community/sports/>

ASEAN Main Portal. (2026b). *The ASEAN Work Plan on Sports 2016-2020. ASEAN Main Portal.* <https://asean.org/our-communities/asean-socio-cultural-community/sports/key-documents/>

ASEAN Main Portal. (2026c). *The ASEAN Work Plan on Sports 2021-2025. ASEAN Main Portal.* <https://asean.org/book/asean-work-plan-on-sports-2021-2025/>

ASEAN Main Portal. (2026d). *Who We Work With. ASEAN Main Portal.* <https://asean.org/who-we-work-with/>

ASEAN Socio-Cultural Community. (2025). *ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2025. ASEAN Main Portal.* <https://asean.org/book/asean-socio-cultural-community-blueprint-2025/>

Cai, L., Li, Y., Yan, Y., & Wu, S. (2025). *Analysis of the Influence of the Asian Games Based on Decision Tree Model. International Journal of Education and Social Development*, 3(1), 58–61. <https://doi.org/10.54097/8gc83y93>

Cha, V. (2016a). *Role of Sport in International Relations: National Rebirth and Renewal. Asian Economic Policy Review*, 11(1), 139–155. <https://doi.org/10.1111/aepr.12127>

Cooper, A. F., & Parlar Dal, E. (2016). *Positioning the third wave of middle power diplomacy: Institutional elevation, practice limitations. International Journal*, 71(4), 516–528. <https://doi.org/10.1177/0020702016686385>

- Creak, S., & Trotier, F. (2024). *Sport, diplomacy, and regionalism in Southeast Asia: The Southeast Asian (SEA) Games and ASEAN*. *Sport in Society*, 1–20. <https://doi.org/10.1080/17430437.2024.2325971>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- De Bosscher, V., De Knop, P., Van Bottenburg, M., & Shibli, S. (2006). *A Conceptual Framework for Analysing Sports Policy Factors Leading to International Sporting Success*. *European Sport Management Quarterly*, 6(2), 185–215. <https://doi.org/10.1080/16184740600955087>
- De Bosscher, V., De Knop, P., van Bottenburg, M., Shibli, S., & Bingham, J. (2009). *Explaining international sporting success: An international comparison of elite sport systems and policies in six countries*. *Sport Management Review*, 12(3), 113–136. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2009.01.001>
- Green, M., Houlihan, B., Green, M., & Houlihan, B. (2011). *Routledge handbook of sports development / edited by Barrie Houlihan and Mick Green*. Routledge.
<https://library.olympics.com/Default/doc/SYRACUSE/43624/routledge-handbook-of-sports-development-edited-by-barrie-houlihan-and-mick-green>
- Grix, J., & Brannagan, P. M. (2016). *Of Mechanisms and Myths: Conceptualising States' "Soft Power" Strategies through Sports Mega-Events*. *Diplomacy & Statecraft*, 27(2), 251–272. <https://doi.org/10.1080/09592296.2016.1169791>
- Grix, J., & Brannagan, P. M. (2024). *Sports Mega-Events as Foreign Policy: Sport Diplomacy, "Soft Power," and "Sportswashing."* *American Behavioral Scientist*, 00027642241262042. <https://doi.org/10.1177/00027642241262042>

- Hayase, S. (2020). *Sports and Nationalism in Southeast Asia: SEAP Games/SEA Games, 1959–2019*. *Journal of Asia-Pacific Studies (Waseda University)*.
- Hoffmann, R., Ging, L. C., & Ramasamy, B. (2004). *Olympic Success and ASEAN Countries: Economic Analysis and Policy Implications*. *Journal of Sports Economics*, 5(3), 262–276. <https://doi.org/10.1177/1527002503261826>
- Houlihan, B. (2009). *Mechanisms of international influence on domestic elite sport policy*. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 1(1), 51–69. <https://doi.org/10.1080/19406940902739090>
- Houlihan, B., & Green, M. (2008). *Comparative elite sport development: Systems, structures and public policy* (1st ed). Butterworth-Heinemann.
- Houlihan, B., Tan, T.-C., & Green, M. (2010). *Policy Transfer and Learning From the West: Elite Basketball Development in the People's Republic of China*. *Journal of Sport and Social Issues*, 34(1), 4–28. <https://doi.org/10.1177/0193723509358971>
- Hoye, R., Nicholson, M., & Houlihan, B. (2010). *Sport and policy: Issues and analysis* (1. ed). Elsevier/Butterworth-Heinemann.
- KEMENPORA. (2023, Juli 17). Laporan Nasional Sport Development Index Tahun 2022. <https://deputi2.kemenpora.go.id/dokumen/31/laporan-nasional-sport-development-index-tahun-2022>
- KEMENPORA. (2026). Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga. <https://kemenpora.go.id/rencana-strategis>
- Kheokao, M. R. (2017a). *SPORTS DIPLOMACY: CASE STUDY “ROLE OF SPORTS IN ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY (ASCC).”* *International Law and Diplomacy*.
- Kidd, B. (2008). *A new social movement: Sport for development and peace*. *Sport in Society*, 11(4), 370–380. <https://doi.org/10.1080/17430430802019268>

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Third edition). SAGE Publications, Inc.
- Mitchell, H., & Stewart, M. F. (2007). *A competitive index for international sport. Applied Economics*, 39(5), 587–603. <https://doi.org/10.1080/00036840500447740>
- Molan, C., Kelly, S., Arnold, R., & Matthews, J. (2019). *Performance Management: A Systematic Review of Processes in Elite Sport and Other Performance Domains. Journal of Applied Sport Psychology*, 31(1), 87–104. <https://doi.org/10.1080/10413200.2018.1440659>
- Muhammad, E. (2025). Dampak Penyelenggaraan MotoGP di Sirkuit Internasional Sepang terhadap Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Malaysia. 2(5).
- Muhammad Miqdad, A. (2023). Strategi Diplomasi Olahraga Indonesia Sebagai Tuan Rumah Asian Games 2018 = Indonesia's Sports Diplomacy Strategy as the Host of the 2018 Asian Games. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Universitas Indonesia Library. <https://lib.ui.ac.id>
- Murray, S. (2012). *The Two Halves of Sports-Diplomacy. Diplomacy & Statecraft*, 23(3), 576–592. <https://doi.org/10.1080/09592296.2012.706544>
- Murray, S. (2018). *Sport diplomacy: Origins, Theory and Practice*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351126960>
- Murray, S., & Pigman, G. A. (2014). *Mapping the relationship between international sport and diplomacy. Sport in Society*, 17(9), 1098–1118. <https://doi.org/10.1080/17430437.2013.856616>
- Narine, S. (2002). *Explaining ASEAN: Regionalism in Southeast Asia*. Lynne Rienner Publishers.
- Nikolai Böhlke, L. R. (2009). *Is benchmarking appropriate for the management of elite sport systems?*

- Özsari, A. (2018). *Sport Diplomacy As Public Diplomacy Element. International Journal of Science Culture and Sport*, 6(28), 339–349. <https://doi.org/10.14486/IntJSCS765>
- PERPRES No. 48 Tahun 2017. (2017, April 18). Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/72906/perpres-no-48-tahun-2017>
- PERPRES No. 95 Tahun 2017. (2017, Oktober 20). Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/73199/perpres-no-95-tahun-2017>
- Rahadian, A. (2021). KEBIJAKAN OLAHRAGA DALAM PEMERINTAHAN LOKAL: Sebuah Penelitian dalam Merumuskan Rancangan Induk Pembangunan Olahraga Nasional. <https://doi.org/10.31219/osf.io/wpebs>
- Rahadian, A., Ma'mun, A., Berliana, B., & Nuryadi, N. (2021). *SPORT POLICY INDONESIA: ELITE SPORT DEVELOPMENT. ASEAN Journal of Sport for Development and Peace*, 1(1), 15–22. <https://doi.org/10.17509/ajsdp.v1i1.35540>
- Ramadhan, M. G., Paramitha, S. T., Ma'mun, A., Nuryadi, N., & Juliantine, T. (2022). *Analysis of Elite Sports Development Patterns through Sports Education. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology*, 10(4), 868–893. <https://doi.org/10.46328/ijemst.2619>
- Sotiriadou, & De Bosscher. (2017, November 22). *Managing high-performance sport: Introduction to past, present and future considerations*. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/16184742.2017.1400225>
- The ASEAN Magazine. (2023). *Sports for All—The ASEAN Magazine*. <https://theaseanmagazine.asean.org/edition/sports-for-all/>
- The Brunei Aquatics. (2021, November 27). *Anti Doping*. Brunei Aquatics. <https://www.bruneiaquatics.org/anti-doping>

- The Olympic Studies Centre. (2026). *The Olympic Studies Centre—Your source of reference for Olympic knowledge*. <https://www.olympics.com/ioc/olympic-studies-centre>
- Tjiang, D. E. E. (2025). Diplomasi publik Indonesia dalam olahraga pencak silat melalui penyelenggaraan Asian Games tahun 2018. <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/22697>
- Trotier, F. (2021a). *Indonesia's Position in Asia: Increasing Soft Power and Connectivity through the 2018 Asian Games*. *TRaNS: Trans -Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 9(1), 81–97. <https://doi.org/10.1017/trn.2020.12>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN). (2022, Maret 16). Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/203148/uu-no-11-tahun-2022>
- UNESCO. (2020, Desember 22). *UNESCO ICM*. UNESCO ICM. <http://unescoicm.org/eng>
- UU No. 3 Tahun 2005. (2005, September 23). Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40234/uu-no-3-tahun-2005>
- vietnam.vn. (2025, Oktober 16). *Joint Statement on AMMS 8: Goals for a Healthy, Dynamic and Sustainable ASEAN*. Vietnam.Vn. <https://www.vietnam.vn/en/tuyen-bo-chung-ve-amms-8-muc-tieu-mot-asean-khoe-manh-nang-dong-va-ben-vung>